

PUBLIC POLICY

Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis

VOLUME 2 No. 1 Maret 2020

ISSN 2721-1673 (Cetak)
ISSN 2721-1681 (Online)



LPPM STIA SAID PERINTAH

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>



Reformasi Bieokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Tanimbar Selatan

Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Telly Muriandy & Victor S. Ruhunlela (1-20)

Dampak Insentif, Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pegawai

Gilbert Alvin Rumahlatu & Anthoneta Telsy Waelauruw (21-36)

Determinan Kerja Sistem informasi Akuntansi dimoderasi oleh Pendidikan dan Pelatihan

Victor Pattiasina, M. Yamin Noch, Saling, M. Bonsapia & A. Patiran (37-56)

Pengaruh Perputaran Kas, Piutang dan Persediaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan

Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI

Wiwini S. Makatutu & Rahma Arsyad (57-74)

Perangkat Pembelajaran Usaha dan Energi Berbasis *STEM* Terintegrasi Kearifan Lokal

Timba Laor di Negeri Allang Kabupaten Maluku Tengah

Anatasija Limba & Clara Levenia Jamarua (75-87)

Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur

Jacobus A. Rahajaan & Sarifa Niapele (88-101)

Analisis *Financial Distress* Menggunakan Metode Altman Z-Score

pada PT. Golden Plantation Tbk. Periode 2014-2018

Cintya M. Idi & Johanis D. Borolla (102-121)

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Nilai yang dirasakan Terhadap

Kepuasan Konsumen dan Intersitas Pembelian

Leonora Ferdinandus & Stevanus J. Gomie (122 - 141)

Rural Tourism, Agri Tourism; Sebuah Penelusuran Literatur

Khaeril Khaeril, Yolanda Mohungo, Laela (142 -157)

Penerapan Model Asesmen Problem Based Learning dengan Pendekatan STEM

Guna Melatih Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi

Elsina S. Tamaela, Iramuar I. Kdise & Vils D. Huwae (158 - 170)

Profesionalisme Kerja Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Maryam Salampessy & Matheus Rumaratu (171 - 187)

Telly Muriany¹
Victor S. Ruhunlela²

¹Ilmu Pemerintahan STISIP Kebangsaan Masohi

²Ilmu Pemerintahan Fisip Unpatti
tellymuriany@yahoo.co.id



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

Bureaucratic reform in public services in the south Tanimbar Island urgent. The facts show the South Tanimbar Islands is still faced various obstacles in public services, especificaly in the of education, health and licensing the District level as the spearhead of the South Tanimbar Islands (KKT) government in providing public services. This study used a qualitative because it fits with characteristics of the phenomenon researched verify reform issues that has been and can be done expected in accordance the character of the islands.

The results showed in Tanimbar Selatan Subdistrict, (KKT) was not effective because of the problems faced related to the sub-district government's efforts to implement bureaucratic reform The authority given has not been fully implemented as expected. The aspect of organizational structure, it has implemented the principles aranged in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2016 about Regional Apparatus, it is expeted to prioritize aspects of interests and needs as well as the availability of Regional Government Budgets, the function of authority is often not adjusted to the capacity and comhpetence of the apparatus. it is based on likes and dislikes. technology-based information is still lacking, of course it has a negative impact on the lw level of public services provided to the community, people are not satisfied believe in the public services provided by these government officials.

Keywords : Bureaucracy, Dimension, Institutional, Public Services, Reform

Pendahuluan

Pemerintah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memberikan perhatian serius pada usaha reformasi birokrasi dalam dekade terakhir. Agenda kebijakan nasional dalam dekade terakhir di negara-negara tersebut telah mencakup program-program reformasi birokrasi yang ambisius, seperti reformasi program pelayanan publik (Fatile, Jacob O. and Adejuwon, 2010), reformasi pengadaan barang pemerintah (Syquia, 2007; Nahuway & Tamaela, 2020), reformasi organisasi dan institusi (Economic Commission for Africa, 2003), serta reformasi penggajian (Kiragu, K. and Mukandala, 2003). Reformasi birokrasi penting bagi negara-negara berkembang karena di negara-negara tersebut birokrasi merupakan mesin utama sektor pemerintah (Kaufman, H., 2011) tetapi birokrasi kekurangan kapasitas untuk memfasilitasi tugas-tugas pemerintahan secara efektif (Farazmand, 2007). Akibat dari kekurangan kapasitas birokrasi, antara lain, negara-negara berkembang belum dapat menata sistem kesejahteraan nasional secara efektif.

Reformasi birokrasi seharusnya menjadi solusi bagi pemerintah Indonesia. Akan tetapi, belum mampu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, merajalelanya kasus korupsi, struktur birokrasi yang kaku, kompleks, dan refragmentasi, budaya kekuasaan yang berlebihan, politisasi birokrasi yang semakin meluas, kualitas aparatur yang buruk, serta kualitas pelayanan yang buruk. Kebijakan reformasi yang hanya mengandalkan pada perbaikan remunerasi, pembobotan jabatan, dan penataan organisasi, sebagaimana yang diterapkan di kementerian keuangan dan kementerian percontohan lainnya, tentu tidak memadai untuk menjawab masalah birokrasi pemerintah di Indonesia yang cenderung sudah sangat kronis dan menular hampir di setiap aspek kehidupan birokrasi (Dwiyanto, dalam Dahyar Daraba H, 2019).

Proses reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang tidak akan pernah berhenti. Hal ini karena akan selalu ada perubahan dan dinamisasi dalam pengelolaan negara, serta kompleksitas masalah yang terus berkembang. Dengan demikian, reformasi birokrasi merupakan program berkelanjutan yang harus dicanangkan dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, proses reformasi birokrasi harus terus mendapat dukungan semua pihak. Semua stakeholder atau pemangku kepentingan perlu terus terlibat didalamnya. Baik pihak pemerintah, akademisi, LSM, media, politisi, tokoh adat, tokoh agama, serta unsur-unsur masyarakat lainnya harus tetap menjaga semangat

perjuangan untuk mewujudkan birokrat Indonesia yang professional, transparan, efektif, dan bertanggung jawab (Priyono, 2014).

Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) nampaknya sangat urgen dilakukan saat ini. Fakta menunjukkan bahwa KKT masih dihadapkan dengan berbagai kendala dalam pelayanan publik terutama yang berkaitan erat dengan pelayanan kebutuhan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan terutama pada level kecamatan sebagai ujung tombak pemerintah KKT dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Fenomena kesenjangan pelayanan publik yang belum mampu diselesaikan Pemerintah KKT adalah pelayanan publik pada tingkat kecamatan yang disebabkan oleh rendahnya tata kelola pemerintahan (*governance*), kedudukan, kewenangan, dan kapasitas struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kecamatan. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditegaskan pada Pasal 5 ayat (2) bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas; (a) Sekretariat Daerah; (b) Sekretariat DPRD; (c) Inspektorat; (d) Dinas; (e) Badan; dan (f) Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menempatkan kecamatan sebagai posisi terdepan dalam membantu tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian pelayanan publik menjadi salah satu bagian krusial yang diharapkan dapat menjadi titik fokus perhatian pemerintah KKT. Mengingat kondisi wilayah kecamatan sebagian besar adalah di kecamatan kepulauan dengan kondisi yang marjinal beserta segala akses negatif yang dihadapi, maka perluasan kewenangan pemerintah kecamatan kepulauan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik menjadi sangat diperlukan. Untuk meningkatkan kapasitas kecamatan, maka diperlukan reformasi administrasi dalam birokrasi pemerintah KKT, peningkatan kemampuan pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik, pengembangan kapasitas organisasi, manajemen, pendanaan, sumber daya, dan sarana prasarana yang memadai.

Permasalahan utama pelayanan publik saat ini pada tingkat kecamatan yang memiliki karakteristik geografis (kepulauan) dan masih terisolasi, sudah tentu memerlukan dukungan sarana prasarana, seperti sarana komunikasi, transportasi yang relatif sangat kurang berdampak pada rendahnya mobilitas orang, barang, dan jasa yang

secara langsung mempengaruhi perwujudan pelayanan publik yang berkualitas pada tingkat kecamatan. Untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, Pemerintah KKT saat ini fokus pada dua program pelayanan publik yang masih sangat kurang yaitu urusan bidang pendidikan dan kesehatan yang sudah diprogramkan pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, meskipun dirasakan masyarakat masih sangat kurang.

Reformasi birokrasi diupayakan menjangkau penataan struktur organisasi dan prosedur serta kebijakan manajemen sumberdaya manusia, upaya reformasi birokrasi makin terprogram dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, pada 2010, terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi reformasi birokrasi menurut Perpres ini adalah terwujudnya pemerintahan profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Area-area reformasi birokrasi menurut Perpres tersebut adalah: (1) organisasi; (2) tatalaksana; (3) peraturan perundangundangan; (4) sumber daya manusia; (5) pengawasan; (6) akuntabilitas; (7) pelayanan publik; dan (8) pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Pelayanan publik menjadi salah satu bagian krusial yang diharapkan dapat menjadi titik fokus perhatian pemerintah KKT. Mengingat kondisi wilayah Kecamatan sebagian besar adalah di kecamatan kepulauan dengan kondisi yang marginal beserta segala akses negatif yang dihadapi, maka perluasan kewenangan pemerintah kecamatan kepulauan dalam rangka optimalisasi pelayanan publik diperlukan saat ini. Untuk meningkatkan kapasitas Kecamatan, maka diperlukan reformasi administrasi dalam birokrasi pemerintah KKT, peningkatan kemampuan pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik, pengembangan kapasitas organisasi, manajemen, pendanaan, sumber daya, dan sarana prasarana yang memadai.

Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terdapat 10 Kecamatan yang tersebar pada tujuh (7) pulau dimana 4 kecamatan berada pada Pulau Yamdena, sedangkan enam (6) kecamatan berada pada enam (6) pulau yang berbeda, sedangkan Kecamatan Tanimbar Selatan merupakan lokus berada pada pulau Yamdena di pusat KKT. Berdasarkan fenomena saat ini sesuai dengan hasil pengamatan menunjukkan terbatas dukungan infrastruktur seperti gedung sekolah, perkantoran, listrik, jalan, jembatan,

menyebabkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang merupakan kebutuhan primer masyarakat di Kecamatan ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten, dan ini di jumpai pada kecamatan Tanimbar Selatan yang berkedudukan di dekat pusat pemerintahan dan pelayanan publik (ibu kota Kepulauan Tanimbar), apalagi enam kecamatan yang berada pada pulau pulau yang memiliki keterbatasan akses pada pusat pemerintahan kabupaten ini sangat mempengaruhi pelayanan publik.

Dalam kajian ini fokus utama reformasi birokrasi pada dimensi kelembagaan (institusional), yang diukur dengan desentralisasi kewenangan, struktur birokrasi, fungsi kewenangan serta teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis reformasi kelembagaan di Kecamatan Tanimbar Selatan KKT dan dikaitkan dengan pelayanan publik.

Kerangka Teoritis

Reformasi Birokrasi

Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis, sebab reformasi birokrasi merupakan salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku.

Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan. Reformasi birokrasi adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini agar kehidupan bernegara berjalan dengan baik, masyarakat juga berposisi sebagai penilai dan pihak yang dilayani pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk;

1. Memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien.

2. Terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara.
3. Pemerintah yang bersih (*Clean Government*).
4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
5. Bebas KKN

Reformasi birokrasi adalah modifikasi-modifikasi dan perbaikan-perbaikan institusional, organisasional dan prosedural dalam birokrasi pemerintah guna meningkatkan responsivitas terhadap warganegara dan bisnis serta memperbaiki efisiensi dan efektivitas (Fountain, 2007). Definisi ini sudah mencakup gagasan *working better* dan *cost less* dari Peters, (2001) serta *re-orderings* struktural dari Goldfinch, S.F., and Wallis, (2009) dan *reengineering* struktural dari Omoyefa, (2008).

Pelayanan Publik

Inti dari pelayanan publik adalah suatu kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu instansi atau perusahaan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik sangat penting karena menyangkut kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Apabila tidak diberikan maka tatanan suatu negara akan berdampak langsung maupun tidak langsung. Apabila pelayanan publik dalam suatu instansi pemerintah akan dilaksanakan maka dibutuhkan suatu sistem atau komponen yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal. Salah satu aspek yang paling berperan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat adalah aspek sumber daya manusia atau pegawai. Hal ini disebabkan karena pegawai merupakan aset negara yang menentukan baik tidaknya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Beberapa para ahli yang mengkaji mengenai pelayanan publik maka tentunya harus memiliki nilai-nilai yang mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani. Oleh karena itu para ahli seperti: Denhardt J. V. and R. B. Denhardt, (2003), Vigoda-Gadot, E. and Cohen, (2004) yang mengadopsi paradigma New Public Management dan terakhir New Public Service (NPS) yang memosisikan masyarakat adalah *valuel customer* atau lebih baiknya sebagai *owner*.

Pelayanan dirumuskan sebagai *a total organizational approach that's makes quality of service as perceived by the costomer, the number one driving force for the business* (Albreht, dalam Ibrahim, (2008). Dari rumusan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan merupakan penggerak utama suatu organisasi yang memiliki fungsi

yang penting dalam keberhasilan organisasi. Menurut Gronroos (dalam Ratminto & Atik Septi W, (2013) pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan dan pendekatan penelitian kualitatif dipandang tepat karena sesuai dengan karakteristik kualitatif dengan fenomena yang dikaji, untuk mengverifikasi persoalan reformasi telah dan dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun sesuai dengan karakter wilayah kepulauan.

Pengkajian ini fokus pada reformasi birokrasi yang lebih difokuskan lagi pada kelembagaan, atau institusi, yang lebih didalami melalui (a) desentralisasi kewenangan, (b) struktur birokrasi, (c) fungsi kewenangan, dan (d) penggunaan teknologi informasi serta komunikasi. Dalam kajian ini dilakukan pengamatan serta diwawancarai beberapa informan yang dapat dipercaya seperti Camat, Kadis, Kepala Desa/Kelurahan dan anggota DPRD, dalam memberi informasi dan data serta dokumen dokumen yang ada. Data dan informasi setelah dikumpul dan dianalisis interaktif oleh Miles, M.B., & Huberman, A.M., (1994), melalui beberapa tahapan analisis reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Reformasi Birokrasi mengidentifikasi bahwa reformasi birokrasi dilihat dari penguatan unit organisasi atau kelembagaan (institusional), reformasi kelembagaan belum ideal sehingga perlu dilakukan beberapa upaya antara lain meliputi; reformasi desentralisasi kewenangan, struktur birokrasi, dan fungsi kewenangan, dan informasi dan teknologi.

1. Desentralisasi Kewenangan

Penelitian diawali dengan sebelumnya menelaah preposisi tentang bagaimana desentralisasi kewenangan secara umum dirumuskan secara ideal untuk kemudian ditelusuri dalam praktiknya melalui upaya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menghilangkan masalah pokok birokrasi melalui reformasi.

Desentralisasi kewenangan hanya akan terjadi jika ada kemampuan untuk mengelola sumber daya secara mandiri oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik bentuk satuan teritorial maupun fungsional dalam pemerintah daerah sementara itu terdapat kondisi minimnya kekuatan pemerintah kecamatan untuk terlepas dari dominasi dinas-dinas terkait dalam melaksanakan kewenangannya.

Di Indonesia, konstitusi negara kita telah tegas mengatur tentang bagaimana desain desentralisasi kewenangan. Bahwa penyelenggaraan administrasi publik dalam konteks desentralisasi kewenangan, sebetulnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18A yang menyatakan;

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Menyimak dengan seksama amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka tidak ada alasan pembenaran untuk tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar tersebut, karena konsekuensi logisnya, jika pemerintah daerah tidak mentaati Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah maka sanksi hukum jelas akan diberlakukan kepada semua pejabat birokrasi di Indonesia yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Desentralisasi kewenangan yang didefinisikan sebagai sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Dalam hal desentralisasi kewenangan Bupati kepada kecamatan telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 pasal 11 yang menjelaskan bahwa Selain melaksanakan tugas pokoknya, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan lainnya. Oleh karena itu

diawal penelitian difokuskan untuk mencari beberapa kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah kabupaten.

Desentralisasi kewenangan atau pengaturan kewenangan melalui pelimpahan wewenang pemerintah daerah kepada pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa sudah ada, dan diatur dalam peraturan bupati tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Namun hal tersebut dirasakan masing kurang optimal karena pemerintah kabupaten belum ikhlas menyerahkan keseluruhan kewenangan yang ada pada kecamatan.

Pemerintah kabupaten mengklaim telah ada transfer kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kecamatan sehingga dalam menggali realitas yang terbentuk, penulis kemudian melakukan wawancara dengan pihak kecamatan antara lain;

- 1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- 2) Urusan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- 3) Urusan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 4) Urusan perijinan.
- 5) Urusan pertanahan

Urusan pembagian kewenangan hal yang menjadi urusan pokok kecamatan menurut undang-undang, kecamatan juga memiliki kewenangan dalam urusan pelayanan umum, pertanahan, perijinan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun kadangkala urusan-urusan ini berbenturan sama kepentingan dinas-dinas terkait. Contohnya saja masalah perizinan, kami harus terus berkoordinasi dengan dinas tata ruang dan catatan sipil, masalah pertanahan dengan kantor pertanahan pemerintahan desa juga degan dinas pemberdayaan desa, pada akhirnya kami hanya berurusan dengah surat-surat pengantar dan disposisi.

Desentralisasi kewenangan kecamatan berubah menjadi hal formal dikarenakan kondisi-kondisi tertentu. Serupa dengan kecamatan Tanimbar selatan, memang punya kewenangan tapi sebatas diatas kertas saja, kalau misalnya ada perencanaan yang dibuat sesuai dengan kewenangan, juga harus selalu dikoordinasikan dengan dinas-dinas terkait, saat musrembang misalnya, sudah ada beberapa perencanaan yang dibuat tapi kalau kepala dinas tidak mau maka program yang sudah ditetapkan tidak dapat direalisasikan.

Gambaran diatas telah terlihat upaya pemeritah daerah untuk mendistribusikan kewenangan yang ada, dalam praktiknya desentralisasi kewenangan ini masih terkendala dengan kurang responsifnya Pemerintah Daerah untuk menjawab usulan

atau perencanaan program dan kegiatan dari Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa. Hal menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten sampai ke tingkat Desa, namun realisasi perencanaan program dan kegiatan untuk pelayanan publik masih kurang mendapat respon dengan cepat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Selain urusan-urusan diatas, pemerintah kecamatan juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan penataan infrastruktur kecamatan sampai ketinggian kelurahan dan desa namun, hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa masih banyak sarana dan prasarana yang kurang tersedia terutama sarana listrik, gedung pemerintahan yang belum layak, misalnya beberapa desa seperti Desa Matakus dan Desa Lematang dan Kebyarat dimana kantor desa untuk pelayanan masyarakat tidak tersedia dengan baik atau tidak representatif karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat banyak dilayani di rumah Kepala Desa atau Sekretaris Desa, pelayanan kesehatan seperti polindes atau puskesmas pembantu dari 10 Desa di wilayah hanya ada beberapa desa seperti Saumlaki, Woworan, Olilit dan Sifnana sudah ada meskipun masih sangat sederhana.

Hasil review dokumen yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengenai usulan perencanaan program pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Wilayah Tanimbar Selatan sudah banyak menumpuk terutama khususnya pembangunan infrastruktur seperti, gedung sekolah, puskesmas, pengadaan kantor desa, polindes, pengadaan bidan desa dan lain-lain. Orientasi program sebagian besar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik. Namun, realisasi dari usulan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hanya sekitar 34% yang terealisasi tersebar di 10 Desa. Desa yang paling banyak mendapatkan prioritas pembangunan sarana dan prasarana adalah Kecamatan Tanimbar Selatan karena berada pada kota kabupaten sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan arus ekonomi serta perdagangan.

Untuk desentralisasi kewenangan ini, selain dalam bentuk perencanaan infrastruktur dan pemberdayaan, termasuk juga program yang bersumber dari Pemerintah Daerah seperti pemberdayaan perempuan dan ekonomi masyarakat. Namun, secara umum program desentralisasi kewenangan kurang optimal karena semua kebijakan pembangunan dan pemberdayaan serta peningkatan ekonomi kemasyarakatan termasuk melibatkan pihak swasta. Pemerintah Kecamatan dan Desa perlu melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat dalam pelimpahan wewenang untuk menyusun dan/atau

merencanakan program kebijakan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa aspek “desentralisasi kewenangan” yang ada dalam konteks reformasi birokrasi pada dimensi kelembagaan (institusional) sudah ada, namun kurang optimal diwujudkan karena responsivitas pemerintah daerah dan dukungan dana baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus (DAK) serta APBD relatif masih sangat terbatas, sementara pembiayaan untuk pembangunan dan pemberdayaan sentra-sentra ekonomi masih sangat kurang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan dalam konteks pelimpahan kewenangan tidak berjalan secara optimal mengingat, pelaksanaan reformasi birokrasi tidak berhasil menuntaskan masalah pokok yang ingin dikejar melalui reformasi yaitu gejala tarik menarik kepentingan antara dinas-dinas dengan kecamatan. Seluruh kondisi diatas mengantarkan penulis pada sebuah simpulan bahwa realitas yang terjadi pada desentralisasi kewenangan dalam upaya mereformasi aspek kelembagaan adalah desentralisasi kewenangan berbanding terbalik dengan kontrol politik terhadap birokrasi. Alokasi anggaran yang tidak berimbang serta prioritas daerah pemenang pilkada masih berpengaruh besar dalam keluwesan desentralisasi”

2. Struktur Birokrasi

Reformasi birokrasi pada tingkat pemerintahan daerah antara lain adalah penataan kembali struktur organisasi perangkat daerah yang diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakandan koordinasi, diwadahi dalam “sekretariat”, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk “Inspektorat”, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk “badan”, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam “lembaga teknis daerah”, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam bentuk “dinas”.

Pengesahan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian berlaku efektif dimulainya babak lanjutan pembenahan birokrasi pemerintah Indonesia. Tidak terasa fase pertama reformasi birokrasi yang diinisiasi melalui penerbitan Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 akan berakhir pada tahun 2014. Masih ada dua fase reformasi birokrasi didepan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2014 dan 2019, yaitu fase kedua (2015-2019) dan fase ketiga (2020-2024).

Dalam menggali tentang wajah reformasi birokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terhusus untuk penataan birokrasi tentu saja dilihat dari orientasinya dalam menghilangkan masalah pokok yang ada dalam struktur birokrasi dimana struktur menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien sehingga seharusnya ada relasi antara besar struktur, kapasitas aparat terhadap tujuan dan cara pencapaian tujuan organisasi, sementara itu struktur yang tidak ideal menjadi masalah klasik dalam birokrasi.

Struktur menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien sehingga seharusnya ada relasi antara besar struktur, kapasitas aparat terhadap tujuan dan cara pencapaian tujuan organisasi yang merupakan preposisi awal, memberikan gambaran bahwa struktur birokrasi dalam konteks reformasi birokrasi merupakan salah satu aspek penting selain aspek-aspek lainnya.

Saat ini struktur birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bhususnya ditingkat kecamatan dengan Unit Pelaksana teknis masih mengalami keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan hal ini disebabkan karena masih terbatasnya SDM yang cakap dalam melakukan kefgiatan kegiatan pelayanan pada masyarakat, hal ini mengindikasikan bahwa perlu regrutmen ASN sebab rata rata pada UPT mengalami keterbatasan dengan hal dimaksud, dan masih didominasi oleh tenaga tenaga honor, yang jelas sangat minim dalam melaksanakan kegiatan kegiatan p[elayanan kepada masyarakat.

Struktur birokrasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar khususnya di Kecamatan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Akan tetapi dalam melihat efeknya terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan kewenangan penulis beranggapan belum sepenuhnya sejalan dengan orientasi dari reformasi birokrasi mengingat hasil obsevasi yang dilaksanakan ternyata masih banyak keluhan dari masyarakat terutama dalam pelayanan public, pelayanan sertifikat tanah, pembuatan surat akte kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk serta ijin ijin usaha lainnya yang mestinya dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan yang masih dirasakan sangat rumit serta banyaknya unit-unti yang terlibat, kesan masih tumpang tindihnya kewenangan antar unit pelayanan bahkan antar instansi masih mewarnai pelaksanaan fungsi-fungsi kecamatan, tidak jarang, beberapa dokumen yang seharusnya bisa dieksekusi langsung dikecamatan malah harus dikirim terlebih dahulu ke ibukota kabupaten tempat lokasi instansi sektoral yang bertanggung jawab untuk beberapa formalitas yang sebenarnya bisa dilakukan pemangkasan.

Artinya, reformasi struktur birokrasi di daerah ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan tingginya opini negatif dari masyarakat mengenai birokrasi yang berbelit-belit.

Hasil ada perbedaan kecamatan yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten dengan di Kecamatan kepulauan artinya yang berada pada pulau pulau yang jaraknya cukup jauh Kalau dengan transportasi KM. Feri yang biasanya melakukan perjalanan antara pulau kadan 8 – 24 jam perjalanan, meskipun dengan kadar restrukturisasi birokrasi yang seragam akan tetapi pelayanan publik belum juga mendapatkan kepuasan dari masyarakat apalagi kecamatan kecamatan yang berada pada pulau pulau, seperti mengurus izin membuka usaha atau surat akte kelahiran dan sengketa lahan masih terkesan lambat dan bisa mencapai 1 minggu. Padahal dari hasil observasi yang dilakukan untuk menyelesaikan urusan persuratan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari. Ada beberapa masalah yang teridentifikasi berkaitan dengan struktur birokrasi yakni;

- 1) Tenaga terampil masih kurang,
- 2) Sarana pendukung seperti listrik dan komputer dan printer masih terbatas,
- 3) Spesialisasi tugas kurang sehingga terjadi tumpang tindih pekerjaan,
- 4) Tidak ada standar operasional prosedur dalam pelayanan publik, dan
- 5) Motivasi pelayanan public aparaturnya kecamatan kurang optimal.
- 6) Masih ketidak relaan sebagian tugas yang seharusnya tidak perlu dilakukan ditingkat kabupaten apalagi daerah pulau

Pada dasarnya penghambat dalam pelayanan terutama karena keterbatasan tenaga atau staf yang pada umumnya masih status honor sehingga kesulitan dalam disiplin kantor apalagi honor yang diberikan per bulan sangat kecil dibawah UMR Propinsi perbulan 2.200.000, kecamatan Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, selain itu belum adanya standar operasional prosedur dalam penyelesaian tugas.

Sedangkan terkait struktur organisasi, sudah melakukan beberapa upaya untuk merestrukturisasi semua Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017. Tentang. Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Namun, memang diakui sebetulnya masih dapat dirampingkan struktur organisasi saat ini agar supaya pekerjaan lebih terfokus dan efisien. Masalah lain juga adalah kesiapan aparaturnya di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa masih perlu ditingkatkan kompetensinya termasuk pengadaan pegawai.

Kendala lain juga karena motivasi pelayanan publik pegawai masih rendah, ini yang masih perlu diperbaiki ke depan dalam upaya memperbaiki kinerja birokrasi pemerintah.

Reformasi birokrasi dari aspek struktur birokrasi masih perlu pembenahan terutama dari kemampuan dan kapasitas pegawai, pengadaan pegawai negeri sipil, pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, dan pemberdayaan pegawai melalui peningkatan motivasi pelayanan publik. Selain itu, penting dan mendesak agar dalam mendesain struktur organisasi perlu diisi oleh tenaga-tenaga terampil dan profesional yang mampu memanfaatkan peluang dan kekuatan daerah yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk masalah yang terakhir ini, penulis menemukan struktur birokrasi diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami tujuan dari reformasi birokrasi sehingga kesalahan dalam menyikapi tugas-tugas birokrasi, dan terkesan ada pembiaran yang terjadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bawa kompleksitas dalam pengelolaan urusan birokrasi tidak ditopang oleh keahlian manajemen organisasi, akibatnya pelaksanaan beban kerja menjadi berlipat dan berpengaruh pada skala prioritas kerja dan pencapaian kinerja

3. Kewenangan

Mengenai fungsi kewenangan, idealnya setiap satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian serta keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan maksimal serta memiliki kemandirian dalam pelaksanaannya hanya saja masalah yang muncul dalam organisasi adalah masih banyaknya ketidak jelasan fungsi dan tumpang tindih kewenangan oleh karena itu dalam melihat realitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Sudah menjadi hakikatnya birokrasi lahir berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama yang bersifat impersonal. Birokrasi adalah sarana untuk melayani masyarakat dan bukan untuk dilayani. Tidak bisa dipungkiri bahwa fungsi kewenangan birokrasi saat ini masih menjadi kajian para ahli mengingat lambatnya implementasi tugas dan fungsi kewenangan birokrasi. Gie, K.K., (2003) menyatakan bahwa ada kecenderungan yang terjadi saat ini adalah bahwa dalam penyusunan suatu organisasi cenderung lebih ditekankan pada bagan strukturnya saja, dan melupakan jumlah dan kualifikasi personel, sistem pengambilan keputusan, sistem komunikasi serta rentang kendali organisasi (*span of control*). Struktur organisasi birokrasi yang demikian akan menyempitkan strategi yang dapat dipilih atau digunakan.

Pendekatan ini lebih dikenal dengan *strategy follows structure*. Berbagai permasalahan dibidang kelembagaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) hal yang

meliputi: (a) masalah kondisi struktur birokrasi yang tumpang tindih; (b) ketidakjelasan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah dengan yang harus menjadi bagian dari tugas masyarakat; dan (c) belum adanya proses politik yang transparan dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Demikian pula dibidang manajemen birokrasi publik masih dihadapkan pada permasalahan antara lain: (a) rencana kerja dan penugasan yang tidak jelas; (b) sistem rekrutmen tidak sesuai dengan prosedur dan kebutuhan; (c) masih rendahnya penegakkan sistem ganjaran dan hukuman; dan (d) tidak adanya ekspose kinerja birokrasi pemerintah secara transparan sehingga tidak ada umpan balik untuk perbaikan kinerja (Gie, K.K., 2003).

Berkaitan dengan aspek fungsi kewenangan dalam konteks reformasi birokrasi sangat penting dilakukan mengingat fungsi kewenangan yang tidak jelas akan menyebabkan kekaburan dalam penyelenggaraan tugas. Fungsi kewenangan bersifat internal karena menyangkut distribusi tugas pokok dan fungsi pada organisasi kecamatan itu sendiri. Fenomena tentang fungsi kewenangan perlu direformasi karena banyaknya pegawai yang dalam satu organisasi merasa kecewa karena tugas yang diberikan seringkali bertentangan dengan tupoksi bidang tertentu. Jadi, fungsi kewenangan sering kali diselewengkan oleh pejabat yang lebih tinggi dalam mengatur para bawahanya.

Fungsi kewenangan ini hendaknya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi bidang atau seksi. Karena ini menyangkut kinerja setiap bidang atau seksi. Banyak staf yang tidak senang bekerja karena sering tugas pokok dan fungsinya yang harus melaksanakan pekerjaan, tetapi serahkan kepada bidang atau seksi lain. Ini masih yang terjadi sampai saat ini sehingga perlu memang untuk dilakukan reformasi". Fungsi kewenangan yang ada saat ini belum berjalan dengan baik khususnya dalam pelayanan publik. Kondisi nyata yang dialami pegawai di Kantor kecamatan sesuai hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa masih ada pembagian tugas dan kewenangan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh aparatur yang ada. Dampak negatifnya adalah banyak urusan publik menjadi terhambat atau bahkan sampai terbengkalai karena saling lempar tugas dan tanggung jawab hal ini terjadi karena sering menganggap bahwa tugas yang diberikan tidak sesuai dengan tupoksinya.

Fenomena overlapping fungsi kewenangan juga terjadi pada skop yang lebih luas pada level pemerintah daerah sampai kecamatan, dimana fungsi kewenangan ini sering tidak disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi aparatur melainkan lebih dominan

dilakukan berdasarkan faktor suka dan tidak suka. Jadi, kalau pejabat yang dianggap baik atau disenangi oleh pejabat yang lebih tinggi maka mereka yang melakukan tugas itu. Meskipun jika dilihat dari pembagian tugas pokok dan fungsi tidak sesuai. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menyangkut fungsi kewenangan masih mendesak untuk dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien di kecamatan.

Hasil penelitian diatas maka penulis memberikan 3 temuan yang signifikan untuk dilakukan yaitu penyelesaian tugas terkendala karena distribusi tugas yang tidak merata dan tidak tepat sasaran; kedua, beban kerja berlebih sehingga menurunkan kinerja; dan ketiga, faktor *like* dan *dislike* masih mempengaruhi pelaksanaan kewenangan dan berlangsung dua arah. Dengan demikian tingkat diferensiasi atau pembagian kerja yang ada dalam organisasi baik secara hirarki maupun unit-unit organisasi yang tersebar berbanding terbalik dengan kapasitas birokrasi yang mengisi jabatan sehingga kerap kali terjadi tumpang tindih kewenangan atau melemahnya kinerja”

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bentuk reformasi birokrasi dari aspek teknologi informasi dan komunikasi adalah terwujudnya sistem *electronic government (e-government)* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Asal muasal teorinya bersumber dari *Teori stakeholder (stakeholders theory)* ditemukan oleh Freeman, R.E., (1984) yang menyatakan bahwa; *the traditional definition of a stakeholder is "any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives"* (Freeman, R.E., 1984, 1999, 2004). Teori ini kemudian dikembangkan oleh Zimmermann, P., & Finger, (2005) bahwa organisasi memerlukan dukungan dari teknologi dan pihak lain dalam perusahaan swasta yang kemudian diaplikasikan dalam organisasi sektor public sebagai keputusan manajerial dari *e-Government*.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dari aspek teknologi informasi dan komunikasi terus kami kembangkan, namun sampai saat ini masih terkendala dengan dukungan sarana dan prasarana terutama listrik dan internet. Reformasi dalam bidang ini sangat penting untuk pelayanan publik yang efisien dan efektif”. Dalam rangka pelayanan publik yang baik dan efektif tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana melalui teknologi informasi dan komunikasi, hanya memang untuk pengembangannya khususnya disetiap desa, kelurahan, dan kecamatan belumm erata. Salah satu faktornya adalah keterbatasan anggaran untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.

Pada prinsipnya Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan model pelayanan publik yang berbasis teknologi, komunikasi dan informasi. Hal ini penting dilakukan

karena akan mendukung kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama informasi yang diperlukan. Usulan melalui musrenbangkecamatan sudah ada, namun untuk mewujudkan program ini tentu didasarkan pada kemampuan anggaran daerah.

Reformasibirokrasi pada aspek teknologi informasi di Kecamatan Tanimbar Selatan belum ada optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnyaanggaran pemerintah daerah dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, tenaga terampil dan berpengalaman, serta keterbatasan anggaran, di Kantor Camat Tanimbar Selatan pelayanan publik yang berbasis teknologi atau inovasi pelayanan publik masih sangat kurang. Pada umumnya masyarakat masih dilayani dengan cara manual dan mereka datang ke kantor Camat Tanimbar Selatan untuk mengurus berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan.

Beberapa desa seperti Desa Lermatang, Latdalam, dan Matakus pada umumnya mendapat informasi kegiatan di kecamatan melalui pengumuman yang disampaikan secara lisan atau melalui handphone (hp) meskipun sangat terbatas karena belum dibangun sarana komunikasi seperti telkomsel atau kantor telkom yang dapat menjadi sumber informasi yang akurat. Berdasarkan hasil review di kantor Camat Tanimbar Selatan ternyata belum ada website atau blog Pemerintah Kecamatan Tanimbar Selatan, berkas-berkas atau dokumen masih bersifat manual, dan ada juga masyarakat yang harus membuat usulan berkas berkali-kali karena berkasnya hilang. Artinya, dukungan informasi yang berbasis teknologi masih sangat kurang, dan tentu saja ini berdampak negatif terhadap rendahnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika masyarakat merasa kurang puas atau tidak percaya dengan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur Pemerintah Kecamatan Tanimbar Selatan KKT.

Kondisi yang ada bertolak belakang dengan teori tentang pentingnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini tentu merupakan tanggung jawab pemerintah kecamatan dan pemerintah KKT sebagai pemegang kekuasaan pemerintah daerah dan penentu kebijakan. Karena bagaimana pun, tanggungjawab manajemen dimulai dengan mengatur pekerjaan tidak hanya secara formal tetapi juga jaringan organisasinya (Scholl, B.J., Pylyshyn, Z.W., & Feldman, 2001).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dimensi reformasi kelembagaan kecamatan Tanimbar Selatan sudah berjalan, namun kurang efektif dilihat dari

desentralisasi kewenangan, struktur birokrasi, fungsi kewenangan, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Penutup

Kesimpulan

Reformasi kelembagaan di Kecamatan Tanimbar Selatan KKT kurang efektif dilakukan disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya pemerintah kecamatan dalam melakukan reformasi birokrasi; desentralisasi kewenangan kurang berjalan dengan efektif karena desentralisasi kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari aspek struktur organisasi sudah menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mengedepankan aspek kepentingan dan kebutuhan serta ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah. Sarana pendukung masih sangat kurang terutama dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang masih menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Saran

Desentralisasi kewenangan Pemerintah Kecamatan terbatas pada fungsi perencanaan program, namun terbatas pada pengambilan keputusan yang bersifat strategis seperti penetapan anggaran. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan perlu melibatkan pemerintah kecamatan dalam rangka penyusunan, penetapan, implementasi, dan pengendalian anggaran. Paling tidak ada kunci utama yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah KKT dan Pemerintah Kecamatan Tanimbar Selatan yaitu; diperlukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik berdasarkan dimensi kelembagaan dengan memberikan kewenangan yang lebih pada kecamatan termasuk didalamnya Unit Unit Pelaksana teknis sehingga mampu dengan tepat dan cepat melaksanakan upaya pelayanan publik kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dahyar Daraba H. (2019). *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*. Penerbit Eisyah.
- Denhardt J. V. and R. B. Denhardt. (2003). *The New Public Service; Serving, not Steering*. New York: M.E. Shape.
- Economic Commission for Africa. (2003). *Public Sector Management Reforms in Africa: Lessons Learned. Development Policy Management Division (DPMD)*. Retrieved

from ECA/DPMD/PSM/TP/03/1

- Farazmand, A. (2007). *Bureaucracy and Administration*. New York: CRC Press.
- Fatile, Jacob O. and Adejuwon, K. D. (2010). Journal of Sustainable Development in Africa. *Sustainable Development*, 12(8), 90–99.
- Fountain, J. E. (2007). *Bureaucratic Reform and E-Government in the United States: An Institutional Perspective. A Pre-Publication Version of a Chapter to be Printed Andrew Chadwick and Philip N. Howard (Eds). The Handbook of Internet Politics*. New York: Routledge.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman, MA.
- Freeman, R. . (1999). Response: Divergent Stakeholder Theory. *Academy of Management Review*, 24(2). Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/259078?seq=1>
- Freeman, R. E. (2004). "A Stakeholder Theory of Modern Corporations," *In Ethical Theory and Business*. Prentice Hall.
- Gie, K.K. (2003). *Reformas iBirokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan*. Jakarta.
- Goldfinch, S.F., and Wallis, J. . (2009). *International Handbook of Public Management Reform*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Kaufman, H. (2011). Major Players: Bureaucracies in American Government. *Public Administration Review*, 61(1), 18–42. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/977534?seq=1>
- Kiragu, K. and Mukandala, R. (2003). *Service Pay Reform, Tactics Sequencing And Politics In Developing Countries: Lessons From Sub-Saharan Africa*. Retrieved from www1.worldbank.org/.../PayReformStud...
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. New York: Sage Publicatio Inc.
- Omoyefa, P. S. (2008). Public sector reforms in Africa: A philosophical re-thinking. *Africa Development*, 33(4), 15–30. <https://doi.org/10.4314/ad.v33i4.57332>
- Peters, B. G. (2001). *The Politics of Bureaucracy*. London: Routledge.
- Priyono, T. (2014). Reformasi Sistem Birokrasi di Era Jokowi. *Detik News. Com*.

- Ratminto & Atik Septi W. (2013). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridley, F. F. (1982). *Administrative Theory and Administrative Reform*. "In *Strategies for Administrative Reform*. Toronto: Lexington Books.
- Scholl, B.J., Pylyshyn, Z.W., & Feldman, J. (2001). What is a Visual Object? Evidence from Target Merging in Multiple Object Tracking. *Cognition, Elsevier*.
- Syquia, J. L. C. (2007). *Reforming Public Procurement in Emerging Market Countries*. Produced for Review by the United States Agency for International Development.
- Victorio Fernando Nahuway & Eduard Yohannis Tamaela. (2020). Model Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement serta Dampaknya Terhadap Kepuasan Pengguna di Provinsi Maluku. *JURNAL MANEKSI*, 9(1), 275–282. Retrieved from <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/327/351>
- Vigoda-Gadot, E. and Cohen, A. (2004). *Citizenship and Management in Public Administration: Integrating Behavioral Theories and Managerial Thinking*. Cheltenham, etc: Edward Elgar.
- Zimmermann, P., & Finger, M. (2005). . Information- and Communication Technology (ICT) and Local Power Relationships: An Impact Assessment. *The Electronic Journal of E-Government*, 3(4), 231–240.

Gilbert Alvin Rumalatu¹
Anthoneta Telsy Waelauruw²
(Penulis Korespondensi)

^{1,2}Jurusan Adm. Niaga Politeknik Negeri Ambon
telsysaiya@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study aims to test and analyze impact of incentive, decentralization effect and intern government control system to employee performance in Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah. Population from the research is from all employees In Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah. It takes 46 respondent from the government employees and salaries employees. Data collection is done with a direct survey with census method as a sample gathering method. Hypothesis testing empirically using a Multiple Liniear Regression.

The research result shows that incentive is proven positive and significant effect employee performance. This mean if the incentive is raise or getting better have a good effect to employee performances. Decentralization is proven positive and significant to employee performance and this mean that authority delegation and the responsible are not did not go well on employee performance. Further intern control is proven positive and significant effect to employee performance. Which it's mean if the government control system runs well then it will effect indirectly to employee performance goes better.

Keywords : Incentive, Decentralization, Government Internal Control System, Performance

Pendahuluan

Kinerja pegawai, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini sedang menjadi sorotan publik, dikarenakan kinerja pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu penyebabnya adalah karena panjangnya sistem birokrasi dalam organisasi kepegawaian negeri, hal ini merupakan dampak sistem pemerintahan sentralistik dari zaman orde lama sehingga olehnya diperlukan solusi melalui adanya reformasi dalam penyelenggaraan negara termasuk pemerintahannya (Eduard Yohannis Tamaela, et.al., 2020) yang dapat dilakukan melalui sistem desentralisasi. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2014, (2014), desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pendapat lain oleh Luthans, (2002) dalam konteks yang lebih sempit mengatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas mengakibatkan manajer yang berada dibawahnya akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan disamping akan terjadi pemberdayaan sumber daya manusia (bawahannya), sehingga akan meningkatkan motivasi manajer dalam melaksanakan kegiatannya yang pada akhirnya secara signifikan akan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerjanya.

Salah satu faktor utama yang berpotensi mempengaruhi kinerja pegawai adalah rendahnya tingkat kesejahteraan PNS sehingga melahirkan sistem remunerasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan PNS dan menghindari adanya praktek-praktek kerja yang tidak terpuji oleh aparat pemerintah (Nahuway & Tamaela, 2020). Dalam mekanisme kerja suatu organisasi, khususnya pada organisasi yang banyak melibatkan tenaga manusia, maka prinsip yang perlu dikembangkan adalah *take and give*, yang artinya bahwa organisasi tersebut disamping bersedia memenuhi kebutuhan para pegawai juga menuntut adanya seorang pemimpin yang dapat memperlakukan bawahan dengan baik (Rusilawati, 2014) yang dengan demikian para pegawai akan dengan sukarela untuk mengorbankan dirinya demi kepentingan organisasi.

Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Rusilawati, (2014) yang menyatakan bahwa insentif merupakan salah satu determinan kinerja pegawai dalam bentuk uang sebagai penghargaan terhadap kinerja yang berkontribusi kepada organisasi (Mangkuprawira, S., 2007). Artinya bahwa semakin besar perhatian perusahaan

terhadap kebutuhan karyawannya maka perusahaan tersebut akan mendapat timbal balik (*take and give*) yang sesuai, yaitu maksimalisasi dalam kinerja.

Aspek lain yang juga berpotensi mempengaruhi kinerja PNS adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Hal ini pernah disampaikan oleh Sarita Permata Dewi, (2012) yang mengadopsi teori Dale Timple bahwa salah satu factor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah factor eksternal diantaranya adalah lingkungan, kebijakan dan pengawasan yang merupakan bentuk dari pengendalian internal dan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Anthony & Govindarajan, (2005) dalam Agripa Fernando Tarigan, (2011) yang menyatakan bahwa suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem pengendalian internal yang baik berpengaruh pada cara manapun tujuannya; artinya tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan membantu dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Anthony & Govindarajan, 2002 dalam Tarigan, 2011).

Determinan kinerja pegawai diatas telah banyak diteliti dan menunjukkan hasil penelitian yang beragam dan menunjukkan bahwa ada ambivalensi hasil-hasil penelitian terdahulu. Hal ini terlihat pada hasil kajian oleh Tarigan, (2011); Indudewi & Nafasati, (2012) yang menyatakan bahwa insentif dan desentralisasi tidak berhubungan dan juga tidak mempengaruhi kinerja pegawai. Hasil ini juga diakui oleh Supriyanto, (2014) bahwa insentif yang dalam kajiannya diwakili oleh sistim remunerasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil kajian terdahulu diatas ternyata tertentangan dengan hasil kajian oleh Karyanti, (2010) dan Jusuf, (2013) menyatakan bahwa insentif maupun penghargaan lainnya berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja serta hasil kajian oleh Mazura, (2011) mengatakan bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS.

Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya ambivalensi kontradiksi hasil penelitian tersebut sebenarnya adalah *research gap* (kesenjangan penelitian) yang oleh Ferdinand, (2006) disebutkan bahwa *research gap* tersebut dapat atau seharusnya dikembangkan sebagai masalah penelitian. Berdasarkan pertimbangan inilah maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam dengan tujuan untuk menganalisis dampak insentif, desentralisasi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pegawai.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Insentif

Sarwoto, (1997) mengatakan bahwa insentif sebagai sarana motivasi dapat diberi batasan perangsang atau pendorong yang diberikan dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi. Pengertian lain oleh Dessler, (2003) mengemukakan pendapatnya mengenai insentif finansial adalah ganjaran finansial yang diberikan kepada karyawan yang tingkat produksinya melampaui standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Didalam penerapan suatu sistem insentif dalam organisasi yang menginginkan pamrih dari pekerjaannya, tidak semua bentuk insentif yang diberikan kepada pegawai dapat memberi pengaruh langsung terhadap semangat kerja pegawai.

Desentralisasi

Otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. Pelimpahan wewenang tentunya disertai dengan pelimpahan tanggung jawab sehingga tiap-tiap satuan kerja wajib mempertanggungjawabkan anggaran dan pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Dengan adanya desentralisasi, tiap-tiap satuan kerja dapat meningkatkan kinerjanya karena mereka mengetahui kondisi masyarakat dan dapat menetapkan program-program yang tepat sasaran (Chenhall; Mukhi et al., Davis dan Newstrom dalam Miah, (1996). Gordon dan Miller (1976) dalam Karyanti, (2010) berpendapat bahwa desentralisasi pengambilan keputusan diantara manajer bertujuan meningkatkan kinerja mereka dengan mendorong mereka untuk mengembangkan kemampuan khas mereka untuk menangani kondisi-kondisi local yang tidak menentu. Mukhi et al., dalam Miah, (1996) menyatakan bahwa desentralisasi memungkinkan para manajer secara efektif menangani peristiwa-peristiwa, bertindak tanpa menunggu dan meningkatkan kualitas keputusan yang mendorong ke kinerja yang lebih baik. Selain pelimpahan wewenang, desentralisasi dapat pula berupa kemandirian dalam mengelola sumber daya di daerah.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern: (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan asset, (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Kinerja

Kinerja merupakan adalah catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada sebuah fungsi kerja atau kegiatan tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu Bernardin, H. J., & Russel A. E. J., (1988). Pendapat lain oleh Motowidlo dan Van Scotter, (1994) dalam Tarigan, (2011) kinerja kerja mengacu pada hasil- hasil yang diperoleh dari tugas-tugas yang substantif yang membedakan pekerjaan seseorang dengan pekerjaan yang lainnya serta meliputi aspek-aspek yang lebih teknis mengenai kinerja. Berdasarkan uraian-uraian diatas, secara umum disimpulkan bahwa kinerja kerja adalah kegiatan yang menghasilkan suatu akibat, pelaksanaan suatu tindakan atau serangkaian tindakan penyelesaian suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Kajian-kajian empiris yang mendasari model konseptual penelitian (insentif, desentralisasi, sistim pengendalian internal dan kinerja) akan dipaparkan dibawah ini. Kajian menyangkut insentif oleh Mazura, (2011) mengatakan bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis. Penelitian lainnya oleh Jusuf, (2013) menyatakan bahwa Secara parsial, TQM dan *reward* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial, sedangkan sistem pengukuran kinerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial dan secara simultan, TQM, sistem pengukuran kinerja dan *reward* berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada PT. Cahaya Murni Raya Industri.

Hasil kajian lain oleh Tarigan, (2011) menunjukkan bahwa; tujuan yang jelas dan terukur, insentif, motivasi kerja, remunerasi, desentralisasi tidak berhubungan dengan kinerja pegawai. Hasil diatas didukung oleh Indudewi & Nafasati, (2012) yang menyatakan bahwa insentif dan desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja Fakultas di Universitas Semarang yang berpengaruh adalah ukuran kinerja dan kejelasan sasaran. Sejalan dengan hasil kedua penelitian diatas, Indudewi pada tahun 2011 juga menunjukkan bahwa sasaran yang jelas dan terukur, insentif dan pengukuran kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD dan BUMD di Kota Semarang.

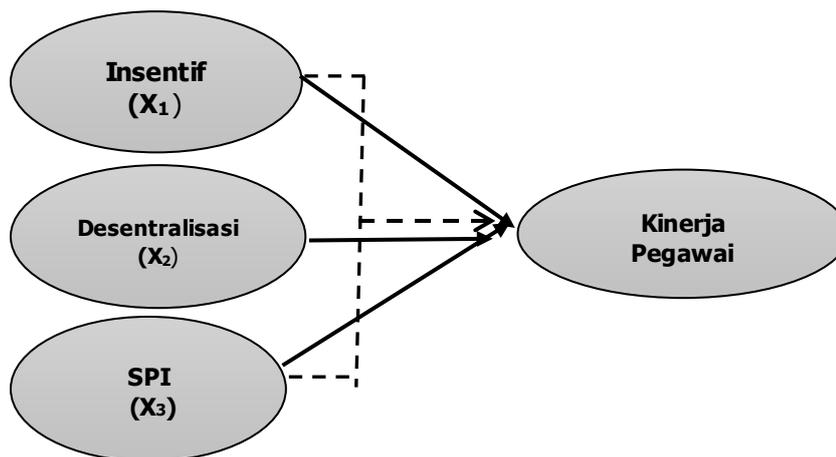
Ia menambahkan bahwa desentralisasi memiliki hubungan positif tapi tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD dan BUMD di Kota Semarang. Kajian lainnya oleh Supriyanto, (2014) juga mendukung hasil diatas bahwa penetapan sasaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai namun tidak pada insentif yang dalam kajiannya diwakili oleh variabel sistim remunerasi yang ternyata secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Hasil kajian empiris selanjutnya menyangkut sistim pengendalian internal disampaikan oleh Linda Oktarnia, (2013) yang mengungkapkan bahwa lingkungan pengendalian, penaksiran resiko dan pemantauan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan keuangan Rumah Sakit Tanjungpinang dan Bintan, yang berpengaruh hanyalah aktifitas pengendalian internal. Selanjutnya hasil kajian juga menemukan lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Hasil kajian lain oleh Sarita Permata Dewi, (2012) menunjukkan bahwa; faktor internal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat seseorang meliputi sikap, sifat kepribadian, sifat fisik, motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kinerja, latar belakang budaya dan variabel personal lainnya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal dari lingkungan meliputi kebijakan organisasi, kepemimpinan, tindakan-tindakan rekan kerja, pengawasan, system upah, dan lingkungan.

Konsep dan hasil kajian-kajian empiris diatas selanjutnya melahirkan kerangka konseptual kajian ini seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.

Kerangka Konseptual



Berdasarkan pemaparan konsep, hasil penelitian terdahulu serta kerangka konseptual diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan untuk diuji selanjutnya antara lain;

Hipotesis 1 ; Insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Hipotesis 2 ; Desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Hipotesis 3 ; Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Hipotesis 4 ; Insentif, desentralisasi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (*eksplanatory*) dengan tujuan untuk menjelaskan dampak pengaruh insentif, desentralisasi dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pegawai. Model penelitian yang digunakan adalah survei dengan bantuan *instrument* kuesioner untuk pengumpulan data penelitian. Populasi dalam kajian ini adalah seluruh pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah dan penarikan sampelnya menggunakan teknik sensus sehingga seluruh pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah dijadikan sebagai sampel penelitian yakni sebanyak 48 pegawai. Kuesioner penelitian dibagiakan untuk seluruh sampel penelitian dan yang kembali hanyalah 46 kuesioner sehingga sampel akhir adalah sebanyak 46 pegawai. Alat analisis yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut;

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan;

Y = Kinerja pegawai

α = *Intercept*

β = Koefisien regresi

X_1 = Insentif

X_2 = Desentralisasi

X_3 = Sistem pengendalian internal

ε = *Residual*

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tingkat signifikansinya sebesar 5% dengan kriteria pengujiannya adalah; jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji Kualitas Instrumen Penelitian

Pengujian validitas dalam kajian ini menggunakan korelasi *Product Moment Person*, dimana valid atau tidaknya instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi *Product Moment Person* dengan signifikan 5% (Ferdinand, 2006). Pengujian selanjutnya adalah Pengujian reliabilitas kajian ini menggunakan *alpha cronbachs* dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien keandalan lebih besar atau sama dengan 0.6 artinya apabila $\alpha = 0.6$ maka instrumen dapat dikatakan reliabel (Ferdinand, 2006).

Uji Validitas & Reliabilitas

Variabel	Indikator	Uji Validitas				Uji Reliabilitas	
		Item	R	sig	Ket	Koefisien Alpha	Ket
Insentif (X ₁)	Penilaian disiplin	X _{1.1}	0.600	0.000	Valid	0.600	Reliabel
		X _{1.2}	0.629	0.000	Valid		
		X _{1.4}	0.548	0.000	Valid		
	Penilaian hasil kinerja	X _{1.5}	0.744	0.000	Valid		
		X _{1.6}	0.579	0.000	Valid		
Desentralisasi (X ₂)	Keuangan	X _{2.1}	0.666	0.000	Valid	0.629	Reliabel
	Operasional	X _{2.2}	0.761	0.000	Valid		
	Mutu pegawai	X _{2.3}	0.763	0.000	Valid		
	Alokasi rekening	X _{2.4}	0.742	0.000	Valid		
	Perputaran pegawai	X _{2.5}	0.586	0.000	Valid		
Sistim Pengendalian Intern (X ₃)	Lingkungan pengendalian	X _{3.1}	0.851	0.000	Valid	0.548	Reliabel
		X _{3.2}	0.860	0.000	Valid		
		X _{3.3}	0.757	0.000	Valid		
	Penilaian resiko	X _{3.4}	0.714	0.000	Valid		
		X _{3.5}	0.578	0.000	Valid		
		X _{3.6}	0.602	0.000	Valid		
Kinerja (Y)	Keahlian teknikal inti	Y _{1.1}	0.568	0.000	Valid	0.744	Reliabel
		Y _{1.2}	0.440	0.000	Valid		
		Y _{1.3}	0.631	0.000	Valid		
		Y _{1.4}	0.721	0.000	Valid		
	Dedikasi kerja	Y _{1.5}	0.661	0.000	Valid		
		Y _{1.6}	0.697	0.000	Valid		
		Y _{1.7}	0.691	0.000	Valid		
		Y _{1.8}	0.634	0.000	Valid		
	Fasilitas interpersonal	Y _{1.9}	0.642	0.000	Valid		
		Y _{1.10}	0.746	0.000	Valid		
		Y _{1.11}	0.571	0.000	Valid		
		Y _{1.12}	0.672	0.000	Valid		

Hasil dari pengujian validitas diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel penelitian ini dapat dikatakan valid karena tingkat signifikannya lebih kecil dari 0.05. Selanjutnya hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel terteliti dalam kajian ini ternyata memiliki koefisien korelasi diatas 0.60 sehingga seluruh data penelitian ini dapat dikatakan reliabel yang artinya data ini layak untuk dilanjutkan pada pengolahan data pada tahapan selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian normal tidaknya dostribusi data penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebaran data pada *normal probability plt*. Berdasarkan *normal probability plot* diatas, maka data penelitian ini dapat dikatakan telah memenuhi kaidah normalitas karena terlihat bahwa data menyebar mengikuti garis diagonal, penyebarannya secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian

ini dilakukan dengan melihat gambar *charts scatterplot*. Hasil uji menunjukkan bahwa data penelitian bebas heterokedastisitas karena titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Pengujian multikolinieritas kajian ini menggunakan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) atau faktor pertambahan ragam. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF berada dibawah 10 yang berarti tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh insentif, desentralisasi dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pegawai. Berikut ini hasil analisis yang terlihat dibawah ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficients	t hitung	Sig	Keterangan
Constant	2.074			
Insentif	1.530	5.697	0.000	signifikan
Desentralisasi	0.459	1.952	0.580	tidak signifikan
SPI	0.596	2.292	0.023	signifikan
<i>Adjusted R Square</i>	0.745			
F	44.868		0.000	signifikan
F tabel	2.84			
t tabel	2.012			

Data diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 2.074 mengartikan mengartikan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari insentif, desentralisasi dan sistim pengendalian intern (SPI) maka besarnya adalah nilai variabel kinerja adalah sebesar 2.074. Koefisien insentif sebesar 1.530 menunjukkan bahwa setiap nilai insentif meningkat atau semakin baik maka nilai kinerja akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi insentif atau dengan kata lain setiap peningkatan kinerja dibutuhkan nilai insentif sebesar 1.530 dengan asumsi besarnya nilai desentralisasi dan SPI adalah tetap.

Koefisien regresi desentralisasi sebesar 0.459 menunjukkan bahwa setiap nilai desentralisasi meningkat atau semakin baik maka nilai kinerja akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi desentralisasi atau dengan kata lain setiap peningkatan kinerja dibutuhkan nilai desentralisasi sebesar 0.459 dengan asumsi besarnya nilai insentif dan SPI adalah tetap atau konstant. Koefisien regresi terakhir yakni SPI sebesar 0.596

menunjukkan bahwa setiap nilai SPI meningkat atau semakin baik maka nilai kinerja akan meningkat sebesar nilai koefisien regresi SPI atau dengan kata lain setiap peningkatan kinerja dibutuhkan nilai SPI sebesar 0.596 dengan asumsi besarnya nilai insentif dan desentralisasi adalah tidak berubah.

Data diatas juga menunjukkan bahwa model konseptual penelitian yang dibangun adalah layak karena terbukti bahwa kinerja pegawai mampu dijelaskan dengan baik oleh insentif, desentralisasi dan SPI dengan nilai determinasi atau tingkat kelayakan sebesar 0.745 atau sebesar 74.5% sementara 25.5% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Hasil pengujian hipotesis pertama mengungkapkan bahwa insentif memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5.697 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2.012 ($5.697 > 2.012$) yang berarti bahwa terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis pertama diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah. Hasil pengujian hipotesis kedua mengungkapkan bahwa desentralisasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1.952 yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2.012 ($1.952 < 2.012$) yang berarti bahwa tolak H_a dan terima H_0 atau hipotesis kedua ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengungkapkan bahwa SPI memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.292 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2.012 ($2.292 > 2.012$) yang berarti bahwa terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis ketiga diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah. Hasil pengujian hipotesis keempat mengungkapkan bahwa insentif, desentralisasi dan SPI yang memiliki nilai t_{hitung} sebesar 44.868 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2.84 ($44.868 > 2.84$) yang berarti bahwa terima H_a dan tolak H_0 atau hipotesis keempat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa insentif, desentralisasi dan SPI secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah.

Pembahasan Hasil Analisis

Secara keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa model konseptual yang dibangun telah mampu menjelaskan determinan kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah dilihat dari insentif, desentralisasi dan sistim pengendalian intern (SPI). Secara detailnya, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja pegawai mampu dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh insentif dan SPI. Sementara desentralisasi meski berpengaruh namun secara statistik tidak signifikan terhadap perubahan kinerja pegawai. Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa seluruh prediktor (insentif, desentralisasi dan SPI) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah.

Insentif dalam kajian ini dijelaskan oleh 2 indikator yakni penilaian disiplin dan penilaian hasil kinerja yang selanjutnya terjabarkan dalam 6 item pernyataan. Seperti yang disentil diatas bahwa inseni karena berpotensi akan melahirkan ketidak puasan yang relatif berakibat kurang baik bagi pegawai yang mengalaminya. Pernyataan ini didasarkan atas pendapat Rusilawati, (2014) yang mengungkapkan bahwa tidak semua bentuk insentif yang diberikan kepada pegawai dapat memberi pengaruh langsung terhadap semangat kerja pegawai

Variabel prediktor berikutnya adalah desentralisasi yang dalam kajian ini terwakili oleh indicator keuangan, operasional, peningkatan mutu pegawai, alokasi rekening maupun perputaran pegawai. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil ini dapat dijelaskan jika melihat frekuensi jawaban responden yang relatif rendah khususnya pada item pernyataan yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pergeseran dana yang telah dianggarkan pada suatu rekening untuk dialihkan ke rekening yang lain dan item pernyataan tentang kewenangan dan tanggung jawab untuk pengalokasian sumber daya manusia. Hal ini berarti pendelegasian wewenang dan tanggung jawab relatif belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh; Indudewi & Nafasati, (2012) dan Tarigan, (2011) yang menunjukkan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Variabel penelitian terakhir adalah sistim pengendalian intern (SPI) yang dalam kajian ini terukur melalui indikator lingkungan pengendalian dan penilaian risiko yang

kemudian dijabarkan dalam 6 item pernyataan. Hasil analisis membuktikan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika SPI meningkat maka peningkatannya akan diikuti oleh peningkatan kinerja. Bukti lain yang mendukung temuan ini adalah pada hasil analisis deskriptif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai mean (nilai rata-rata) persepsi tentang SPI adalah sebesar 4.07 yang berarti bahwa pegawai relatif sangat setuju dengan seluruh pernyataan tentang SPI atau secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa SPI dipersepsikan mampu mempengaruhi kinerja pegawai. Item pernyataan yang relatif lebih baik dalam menjelaskan variabel ini adalah item menyangkut adanya langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kesalahan yang terjadi (nilai rata-ratanya sebesar 4.30). Hal ini berarti bahwa SPI pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah akan semakin baik jika program atau kebijakan menyangkut langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kesalahan oleh pegawai dilaksanakan dengan baik.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Insentif dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika insentif dan sistem pengendalian internal meningkat, maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan kinerja pegawai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan insentif dan sistem pengendalian internal akan meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah.
2. Desentralisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika desentralisasi meningkat, maka peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan kinerja pegawai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan desentralisasi tidak akan

meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah.

3. Insentif, desentralisasi dan sistim pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini dapat dibuktikan melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika Insentif, desentralisasi dan sistim pengendalian intern meningkat, maka peningkatan tersebut akan diikuti oleh peningkatan kinerja pegawai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan Insentif, desentralisasi dan sistim pengendalian intern secara simultan akan meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah.

Saran

Berdasarkan sumpulan hasil penelitian maka saran yang dapat diberikan melalui hasil kajian ini adalah bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa variabel prediktor yang memiliki kontribusi pengaruh yang relatif lebih kecil adalah desentralisasi yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab ke satuan dibawahnya. Berdasarkan temuan ini maka disarankan kepada pimpinan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah agar lebih memberikan ruang yang lebih besar khususnya menyangkut pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dalam pekerjaan.

Daftar Pustaka

- Agripa Fernando Tarigan. (2011). *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Sektor Publik (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu)*. Universitas Diponegoro.
- Bernardin, H. J., & Russel A. E. J. (1988). *Human Resources Management: An Experimental Approach* (2nd ed.). New York: Irwin McGraw-Hill Inc.
- Dessler, G. (2003). *Human Resources Management* (Nith Editi). Florida: International University.
- Eduard Yohannis Tamaela, Victor Pattiasina, Margaretha B. Dasinapa, Yohanes Maranj, J. A. D. (2020). Regional Financial Monitoring Models With Community Participation And Public Policy Transparency As Moderators. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 4223–4232. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200745>

- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen; Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Ilmu Manajemen (2nd ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indudewi, D., & Nafasati, F. (2012). Pengaruh Insentif, Desentralisasi, Ukuran Kinerja dan Kejelasan Sasaran terhadap Kinerja Organisasi (Studi Kasus pada Fakultas-Fakultas di Lingkungan Universitas Semarang). *Jurnal Dinamika Sosbud*, 14(1), 53–62.
- Jusuf, R. S. (2013). Analisis Pengaruh Tqm, Sistem Pengukuran Kinerja Dan Reward Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 634–644. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1870>
- Karyanti, T. D. (2010). *Pengaruh Kejelasan Sasaran, Desentralisasi, Dan Sistem Pengukuran Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Di Politeknik Negeri Semarang)*. Universitas Diponegoro.
- Linda Oktarnia. (2013). Pengaruh Penetapan Sasaran dan Sistem Remunerasi Terhadap Kinerja Pegawai Organisasi Sektor Publik (Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di JawaTimur). *Pene*. Retrieved from <http://jurnal.umrah.ac.id/archives/3070>
- Luthans, F. (2002). *Organizational Behavior* (9th ed.). New York: Mc Graw-Hill Irwin.
- Mangkuprawira, S., dan A. V. H. (2007). *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mazura, M. dan R. (2011). *Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis)*. Politeknik Negeri Bengkalis.
- Miah, N. Z. dan L. M. (1996). Decentralization, Accounting Controls and Performance of Government Organizations: a New Zealand Empirical Study. *Financial, Accountability and Management*, 12(3), 173–190. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/230263649_Decentralization_accounting_controls_and_performance_of_government_organizations_A_New_Zealand_empirical_study
- Rusilawati, D. dan B. I. (2014). Pemberian Insentif Dalam Memacu Kinerja. *E Journal Administrative Reform*, 2(1), 1008–1019. Retrieved from <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/315>
- Sarita Permata Dewi. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya Kepemimpinan

Terhadap Kinerja Karyawan Spbu Yogyakarta (Studi Kasus Pada Spbu Anak Cabang Perusahaan RB.Group). *Jurnal Nominal*, 1(1).

Sarwoto, B. (1997). *Kasus-Kasus Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Badan Penerbitan IPWI.

Supriyanto. (2014). Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit, Tipe Kepribadian dan Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA; Vol. 2014). Retrieved from

<https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/39127><https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4755978/Julius+Ojebode%27s+Thesis.pdf>https://dspace.lboro.ac.uk/29369/1/Angela_Darvill_thesis_esubmission.pdf<https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/ha>

Undang-Undang No. 24 Tahun 2014. *Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013*. , (2014).

Victorio Fernando Nahuway & Eduard Yohannis Tamaela. (2020). Model Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement serta Dampaknya Terhadap Kepuasan Pengguna di Provinsi Maluku. *JURNAL MANEKSI*, 9(1), 275–282. Retrieved from <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/327/351>

Victor Pattiasina¹
Muhamad Yamin Noch²
(Penulis Korespondensi)
Saling³
Melyanus Bonsapia⁴
Andarias Patiran⁵

^{1,2,3} Universitas Yapis Papua
^{4,5} Universitas Ottow Geissler Papua
abienoch12@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study examines the determinants of accounting information system performance (a study at PT. PLN Company Jayapura district unit). Testing was carried out on a sample of 71 respondents. The sample method used was purposive sampling. Data collection was carried out by direct survey. Hypothesis testing is tested empirically using moderated regression. The results showed that the technical ability of the apparatus had no effect on the performance of the accounting information system at PT. PLN Company Unit Jayapura Regency, user involvement affects the performance of the accounting information system on the performance of the accounting information system at PT. PLN Jayapura Regency Unit, the sophistication of personnel technology has an effect on the performance of the accounting information system. The performance of the accounting information system at PT. PLN Jayapura Regency Unit Company, training moderates the technical ability of the apparatus on the performance of the accounting information system at PT. PLN Company Unit Jayapura Regency, training moderates user involvement in the performance of the accounting information system at PT. PLN Jayapura Regency Unit and the latest education and training moderated the sophistication of personnel technology on the performance of the accounting information system at PT. PLN Jayapura Regency Unit Company.

Keywords : *Performance of Accounting Information Systems, Education and Training*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat dan pesat pada peningkatan penggunaan teknologi komputer merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Sebelum terjadi peningkatan kemajuan teknologi informasi, sebagian besar waktu yang digunakan oleh individu didalam perusahaan dan penggunaan sistem informasi dilakukan secara manual. Setelah terjadi peningkatan perkembangan teknologi informasi, banyak perusahaan beralih pada pendayagunaan sistem informasi yang berbasis komputer karena akan memudahkan dan mempercepat manajemen untuk mengolah informasi yang akan diinput (Adiwinata & Sujana, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Penyelenggara setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi.

Dalam menunjang kinerja PT. PLN (Persero) sudah menggunakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Perkembangan teknologi informasi telah banyak membantu meningkatkan kinerja SIA. Peningkatan penggunaan teknologi komputer sebagai salah satu bentuk teknologi informasi telah mengubah pemrosesan data akuntansi secara manual menjadi otomatis. Sejak tahun 2007, PT. PLN (Persero) telah menggunakan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi satu sama lain, yaitu *System Application and Product (SAP)*. SAP adalah suatu *software* yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP juga merupakan *software Enterprise Resources Planning (ERP)*, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. SAP terdiri dari sejumlah modul/aplikasi yang mempunyai kemampuan mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan suatu perusahaan dan tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya (Seto, 2013). Pada kebutuhan dan persepsi manajerial, lingkungan usaha dan teknologi informasi yang lebih

relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Beberapa perusahaan manajemen keuangan merasakan bahwa informasi keuangan yang disediakan oleh sistem informasi perusahaan tidak lagi memadai untuk memenuhi semua kebutuhan perusahaan, hal ini membuktikan bahwa informasi merupakan hal yang pokok dalam suatu perusahaan sehingga dapat diibaratkan sebagai nafas kehidupan perusahaan. Bagian terpenting dari seluruh informasi yang dibutuhkan manajemen khususnya manajemen perusahaan adalah informasi akuntansi (Ningrum, 2019).

Sistem informasi akuntansi merupakan penyedia informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan informasi keuangan yakni pihak eksternal dan internal. Tujuan kinerja sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan gambaran apakah suatu kinerja yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan serta sesuai dengan tujuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi, diantaranya; kemampuan teknis personal, keterlibatan pemakai, pelatihan dan pendidikan serta kecanggihan teknologi informasi.

Kemampuan teknik personal dalam penggunaan informasi pada suatu perusahaan dapat dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan menginterpretasikan data tersebut. Kemampuan teknik personal akuntansi yang baik akan mendorong pemakai untuk menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga kinerja sistem informasi akan lebih tinggi. Kemampuan teknik personal merupakan suatu hal yang tidak terlepas dari penerapan teknologi, selain itu keberadaan manusia sangat berperan penting dalam penerapan teknologi (Putri dan Dharmadiaksa, 2015). Menurut (Ardiwinata & Sujana, 2019) kemampuan pemakai dapat dilihat dari bagaimana pemakai sistem menjalankan sistem informasi yang ada.

Faktor pertama yang mempengaruhi Sistem Informasi Akuntansi adalah kemampuan teknis personal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Abhimantra dan Suryanawa 2016) menunjukkan bahwa, kemampuan teknik personal tidak berpengaruh pada kinerja sistem informasi akuntansi. Selanjutnya menurut Fani, dkk (2015) menunjukkan bahwa, kemampuan teknik pemakai, secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Kemudian menurut (Ardiwinata and Sujana 2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan teknik personal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

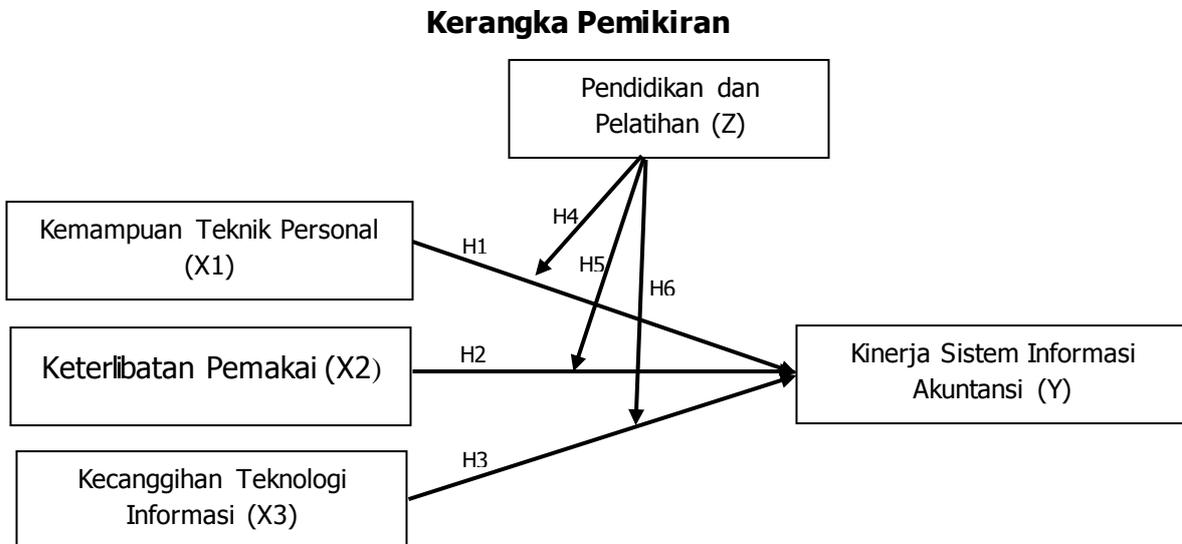
Determinan selanjutnya dari Sistem Informasi Akuntansi yaitu keterlibatan pemakai yang menurut penelitian (Abhimantra dan Suryanawa 2016) menyimpulkan bahwa keterlibatan pemakai berpengaruh positif pada kinerja sistem informasi akuntansi. Hasil tersebut selanjutnya didukung oleh Ardiwinata and Sujana (2019) berhasil membuktikan bahwa keterlibatan pemakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sedangkan berdasarkan penelitian Alchan, dkk (2016) menyimpulkan hasil yang berbeda yakni, keterlibatan pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat. Sejalan dengan kedua hasil penelitian diatas Abhimantra dan Suryanawa (2016) dan Satria, dkk (2019) yang juga mengungkapkan hasil yang sama yakni, pelatihan dan pendidikan berpengaruh positif pada kinerja sistem informasi akuntansi. Sedangkan ada hasil yg berbeda menurut (Alchan, dkk (2016) yaitu program pendidikan dan pelatihan pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi adalah kecanggihan teknologi informasi. Menurut Ayu Febriyanti, (2018) kecanggihan teknologi yang ada tidak akan ada artinya jika dalam perencanaan sistemnya tidak memperhatikan faktor manusia sebagai pemakainya, maka dapat dipastikan akan terjadi banyak hambatan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara teknologi yang digunakan dengan pemakainya. Hasil penelitian dari Ratnasih, dkk (2017) menunjukkan bahwa secara parsial kecanggihan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian lainnya dari Fani, dkk (2015) menyimpulkan bahwa kecanggihan teknologi informasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas menunjukan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memotivasi penulis untuk melakukan pengujian ulang dengan mengadopsi kerangka konseptual kajian empiris diatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis determinan sistim informasi akuntansi (kemampuan teknis personal, keterlibatan pemakai dan kecanggihan teknologi informasi) yang dimoderasi oleh pendidikan dan pelatihan pada PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Jayapura.

Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah diteliti sebelumnya maka dalam penelitian ini akan menguji Determinan yang mempengaruhi kinerja sistim informasi akuntansi dengan pelatihan dan pendidikan sebagai variabel moderasi pada PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Jayapura. Gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:



Pengaruh Kemampuan Teknik Personal Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Putri dan Dharmadiaksa (2015) kemampuan teknik personal adalah suatu hal yang tidak terlepas dari penerapan teknologi, selain itu keberadaan manusia sangat berperan penting dalam penerapan teknologi. Sedangkan Abhimantra dan Suryanawa (2016) bahwa kemampuan teknik personal, berpengaruh positif pada kinerja sistem informasi akuntansi. Selanjutnya menurut (Fani, dkk (2015) menunjukkan bahwa, kemampuan teknik pemakai, secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Kemudian menurut Ardiwinata and Sujana (2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan teknik personal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja sistim informasi akuntansi, maka peneliti merumuskan Hipotesis pertama yakni:

H₁: Kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi.

Pengaruh Keterlibatan Pemakai Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Menurut penelitian Abhimantra dan Suryanawa (2016) menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemakai berpengaruh positif pada kinerja

sistem informasi akuntansi. Peneliti lain yakni Ardiwinata dan Sujana (2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sedangkan berdasarkan penelitian dari Alchan, dkk (2016) menyimpulkan hasil yang berbeda yakni, keterlibatan pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

H₂: Keterlibatan pemakai berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Pengaruh Kecanggihan Teknologi Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Komang Ratnasih and Sujana (2017), menunjukkan bahwa secara parsial kecanggihan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Peneliti lainnya Fani, dkk (2015) menyimpulkan bahwa kecanggihan teknologi informasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

H₃: Kecanggihan teknologi informasi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi.

Pendidikan dan Pelatihan Moderasi Pengaruh Kemampuan Teknik Personal Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Kemampuan teknik personal tidak lepas dari penerapan teknologi, kemampuan pemakai dapat dilihat dari bagaimana pemakai sistem dapat menggunakan Kinerja sistem informasi akuntansi hal ini penting dalam mengoperasikan agar sistem dapat beroperasi secara maksimal. Terdapat perbedaan dengan penelitian (Gusi Putu Lestara Permana, 2020) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan tidak mampu memperkuat kemampuan teknik personal pada kinerja sistem informasi akuntansi.

H₄ : Pendidikan dan pelatihan memoderasi pengaruh kemampuan teknik personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Pendidikan dan Pelatihan Moderasi Pengaruh Keterlibatan Pemakai Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Keterlibatan pemakai yang semakin sering akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi dikarenakan adanya hubungan positif antara keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Adanya keterlibatan pemakai dapat meningkatkan penerimaan sistem oleh pemakai. Melalui adanya pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan pemahaman pemakai tentang sistem informasi yang digunakan, selain itu dapat meningkatkan komitmen dan keteliban pemakai dalam

pengembangan sistem, sehingga pemakai dapat menggunakan sistem informasi dan dapat meningkatkan kualitas kinerja sistem informasi akuntansi dalam pengembangan sistemnya. Pernyataan ini konsisten dengan penelitian I Wayan Andika Suryana, (2020), yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan mampu memperkuat keterlibatan pemakai pada Kinerja sistem informasi akuntansi.

Penggunaan pendidikan dan pelatihan sebagai variabel pemoderasi, dikarenakan adanya perbedaan hasil variabel keterlibatan pemakai. Variabel pendidikan dan pelatihan personal dapat memoderasi pengaruh keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

H₅ : Pendidikan dan Pelatihan memoderasi pengaruh keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Pendidikan dan Pelatihan Moderasi Pengaruh Kecanggihan Teknologi Personal Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Haag dan Keen (1996) dalam Nugerahamawati (2013), teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas – tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi dapat berjalan dengan efektif apabila anggota dalam organisasi dapat menggunakan teknologi dengan baik dan sangat penting bagi individu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Alannita, 2014) dan (Fani, Luh Nanda Yogita & Ayu, 2015) menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi informasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Individu.

Penggunaan pendidikan dan pelatihan sebagai variabel pemoderasi, dikarenakan adanya perbedaan hasil variabel kecanggihan teknologi personal. Variabel pendidikan dan pelatihan personal dapat memoderasi pengaruh Kecanggihan Teknologi Personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

H₆ : Pendidikan dan pelatihan memoderasi pengaruh kecanggihan teknologi personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yg menekankan pada pengujian teori-teori dengan melakukan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka atau bilangan lalu melakukan analisis data dengan prosedur statistik melalui uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kasual yang oleh Sugiyono (2016) adalah

hubungan yang bersifat sebab akibat. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya (Sugiyono 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan/pegawai PT. PLN (persero) Kabupaten Jayapura. Teknik sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling* dengan menggunakan beberapa kriteria yakni; supervisor dan pegawai unit akuntansi, anggaran, niaga dan pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dengan status aktif sebanyak 82 Responden.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Skala pengukuran jawaban responden menggunakan skala likert, yaitu; skala antara 1 sampai dengan 5. Skor 1 untuk "Sangat Tidak Setuju (STS)", skor 2 untuk "Tidak Setuju (TS)", skor 3 untuk "Netral (N)", skor 4 untuk "Setuju (S)" dan skor 5 untuk "Sangat Setuju (SS)" yang diadopsi dari Ningrum, (2019).s

Variabel yang diteliti dalam kajian ini antara lain; variabel sistem informasi akuntansi adalah penyedia informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan informasi keuangan yakni pihak eksternal dan internal. Indikator pengukuran untuk sistem informasi akuntansi adalah akurat dan teruji kebenarannya, kesempurnaan informasi, tepat waktu, relevansi, mudah dan murah. Item pertanyaan untuk variabel sistem informasi akuntansi mengadopsi pada penelitian Astuti, (2008).

Variabel berikutnya adalah kemampuan teknik personal. Kemampuan teknik sistem informasi sangat bermanfaat dan berperan penting dalam pengembangan sistem informasi untuk dapat menghasilkan informasi guna menciptakan laporan perencanaan yang akurat. Selain itu suatu sistem informasi akan lebih bermanfaat dalam membantu aktivitas apabila personel yang menggunakan sistem informasi tersebut, memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem informasi tersebut. Indikator terkait kemampuan teknik personal dalam penelitian ini adalah *Knowledge* (pengetahuan), *Abilities* dan *Skill*. Variabel selanjutnya adalah pemakai sistem informasi. Menurut Susanto (2008) para pemakai sistem informasi sebagian besar merupakan orang-orang yang hanya akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan seperti

operator dan manajer (*end user*). Indikator untuk mengukur keterlibatan pemakai adalah partisipasi, pendapat, pengaruh, dan keterlibatan (Jen, 2002).

Varibel berikutnya Menurut pelatihan dan pendidikan. Mathis (2012) mengatakan bahwa pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yakni menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya yang terakhir adalah variabel kecanggihan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan bagi organisasi yang dapat membantu kinerja organisasi dan individu. Menurut Haag dan Keen (1996) teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu seseorang bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Indikator kecanggihan teknologi mengenai terkomputerisasi dan terintegrasi memperoleh skor yang paling tinggi.

Pengujian kualitas data dilakukan untuk memenuhi kualitas berupa konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan melalui instrument penelitian. Uji ini perlu dilakukan karena jenis data penilaian adalah data primer, jenis pengujian berupa uji validitas dan reliabilitas, yaitu: Uji validitas menggunakan pengujian *construct validity* yang dilakukan dengan teknik korelasi antar skor butir pertanyaan dalam suatu variabel yang diamati dengan skor totalnya, dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan level signifikansi 5% dari nilai kritisnya. Rumus korelasi product moment menurut (Singarimbun, 2006). Sebuah instrumen dikatakan *reliable*, jika selalu mendapatkan hasil yang sama dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda (Ghozali, 2013). Menurut (Malhotra, 2005), *Reliability* adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menghitung *Cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel.

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji persamaan regresi linear agar dapat dikatakan sebagai model yang baik. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas: Uji Normalitas Pengujian normalitas data bertujuan untuk

mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan grafik histogram dan *probability plt*. Menurut Priyatno, (2012) menyatakan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam kajian ini adalah dengan melihat penyebaran titik-titik pada grafik *scatterplt*. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen (Ghozali, 2013). Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak terjadinya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* harus $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel ≤ 10 . Untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian disesuaikan dengan model hipotesis yang menggunakan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*).

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara indeks korelasi *Product Moment Person* dengan signifikan 5%. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0.05 maka instrumen dinyatakan valid. Sebaliknya, jika hasil korelasi lebih besar dari 0,05 maka instrumen dinyatakan tidak valid. Hasil uji ini terangkum pada Tabel berikut;

Tabel Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Sig	Ket.
Kemampuan Teknik Personal	X _{1.1}	0,944	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,903	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,878	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,888	0,000	Valid
Keterlibatan Pemakai	X _{2.1}	0,824	0,000	Valid
	X _{2.2}	0,731	0,000	Valid
	X _{2.3}	0,715	0,000	Valid
	X _{2.4}	0,774	0,000	Valid
	X _{2.5}	0,781	0,000	Valid
Kecanggian Teknologi Informasi	X _{3.1}	0,854	0,000	Valid
	X _{3.2}	0,773	0,000	Valid
	X _{3.3}	0,773	0,000	Valid
	X _{3.4}	0,838	0,000	Valid
Pendidikan dan Pelatihan	Z _{1.1}	0,698	0,000	Valid
	Z _{1.2}	0,700	0,000	Valid

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Sig	Ket.
	Z _{1.3}	0,743	0,000	Valid
	Z _{1.4}	0,740	0,000	Valid
	Z _{1.5}	0,665	0,000	Valid
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi	Y _{1.1}	0,744	0,000	Valid
	Y _{1.2}	0,632	0,000	Valid
	Y _{1.3}	0,764	0,000	Valid
	Y _{1.4}	0,902	0,000	Valid
	Y _{1.5}	0,902	0,000	Valid

Hasil pengujian validitas diatas dapat disimpulkan valid, karena tingkat probabilitasnya (sig) atau tingkat signifikannya < dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menghasilkan ukuran pernyataan yang konsisten. Menurut (Sugiono, 2017), reliabilitas adalah derajat konsistensi atau keajegan data dalam interval waktu tertentu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS 23.00 uji statistik *Cronbach Alpha based on standardized items*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai output SPSS bahwa konstruk variabel memberikan nilai *Cronbach Alpha based on standardized items* >0.70 yang menurut (Ghozali, 2013) bisa dikatakan reliabel seperti disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kemampuan Teknik Personal	0,925	Reliabel
Keterlibatan Pemakai	0,823	Reliabel
Kecanggihan Teknologi Informasi	0,825	Reliabel
Pendidikan dan Pelatihan	0,753	Reliabel
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi	0,849	Reliabel

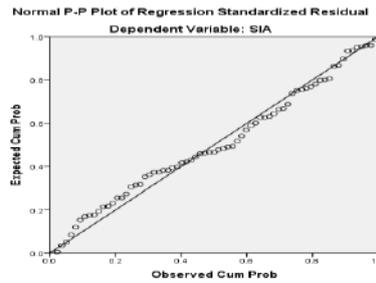
Paparan hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini di sajikan dalam tabel. Hasil uji di atas menunjukkan bahwa keofisien *Cronbach Alpha based on standardized items* >0.60 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kelima variabel terteliti adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Normalitas

Pengujian normal tidaknya dostribusi data penelitian ini dilakukan dengan melihat penyebaran data pada *normal probabilityplot*. Tampilan hasil pengujian *normal probabilityplot* data penelitian ini terlihat dibawah ini.

Gambar Hasil Pengujian Normalitas

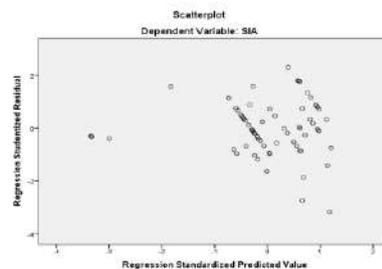


Grafik *normal probability plot* dalam Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian sebaran data dapat dikatakan berdistribusi normal, sehingga bisa dilakukan regresi dengan model linear berganda. Uji normalitas menggunakan Kolmogrov-smirnov dengan nilai p-Kolmogrov-smirnov test $>0,05$ (Ghozali, 2013).

Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat gambar *charts scatterplot*. Berikut ini adalah hasil pengujian heteroskedastisitas yang terlihat pada gambar *charts scatterplot* dibawah ini.

Gambar Hasil Pengujian Heterokedastisitas



Gambar diatas menunjukkan bahwa data penelitian bebas heterokedastisitas karena titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y

Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas kajian ini menggunakan melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) atau faktor pertambahan ragam. Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas seperti yang terlihat dibawah ini.

Tabel Pengujian Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kemampuan Teknik Personal	0,152	6,597
Keterlibatan Pemakai	0,163	6,121
Kecanggihan Teknologi Informasi	0,204	2,869

Pembahasan Hasil Penelitian

Kemampuan Teknik Personal Berpengaruh Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil uji parsial variabel kemampuan teknik personal menunjukkan t_{hitung} sebesar 0,693. Sementara nilai t_{tabel} sebesar 1,675 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,693 < 1,675$) dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,491 > 0,05$. Hasil tersebut membuktikan bahwa kemampuan teknik personal tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Teori yang mendukung hubungan kemampuan teknik personal sistem informasi adalah teori pencapaian prestasi. Teori ini menyatakan bahwa perubahan perilaku muncul karena individu ingin berhasil. Individu yang memiliki predisposisi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik, memiliki kemungkinan yang tinggi untuk membuat perubahan memperoleh sesuatu asumsi lain yang lebih penting adalah jika seseorang menghabiskan waktu berpikirnya untuk melakukan sesuatu yang baik, maka orang tersebut akan menampakkan dorongan energi dan hasrat ingin sukses serta akan meraih tujuan yang lebih besar. Keberhasilan suatu pengembangan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem tersebut tetapi ditentukan oleh kesesuaiannya dengan para pemakai sistem tersebut. Semakin rendah tingkat kemampuan teknik personal maka tingkat kinerja sistem informasi akuntansi yang dihasilkan akan semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Gultom, 2020) yang menyatakan bahwa kemampuan teknik personal berpengaruh pada kinerja sistem informasi akuntansi.

Keterlibatan Pemakai Berpengaruh Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil uji parsial variabel keterlibatan pemakai menunjukkan t_{hitung} sebesar 2,466. Sementara nilai t_{tabel} sebesar 1,675 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,466 > 1,675$) dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$. Hasil tersebut membuktikan

bahwa keterlibatan pemakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Teori yang mendukung hasil penelitian ini adalah teori Y dari (Mc Gregor, 1960). Teori ini menyatakan bahwa orang-orang akan mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan apabila mereka merasa terikat dengan tujuan itu. Dalam kondisi yang sesuai, mereka belajar menerima dan mencari tanggung jawab. Namun jika kondisi lingkungan tidak mendukung maka keterlibatan pemakai tidak akan memiliki dampak yang besar. Hal tersebut terjadi karena pemakai sistem informasi kurang dilibatkan dalam pemakaian sistem itu sendiri, sehingga pemakai tidak merasa puas.

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan hubungan pengaruh yang signifikan antara keterlibatan pemakai sistem informasi terhadap kepuasan pemakai maupun pemakaian sistem tersebut. Hasil ini cenderung disebabkan karena responden merasa tertarik dalam pengembangan maupun pemakaian sistem padahal keterlibatan yang semakin sering akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi dikarenakan adanya hubungan yang positif antara keterlibatan atau partisipasi pemakai dalam proses pengembangan sistem informasi dalam kinerja sistem informasi akuntansi, selain itu tingkat partisipasi responden yang rendah dalam pemakaian sistem informasi. Hal ini dapat dipahami karena hanya sebagian besar karyawan yang memahami karakteristik sistem informasi dan ahli dalam bidang sistem informasi. Sebaiknya pihak PT. PLN Persero unit layanan pelanggan Kabupaten Jayapura memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh pengguna sistem informasi akuntansi masing-masing baik dari segi kemampuan dasar mereka mengenai pengoperasian komputer maupun kemampuan mereka mengenai sistem yang dijalankan tersebut sehingga, pihak PT. PLN Persero unit layanan pelanggan Kabupaten Jayapura dapat mengoptimalkan kemampuan para pengguna sistem informasi akuntansi agar menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiwinata dan Sujana (2019) yang menunjukkan bahwa keterlibatan pemakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada LPD di Kota Denpasar namun hasil penelitiannya tidak sejalan dengan penelitian Alchan, dkk (2016) yang menyimpulkan hasil yang berbeda yakni, keterlibatan pemakai tidak berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

Kecanggihan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil uji parsial variabel kecanggihan teknologi informasi menunjukkan t_{hitung} sebesar 6,606. Sementara nilai t_{tabel} sebesar 1,675 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,606 > 1,675$) dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut membuktikan bahwa kecanggihan teknologi informasi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi.

Kaitan Teori TAM dengan variabel kualitas SIA dan Kecanggihan Teknologi yang digunakan, yaitu menurut (Saputri, 2016) ketika suatu sistem dikatakan berkualitas maka sistem tersebut akan bermanfaat. Begitu juga jika suatu sistem menggunakan teknologi yang canggih maka manfaat dari sistem tersebut juga akan meningkat. Karena kecanggihan teknologi tersebut menghasilkan beraneka ragam teknologi sistem yang dirancang untuk membantu pekerjaan manusia dalam menghasilkan informasi yang terbaik. Namun jika kecanggihan tersebut tidak didukung oleh pengguna (operator) yang handal dan juga lingkungan dimana teknologi tersebut digunakan tidak mendukung maka teknologi sebaik apapun akan menjadi percuma.

Kehadiran teknologi merupakan sumber kekuatan yang menjadikan sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif, serta diidentifikasi sebagai faktor yang memberikan retribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu teknologi informasi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan perusahaan dalam mengelola perusahaannya. Sehingga semakin canggih teknologi informasi yang diterapkan maka efektivitas sistem informasi yang dihasilkan akan semakin tinggi pula selain pengaruh dari user pengguna informasi. Namun daerah Papua seringkali mengalami gangguan internet ataupun pemutusan jaringan. Hal tersebut pastinya berdampak pada penggunaan sistem. Selain itu masih banyak daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan dalam akses internet.

Hal ini yang menjadi alasan mengapa kecanggihan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap sistem informasi akuntansi. Seberapa canggihnya teknologi informasi yang dimiliki dan akses yang mendukung maka akan baik dalam pelayanan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian Ratnasih, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Namun hasil penelitiannya tidak sejalan dengan penelitian Nanda (2016) yang menyatakan

bahwa kecanggihan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Sistem informasi akuntansi.

Pelatihan dan Pendidikan Moderasi Pengaruh Kemampuan Teknik Personal Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh kemampuan teknik personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Berdasarkan data yang diolah diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 12,646 dengan signifikansi 0,000 lebih besar dari nilai p value 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendidikan memoderasi hubungan kemampuan teknik personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Kemampuan teknik personal tidak lepas dari penerapan teknologi, kemampuan pemakai dapat dilihat dari bagaimana pemakai sistem dapat menggunakan Kinerja sistem informasi akuntansi hal ini penting dalam mengoperasikan agar system dapat beroperasi secara maksimal. Untuk itu pelatihan dan pendidikan seorang karyawan perlu di tingkatkan lagi agar dapat memberikan perubahan terhadap kinerja PT. PLN kedepannya. Hasil penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian (Gusi Putu Lestara Permana, 2020) menyatakan bahwa Pelatihan dan Pendidikan tidak mampu memperkuat kemampuan teknik personal pada kinerja sistem informasi akuntansi.

Pelatihan dan Pendidikan Memoderasi Pengaruh Keterlibatan Pemakai Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Berdasarkan data yang diolah diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 12,781 dengan signifikansi 0,000 lebih besar dari nilai p value 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendidikan memoderasi hubungan keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Keterlibatan pemakai yang semakin sering akan meningkatkan kinerja sistem informasi akuntansi dikarenakan adanya hubungan positif antara keterlibatan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Adanya keterlibatan pemakai dapat meningkatkan penerimaan sistem oleh pemakai. Dengan adanya Pelatihan dan Pendidikan dapat meningkatkan pemahaman pemakai tentang sistem informasi yang digunakan, selain itu dapat meningkatkan komitmen dan keteliban pemakai dalam pengembangan sistem, sehingga pemakai dapat menggunakan sistem informasi dan

dapat meningkatkan kualitas kinerja sistem informasi akuntansi dalam pengembangan sistemnya. Hasil konsisten dengan penelitian. (Gusi Putu Lestara Permana, 2020), menunjukkan pelatihan dan pendidikan mampu memperkuat keterlibatan pemakai pada kinerja sistem informasi akuntansi.

Pelatihan dan Pendidikan Memoderasi Pengaruh Kecanggihan Teknologi Personal Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh kecanggihan teknologi personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Hasil data yang diolah diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 15,855 dengan signifikansi 0,000 lebih besar dari nilai p value 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendidikan memoderasi hubungan kecanggihan teknologi personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Menurut (Keen., 1996), teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Untuk itu Dalam pelaksanaan *System Application and Product (SAP)* dapat mempermudah karyawan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan dengan efektif dan efisien pada PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Jayapura. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Alannita, 2014) dan (Fani, Luh Nanda Yogita & Ayu, 2015) menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi informasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja individu.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka kesimpulan yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Kemampuan teknik personal tidak berpengaruh terhadap Kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Jayapura, 2). Keterlibatan pemakai berpengaruh terhadap Kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Jayapura, 3). Kecanggihan teknologi personal berpengaruh terhadap Kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Jayapura, 4). Pelatihan dan pendidikan memoderasi kemampuan teknik personal terhadap Kinerja sistem informasi akuntansi pada PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Jayapura, 5). Pelatihan dan pendidikan

memoderasi keterlibatan pemakai terhadap Kinerja sistim informasi akuntansi pada PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Jayapura dan yang terakhir 6). Pelatihan dan pendidikan memoderasi kecanggihan teknologi personil terhadap Kinerja sistim informasi akuntansi pada PT. PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kabupaten Jayapura.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini baik bagi PT. PLN, masyarakat maupun akademisi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 1). Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel sebanyak 71 responden. Maka diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden. 2). Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti dukungan manajemen puncak sebagai variabel independen ataupun menjadikannya sebagai variabel moderasi. 3). Bagi pihak PT. PLN diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi kinerja dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang lebih baik lagi

Daftar Pustaka

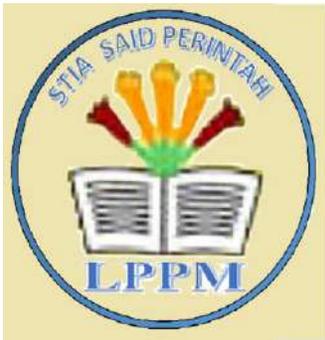
- Adiwinata, I. G., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Keterlibatan Pemakai, Pelatihan Dan Pendidikan Pada Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1867. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p09>
- Alannita, N. P. dan I. G. N. A. S. (2014). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, dan Kemampuan Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi pada Kinerja Individu. *Jurnal Akuntansi*, 33–45.
- Alchan, I. H., Rahayu, S., & Muslih, M. (2016). Pengaruh Kemampuan Pengguna Sistem Informasi, Pimpinan Bagian, Dan Program Pendidikan Dan Pelatihan (Studi Pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat). *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3292–3297.
- Ardiwinata, & Sujana. (2019). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Keterlibatan Pemakai, Pelatihan Dan Pendidikan Pada Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2302–8556), 1867–1896. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p09>
- Astuti, T. (2008). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu. *Universitas Brawijaya Malang*.
- Fani, Luh Nanda Yogita, D. N. A. S. dan P. I. G., & Ayu. (2015). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Kemampuan Teknik Pemakai, Dan Dukungan Manajemen Puncak Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Studi Empiris pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara (Kantor Pusat). *Jurnal Akuntansi*.
- Fani, Luh Nanda; Darmawan, Nyoman; Purnamawati, I. G. (2015). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Kemampuan Teknik Pemakai, dan Dukungan Manajemen

- Puncak Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Studi Empiris pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara (Kantor Pusat). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–12.
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Ghozali, I. (2013). *Analisa Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- GULTOM, A. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Cahaya Globalindo Prima. *Jurnal Akuntansi*.
- Gusi Putu Lestara Permana, I. W. A. S. (2020). Pengaruh Keterlibatan Pemakai Dan Kemampuan Teknik Personal Pada Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Dengan Pendidikan Dan Pelatihan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Selatan) (Studi Empiris Pada. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 5, No, 49–66.
- Haag dan Keen. (1996). *Information Technology: Tomorrow's Advantage Today*. Hammond: Mcgraw-Hill College.
- Jen, T. F. (2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 4 No 2, 135–154.
- Keen., H. dan. (1996). *Information Technology: Tomorrow's Advantage Today*. Hammond: Mcgraw-Hill College.
- Malhotra, N. K. (2005). *Riset Pemasaran: Pendekatan Terapan, Terjemahan oleh: Ir. Soleh Rusyady Maryam, MM* (Edisi Keem). PT. INDEKS,.
- Mathis, R. L. dan J. H. J. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Buku 1, Alih Bahasa: Jimmy Sadeli dan Bayu. Prawira Hie*. Salemba Empat.
- Mc GREGOR. (1960). *The Human Side of Enterprise New York McGraw-Hill*.
- Ningrum, H. (2019). (Studi Kasus Pada PT . PLN PERSERO UP3 Klaten) Disusun Oleh: *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Priyatno. (2012). *Cara Kilat belajar Analisa Data Dengan SPSS 20* (1st ed.). Andi Ofset.
- Purwa Abhimantra, W., & Suryanawa, I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1782–1809.
- Putri, N. W., & Dharmadiaksa, I. (2015). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Program Pelatihan dan Pendidikan, Insentif, dan Partisipasi Manajemen Pada Kinerja Penerapan SIA. *E-Jurnal Akuntansi*, 12(3), 582–592.
- Putu Ardiwinata, I. G. N., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Keterlibatan Pemakai, Pelatihan Dan Pendidikan Pada Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29 No 3, 1867. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p09>
- Ratnasih, K. S., & Sujana, E. ;Ni K. (2017). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Pengguna, dan Kemampuan Pengguna Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada PT PLN (PERSERO) Area Bali Utara (Kantor Pusat). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).

- Saputri, I. N. (2016). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kepuasan Pengguna Paket Program Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Boyolali). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Akuntansi*.
- Satria, I. G. N., & Wahyu dan Putra, I. N. A. (2019). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Keterlibatan Pemakai, Pendidikan dan Pelatihan pada Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia P. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 763–790.
- Seto, B. D. (2013). *Definisi SAP (System Application and Product in data processing)*, (Online), (<http://bagusdwiseto.blogspot.com/2013/04/definisi-sap-systemapplication-and.html>), diakses 5 Februari 2015.
- Singarimbun, M. dan S. E. (2006). *Metode Penelitian Survei (Editor)*. LP3ES.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Refika Aditama.
- Susanto, A. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*. (2009).
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. (2003). *UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS*.

Wiwin S. Makatutu¹
Rahma Arsyad²
(Penulis Korespondensi)

^{1,2}Program Studi Niaga STIA Said Perintah
amarsyad@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study aimed to find out whether Cash Turnover, Receivable Turnover, and Inventory Turnover have positive and significant impact to Profitability and which variable has dominant effect to profitability in industry multi sector registered in Bursa Efek Indonesia. Profitability in this case means Return on Investment (ROI). The methodology used in this study is descriptive analysis, quantitative analysis and multiple regression analysis. From the statistic analysis, it is found that 1) the value of regression coefficient for Cash Turnover = 0,125 with significance value = 0,043, which means Cash Turnover has positive and significant impact on Profitability; 2) The value of Receivable Turnover = 0,292 with significance value = 0,017. This means that Receivable Turnover has positive and significant impact on Profitability; 3) the value of Inventory Turnover = 0,917 with significance value = 0,000. This shows that Inventory turnover has positive and significant impact to Profitability; 4) the variable which has the most effect on the Profitability in industry multi sector registered in BEI inventory turnover whose coefficient regression value is bigger compared to others, 0,917. Therefore, it can be conclude that all variable contribute positively and significantly to Profitability, and the dominant variable affected the Profitability is inventory turnover.

Keywords : Cash Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover, Return on Investment

Pendahuluan

Perkembangan usaha industri otomotif di Indonesia semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menimbulkan persaingan yang kompetitif dengan semakin bertambahnya perusahaan sejenis. Untuk dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan harus menjaga profitabilitasnya, yang mana dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah modal kerja. Modal kerja sangat dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari maupun untuk membiayai investasi jangka panjangnya.

Modal kerja bersifat fleksibel, karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktiva perusahaan yang memiliki tiga komponen penting, yaitu kas, piutang dan persediaan. Kas menunjukkan tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Semakin tinggi perputaran kas semakin baik keuntungan yang diperoleh. Selain itu, perputaran piutang yang dikelola dengan baik, akan mempengaruhi kelancaran aktiva. Jika piutang terbayar semakin besar maka keuntungan ataupun profitabilitas akan semakin meningkat. Sementara itu, persediaan merupakan harta yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan untuk proses produksi. Perputaran persediaan yang baik akan meningkatkan profitabilitas. Secara jelas dapat dikatakan, dengan manajemen modal kerja yang efektif dan efisien yang meliputi ketiga unsur diatas, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas.

Peranan modal kerja dan profitabilitas seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti. Seperti hadirnya beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema yang sama, yaitu hubungan antara modal kerja dengan profitabilitas. Hubungan antara modal kerja dan profitabilitas tersebut telah dibuktikan oleh beberapa peneliti tersebut, sehingga memberikan hasil mengenai hubungan modal kerja dengan profitabilitas pada masing-masing obyek penelitian mereka (Kumara & Dharma Saputra, 2014; Sufiana & Purnawawati, 2012).

Jenis perusahaan yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini adalah manufaktur dari sektor aneka industri pada sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar pada bursa efek Indonesia. Berdasarkan data laporan keuangan, *return on investment* (ROI) masing-masing perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor industri otomotif dan komponen periode 2010-2014, terlihat bahwa ROI masing – masing perusahaan rata-rata berfluktuatif dari tahun ketahun ada yang mengalami *trend* kenaikan, dan ada yang mengalami *trend* penurunan (ICMD, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI?; 2) Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI?; 3) Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI?; 4) Variabel mana yang dominan berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI?

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis pengaruh perputaran kas terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI; 2) Untuk menganalisis pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI; 3) Untuk menganalisis pengaruh perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI; 4) Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.

Kerangka Teoritis

Modal Kerja

Modal kerja adalah investasi perusahaan di dalam aktiva jangka pendek seperti kas, sekuritas (surat-surat berharga), piutang dagang, dan persediaan (Weston dan Brigham dalam (Sawir, 2005). Komponen modal kerja menurut adalah kas, piutang dan persediaan (Horne & Wachowicz, 2014).

1) Kas

a. Pengeblaan Kas

Manajemen kas mencakup pengumpulan yang efisien serta digunakan untuk kepentingan pembayaran dan investasi yang dilakukan oleh kas, sehingga salah satu upaya untuk mencapai efisiensi pada kas adalah dengan mempercepat penerimaan kas dan memperlambat pengeluaran kas (Horne & Wachowicz, 2014). Keynes dalam Horne & Wachowicz (2014) menyatakan bahwa ada tiga motif untuk memiliki kas, yaitu: (1) Motif transaksi, berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya; (2) Motif berjaga-jaga, dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga; (3) Motif spekulasi, dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas

dalam bentuk investasi yang sangat likuid.

b. Perputaran Kas

Manajemen kas mencakup pengumpulan yang efisien, pembayaran dan investasi sementara kas, sehingga perusahaan akan diuntungkan jika penerimaan kas dapat dipercepat dan pembayaran kas dapat diperlambat (Horne & Wachowicz, 2014). Manajemen kas yang efisien dapat dilihat dari pengumpulannya terhadap kas, atau jangka waktu dari kas yang dikeluarkan untuk dapat kembali menjadi kas selama satu periode, atau biasa disebut dengan perputaran kas (*cash turnover*).

Dengan mengetahui perputaran kas, perusahaan dapat mengetahui berapa kali dalam satu periode kas dapat berputar kembali menjadi kas setelah diinvestasikan. Menurut Sartono formula untuk mengetahui perputaran kas dalam satu periode yaitu rata-rata kas ditemukan dengan menjumlah kas tahun pertama dan tahun ke dua kemudian dibagi dua. Sedangkan jumlah periode rata-rata kas dalam berputar (dalam hari) adalah sebagai berikut: semakin banyak atau semakin cepat perputaran kas dalam satu tahun maka semakin efisien pengelolaan kas suatu perusahaan. Dalam hal periode kas, semakin sedikit jumlah hari periode kas dalam satu tahun maka mengindikasikan pengelolaan kas yang juga semakin efisien (Sartono, 2010).

2) Piutang

a. Pengelolaan Piutang

Piutang merupakan jumlah uang yang dipinjam dari perusahaan oleh pelanggan yang telah membeli barang atau memakai jasa secara kredit (Horne & Wachowicz, 2014; Sartono, 2010). Dengan adanya piutang maka perusahaan memiliki aktiva yang berada pada konsumen. Aktiva lancar tersebut akan dibayarkan kepada perusahaan sampai waktu jatuh tempo yang telah ditentukan yang pada akhirnya menjadi kas. Piutang berfungsi untuk dapat memberikan solusi penjualan alternatif bagi pelanggan selain secara pembayaran secara kontan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan penjualan produk perusahaan.

b. Perputaran Piutang

Semakin lama jangka waktu pelunasan kredit, semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayainya, dengan demikian piutang akan semakin tidak efisien (Sutrisno, 2008). Saat pelunasan kredit semakin lama, maka ketika itu juga dana yang diharapkan untuk menambah kas menjadi tertunda sebab pelanggan belum melakukan pembayaran. Ketika hal tersebut terjadi maka piutang menjadi tidak efisien dalam

menambah laba ke dalam kas perusahaan.

3) Persediaan

a. Pengelolaan Persediaan

Pengelolaan persediaan memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan agar pengelolaan tersebut dapat berlaku dengan baik. Horne & Wachowicz (2014) menjelaskan mengenai persediaan yang membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Jenis-jenis persediaan pada perusahaan manufaktur antara lain adalah bahan mentah, barang setengah jadi, persediaan dalam pemindahan dan barang jadi.

Menurut Sartono (2010), untuk perusahaan dagang jenis persediaannya mencakup persediaan barang dagangan dan persediaan bahan penolong. Bagi perusahaan manufaktur persediaan ini menjadi begitu penting karena kesalahan dalam investasi persediaan ini akan mengganggu kelancaran operasi perusahaan. Apabila persediaan terlalu kecil maka kegiatan operasi besar kemungkinannya mengalami penundaan, atau perusahaan beroperasi pada kapasitas yang rendah.

b. Perputaran persediaan

Dalam menghitung efisien tidaknya persediaan perusahaan perlu adanya analisa lebih lanjut terhadap persediaan tersebut. Perusahaan dapat menggunakan perputaran persediaan untuk dapat menjawab hal tersebut. Aktivitas persediaan bertujuan untuk membantu menentukan keefektifan perusahaan dalam mengelola persediaan, dan dihitung dengan rasio perputaran persediaan (Horne & Wachowicz, 2014). Dalam menentukan perputaran persediaan, perusahaan membandingkan antara penjualan dengan persediaan dalam periode tertentu. Dengan mengetahui perputaran persediaan, akan menunjukkan efisiensi dari manajemen persediaan. Semakin kecil tingkat perputaran persediaan akan menunjukkan pengelolaan persediaan yang makin tidak efisien, begitu pula sebaliknya.

Dengan manajemen modal kerja yang efektif dan efisien perusahaan akan mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan investasi untuk keperluan likuiditas dengan tercapainya kenaikan profit perusahaan. Seperti yang diketahui, likuiditas dan profitabilitas memiliki hubungan yang berlawanan, sehingga diperlukan kebijakan modal kerja yang tepat untuk menentukan porsi yang akan dipenuhi untuk menjaga keduanya agar tetap pada kondisi yang dapat dikatakan baik.

Profitabilitas

Menurut Sartono (2010), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik, menunjukkan kinerja perusahaan yang baik sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan dengan penjualan, maupun dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan tersebut, atau dihubungkan dengan modal sendiri.

Tujuan utama dari setiap perusahaan yang berorientasi pada laba adalah memperoleh laba yang memuaskan (Anthony & Govindarajan, 2005). Oleh karena itu, laba merupakan tolok ukur yang penting. Dengan profitabilitas, perusahaan dapat melihat kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Setelah itu pihak manajemen dapat membuat keputusan strategis terkait hasil dari profitabilitas perusahaan.

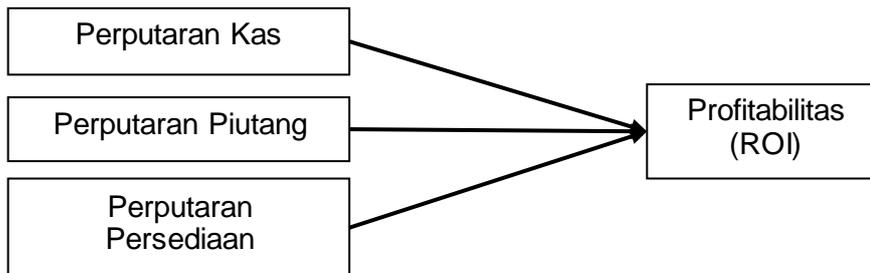
a. Perhitungan Profitabilitas

Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang dapat digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk perencanaan (*planning*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*) kegiatan sehari-hari dari pusat laba sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi (Anthony & Govindarajan, 2005)

Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk mendapatkan penjelasan tentang pengaruh perputaran kas, piutang, dan persediaan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Profitabilitas dapat dilihat dari indikator yakni nilai *Return On Investment* (ROI) dari masing-masing perusahaan. Berikut adalah gambar kerangka konseptual penelitian.

Gambar Kerangka Konseptual
Manajemen Modal Kerja



Hipotesis

Berdasarkan fenomena, dukungan konsep dan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam kajian ini antara lain;

- 1) Perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.
- 2) Perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.
- 3) Perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.
- 4) Perputaran kas, berpengaruh dominan terhadap profitabilitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana pengukuran data kuantitatif melalui perhitungan ilmiah. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian sebab akibat, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat serta dibangun dengan teori yang sudah matang, yang berfungsi untuk mengetahui, meramalkan dan mengontrol fenomena yaitu tentang pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri dimulai pada bulan Oktober hingga Desember 2015 pada perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah berupa data sekunder. Berupa data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur sektor industri otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2010 – 2014. Data laporan keuangan bersumber dari ICMD, 2011, 2013, 2015. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 Perusahaan pada Sektor

aneka Industri yang terdaftar di BEI, dan seluruhnya di jadikan sampel terdiri dari; Astra Otoparts Tbk, Astra International Tbk, Indo Kordsa Tbk, Goodyear Indonesia Tbk, Gajah Tunggal Tbk, Indospring Tbk, Multistrada Arah Sarana Tbk, Nipress Tbk, Prima alloy Steel Tbk, Selamat Sempurna Tbk, Indomobil Sukses Internasional Tbk, Multi Prima Sejahtera Tbk, Tunas Ridean Tbk, Intraco Penta Tbk, United Tactor Tbk.

Data statistik yang diperoleh dalam penelitian perlu diringkas dengan baik dan teratur. Kemudian, pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Untuk pengujian dalam penelitian ini digunakan program SPSS 22. Adapun bentuk model yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu;

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Hasil persamaan regresi berganda tersebut Kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa uji yaitu; Uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastis yang menggunakan;

1) Uji Simultan (Uji F-Statistik) dalam penelitian ini digunakan program SPSS 19.0.

Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan (dimana $\alpha = 5\%$) dengan kriteria Uji F jika hasil sig value $< 5\%$ berarti signifikan.

2) Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Untuk pengujian dalam penelitian ini digunakan program SPSS 22. Untuk menentukan nilai t-statistik tabel, ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel.

Metode regresi berganda akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE). Oleh karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah diformulasikan, yang mencakup pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Koefisien Determinasi

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, maka masing-masing variabel independen yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara parsial maupun secara simultan mempengaruhi variabel dependen, yaitu profitabilitas (Y) yang dinyatakan dalam R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi

atau seberapa besar pengaruh, perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan secara simultan atau bersama-sama terhadap profitabilitas (Y), sedangkan r_2 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

a. Perputaran Kas (X_1)

Perputaran kas dapat ditunjukkan dengan perputaran kas dalam periode tertentu.

Adapun rumus yang digunakan;

$$\text{Perputaran Kas} = \frac{\text{penjualan}}{\text{rata - rata kas}}$$

b. Perputaran Piutang (X_2)

Perputaran piutang menunjukkan seberapa efisien piutang perusahaan dengan pembayaran kredit oleh pelanggan yang lebih cepat dari tanggal jatuh tempo atau paling tidak tepat pada waktunya. Adapun rumus yang digunakan;

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{penjualan}}{\text{rata - rata piutang}}$$

c. Perputaran Persediaan (X_3)

Perputaran persediaan menunjukkan seberapa efisien manajemen persediaan yang berarti makin cepat perputaran persediaan, maka makin efisien manajemen persediaannya. Indikatornya adalah periode perputaran persediaan. Adapun rumus yang digunakan;

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{penjualan}}{\text{rata - rata persediaan}}$$

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang dinyatakan dengan simbol Y. Variabel profitabilitas ini akan dinyatakan dalam rasio laba yang dihasilkan dalam perhitungan ROI (*Return On Investment*). Indikatornya adalah perhitungan ROI. Adapun rumus yang digunakan;

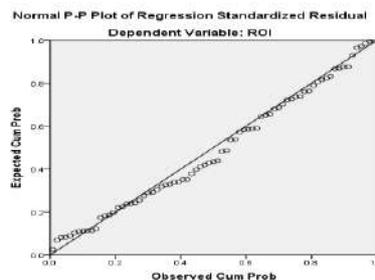
$$\text{ROI} = \frac{\text{EAT}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan jumlah sampel 15 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di bursa efek Indonesia antara lain (Astra Internasional Tbk, Astra Auto Part Tbk, Indo Kardsa Tbk, Goodyear Indonesia Tbk, Gajah Tunggal Tbk, Indospring Tbk, Multistrada Arah sarana Tbk, Nipress Tbk, Prima alloy steel Universal Tbk, Selamat Sempurna Tbk, Indomobil Sukses Internasional Tbk, Multi Prima Sejahtera Tbk, Tunas Ridean Tbk, Intraco Penta Tbk, United Tractor Tbk). Yang selanjutnya menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun ketiga variabel bebas dalam penelitian ini masing-masing adalah perputaran kas (X_1), perputaran piutang (X_2), perputaran persediaan (X_3) dan variabel terikat adalah profitabilitas dalam hal ini *return on investment* (ROI) (Y).

Hasil uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik *normal probability plot* yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini

Gambar Grafik Normal Probability Plot



Gambar diatas menunjukkan bahwa sebaran titik sepanjang garis diagonal, yang berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi kenormalan dari data sehingga sesuai dengan asumsi klasik dari suatu regresi.

Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat adanya korelasi yang erat antara variabel bebas yang akan digunakan dalam suatu regresi. Regresi yang baik adalah suatu regresi yang tidak memiliki multikolinearitas di dalamnya sehingga tidak ada gangguan yang diharapkan akan terjadi pada regresi tersebut. Keberadaan multikolinearitas suatu regresi dapat dilihat melalui nilai VIF (*Variance Inflation Factors*) atau nilai toleransinya. Keberadaan multikolinearitas dapat diketahui apabila nilai VIF > 10 atau secara kebalikannya dengan melihat nilai toleransinya < 0,1. Adapun hasil uji multikolinearitas pada regresi yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	Per. Kas	.100	.138	.126	.996	1.004
	Per. Piutang	.040	.278	.261	.525	1.906
	Per. Persediaan	.326	.421	.419	.524	1.908

Tabel diatas menjelaskan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1. Ini menunjukkan bahwa keberadaan multikolinearitas pada persamaan yang dilakukan tidak terbukti.

Selanjutnya dilakukan Uji autokorelasi untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara anggota sampel yang diurut berdasarkan waktu yang mengakibatkan model regresi tidak dapat digunakan sebagai penaksir variabel terikat pada nilai variabel bebasnya. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai *Durbin Watson*. Berdasarkan hasil *output* SPSS (*Model Summary^b*) pada Tabel berikut menunjukkan nilai DW sebesar 1,675 yang berarti tidak ada keputusan/kesimpulan.

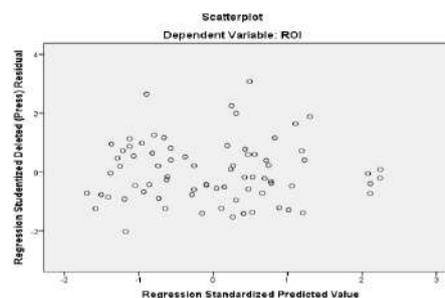
Tabel Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.832 ^a	.692	.653	5.19923	1.675

a. Predictors: (Constant), Per. Persediaan, Per. Kas, Per. Piutang

b. Dependent Variable: ROI

Hasil uji Heteroskedastisitas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berikut adalah *scatterplot*-nya.

Gambar Grafik Uji Heterokedastisitas

Hasil regresi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.885	1.426		2.724	.008
Per. Kas	.125	.021	.126	2.176	.043
Per. Piutang	.292	.119	.361	2.441	.017
Per. Persediaan	.917	.234	.579	3.915	.000

Berdasarkan Tabel diatas persamaan regresi berganda penelitian ini adalah;

$$Y = 3,885 + 0,125 X_1 + 0,292 X_2 + 0,197 X_3$$

a. Koefisien Konstanta (a) sebesar 3,885

Nilai konstanta yang positif sebesar 3,385 menunjukkan bahwa apabila perputaran kas, piutang dan persediaan dalam keadaan konstan, maka ROI sebesar 3,385.

b. Perputaran Kas (X_1)

Koefisien regresi Perputaran kas (X_1) sebesar 0,125 menyatakan bahwa setiap perubahan sebesar 1 kali perputaran kas maka akan meningkatkan *Return On Investment* sebesar 12,5% dengan anggapan bahwa perputaran piutang dan perputaran persediaan adalah 0. Adanya hubungan yang positif ini berarti antara perputaran kas dengan ROI menunjukkan hubungan yang searah, artinya setiap kenaikan perputaran kas akan diikuti oleh kenaikan ROI dan sebaliknya penurunan perputaran kas akan mengakibatkan penurunan ROI pula.

c. Perputaran Piutang (X_2)

Koefisien regresi perputaran piutang (X_2) sebesar 0,292 menyatakan bahwa setiap perubahan sebesar 1 kali perputaran piutang maka akan meningkatkan ROI sebesar 29,2% dengan anggapan bahwa perputaran kas dan perputaran persediaan adalah 0. Adanya hubungan yang positif ini, berarti bahwa antara perputaran piutang dengan ROI menunjukkan hubungan yang searah, artinya setiap kenaikan perputaran piutang akan diikuti oleh kenaikan ROI. Dan sebaliknya penurunan perputaran piutang mengakibatkan penurunan ROI.

d. Perputaran Persediaan (X_3)

Koefisien regresi perputaran persediaan (X_3) sebesar 0,917 menyatakan bahwa setiap perubahan sebesar 1 kali perputaran persediaan maka akan meningkatkan ROI

sebesar 91,7%. Dengan anggapan bahwa perputaran kas dan perputaran piutang adalah 0. Adanya hubungan yang positif ini, berarti bahwa antara perputaran persediaan dengan ROI menunjukkan hubungan yang searah, artinya setiap kenaikan perputaran persediaan akan diikuti oleh kenaikan ROI dan sebaliknya penurunan perputaran persediaan akan mengakibatkan penurunan ROI pula.

Pengujian Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji t)

**Tabel Koefisien Parsial
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.885	1.426		2.724	.008
Per. Kas	.125	.021	.126	2.176	.043
Per. Piutang	.292	.119	.361	2.441	.017
Per. Persediaan	.917	.234	.579	3.915	.000

Berdasarkan Uji t diketahui bahwa;

- a) Nilai $t_{hitung} = 2,176 > t_{tabel} = 1,994$ dengan koefisien variabel perputaran kas terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri sebesar 0,125, dan nilai (sig) = 0.043 < 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.
- b) Nilai $t_{hitung} = 2,441 > t_{tabel} = 1,994$ dengan koefisien variabel perputaran piutang terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri sebesar 0,292, dan nilai (sig) = 0.017 < 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.
- c) Nilai $t_{hitung} = 3,915 > t_{tabel} = 1,994$ dengan koefisien variabel perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri sebesar 0,917 dan nilai (sig) = 0.000 < 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.

Tabel Kesimpulan Uji Parsial

No.	Variabel	Sig	TarafSignifikan si 5 %	Kesimpulan
1	Perputaran Kas	0,043	< 0,05	H₁ diterima , perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.
2	Perputaran piutang	0,017	< 0,05	H₂ diterima , perputaran piutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.
3	Perputaran persediaan	0,000	< 0,05	H₃ diterima , perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua hipotesis diterima, yang berarti semua variabel bebas (perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (ROI).

2) Koefisien Determinasi

**Tabel Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.832 ^a	.692	.653	5.19923	1.675

a. Predictors: (Constant), Per. Persediaan, Per. Kas, Per. Piutang

b. Dependent Variable: ROI

Berdasarkan diatas diperoleh nilai *R Square* = 0,692. Ini ditunjukkan bahwa 69,2 % variasi dari variabel profitabilitas (ROI) sektor aneka industri dipengaruhi oleh perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan, sedangkan 30,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial, maka ketiga variabel bebas yaitu perputaran kas (X_1), perputaran piutang (X_2), dan perputaran persediaan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dalam hal ini ROI dan perputaran Persediaan menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi profitabilitas dalam hal ini (ROI).

Adapun pembahasan mengenai pengaruh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI diuraikan sebagai berikut.

1. Pengaruh Perputaran Kas Terhadap Profitabilitas (ROI) pada Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI.

Dari persamaan regresi diperoleh nilai koefisien pengaruh Perputaran Kas terhadap profitabilitas perusahaan sektor Aneka Industri adalah 0,125 dengan tingkat signifikansi (sig) adalah $0,043 < 0.05$. Hasil ini ditunjukkan bahwa variabel perputaran kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. Koefisien regresi perputaran kas sebesar 0,125 menyatakan bahwa setiap perubahan sebesar 1 kali perputaran kas maka akan menghasilkan *Return on investment* sebesar 12,5 %.

Data menunjukkan bahwa perputaran kas maximum adalah pada Prima Alloy steel Tbk pada tahun 2012 sebesar 265,57 kali, sedangkan perputaran kas minimum adalah Indospring Tbk pada tahun 2013 sebesar 52,9 kali. Menurut Horne dan Wachowicz (2001) Semakin cepat Perputaran Kas maka semakin efisien dan sebaliknya. Ini karena kas merupakan bentuk aktifa yang paling likuid, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban financial perusahaan. Hal ini sejalan dengan (Riyanto, 2001) semakin tinggi perputaran Kas akan semakin baik ini berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kasnya dan keuntungan yang diperoleh semakin besar kecuali ada perubahan kebijakan.

Penelitian ini juga didukung oleh (Santhi & Dewi, 2014) memberikan hasil yang sama dimana variabel perputaran kas berpengaruh secara parsial terhadap Profitabilitas perusahaan makanan dan minuman di BEI periode 2010-2013. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vural *at. All.*, (2012) yang menyebutkan bahwa perputaran kas yang mampu meningkatkan profitabilitas juga mampu meningkatkan penjualan sehingga mencapai tujuan untuk mensejahterakan para investor dan penggunaan kas yang sudah efektif dan efisien.

2. Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas (ROI) pada Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI.

Koefisien regresi perputaran piutang sebesar 0,292 menyatakan bahwa setiap perubahan sebesar 1 kali perputaran piutang maka akan menaikkan ROI sebesar 29,2 % dengan anggapan bahwa perputaran kas dan perputaran persediaan adalah 0.

Adanya hubungan yang positif ini, berarti bahwa antara perputaran piutang dengan ROI menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi. Artinya setiap kenaikan perputaran piutang akan diikuti oleh peningkatan ROI. Dan sebaliknya penurunan perputaran piutang mengakibatkan pengurangan ROI.

Perputaran Piutang maximum adalah pada Multistrada Arah Sarana Tbk pada tahun 2010 sebesar 18,34 kali, sedangkan perputaran Piutang minimum adalah Nipress Tbk dan Prima Alloy Steel Tbk pada tahun 2014. Perputaran piutang menunjukkan periode terikatnya modal kerja dalam piutang. Dimana semakin cepat periode berputarnya menunjukkan semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan kredit tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan juga meningkat. Horne & Wachowicz (2014) semakin cepat perputaran piutang maka semakin efisien piutang dikarenakan semakin besar penjualan kredit maka semakin besar pula investasi dalam piutang dan akibatnya risiko atau biaya yang akan dikeluarkan akan semakin besar pula.

Akibat dari banyaknya piutang, tentunya menimbulkan risiko tidak tertagih, ini mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga menurun. Perusahaan juga seharusnya selektif dalam hal pengelolaan piutang. Penelitian ini didukung oleh (Sufiana & Purnawawati, 2012) yang menyatakan bahwa secara parsial perputaran piutang berpengaruh terhadap profitabilitas serta laba dominan dihasilkan oleh perputaran piutang, karena penjualan secara kredit yang periodenya teratur mampu menghasilkan laba yang tinggi. Karena selain penjualan langsung, penjualan kredit juga menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan.

3. Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas (ROI) pada Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI.

Persediaan merupakan kebutuhan modal kerja perusahaan. Pengelolaan persediaan yang efisien diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Koefisien regresi perputaran persediaan sebesar 0,917 menyatakan bahwa setiap perubahan sebesar 1 kali perputaran persediaan maka akan menghasilkan ROI sebesar 91,7%. Dengan anggapan bahwa perputaran kas dan perputaran piutang adalah 0. Adanya hubungan yang positif ini, berarti bahwa antara perputaran persediaan dengan ROI menunjukkan hubungan yang searah, artinya setiap kenaikan perputaran persediaan akan diikuti oleh kenaikan ROI dan sebaliknya penurunan perputaran persediaan akan mengakibatkan penurunan ROI pula.

Perputaran Persediaan maximum adalah Astra International Tbk pada tahun 2011

sebesar 13,55 kali, sedangkan perputaran persediaan minimum adalah Prima Alloy Steel Tbk sebesar 2,05 pada tahun 2013. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fransischa (2013) yang menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan juga mendukung hasil kajian dari Sufiana & Purnawawati (2012) yang menyatakan bahwa perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dibuat simpulan bahwa variabel perputaran kas, piutang, dan perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. Selain itu variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap profitabilitas pada sektor aneka industri yang terdaftar di BEI adalah variabel persediaan.

Saran

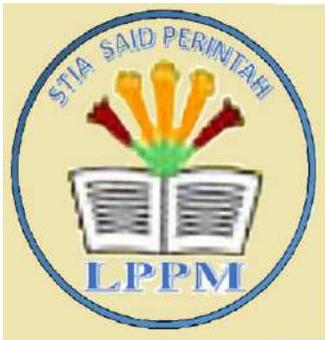
Sehingga dapat disarankan bahwa: (1) Manajemen perusahaan sebaiknya memperhatikan ketiga komponen modal kerja yaitu perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan untuk meningkatkan operasional perusahaan dalam memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Karena selama ini terjadi fluktuasi ketiga komponen modal kerja, oleh karena itu perusahaan diharapkan untuk memperhatikan tingkat penjualan, karena semakintinggi tingkat penjualan yang diperoleh, maka akan meningkatkan keuntungan perusahaan dan perusahaan juga diharapkan dapat mempertahankan jumlah kas secara efisien agar menghasilkan tingkat perputaran kas yang tinggi; (2) Untuk penjualan secara kredit, pihak perusahaan diharapkan memperketat syarat pembayaran penjualan kredit dan ketentuan tentang pembatasan kredit karena risiko tidak terbayar, akan menurunkan tingkat profitabilitas; (3) Perusahaan diharapkan memperhatikan persediaan. Karena persediaan menjadi variabel yang paling dominan dalam penelitian ini, maka hendaknya perusahaan selalu menjaga tingkat ketersediaan barang yang akan dijual ke konsumen; dan (4) diharapkan penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Misalnya variabel utang, biaya, likuiditas atau variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas.

Daftar Pustaka

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2005). *Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen) Buku 1*. Salemba Empat.
- Fransisca, Z. K. (2013). *Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran persediaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia*. <http://eprints.upnjatim.ac.id/id/eprint/5528>
- Horne, J. C. Van, & Wachowicz, J. M. (2014). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.
- ICMD. (2015). Indonesia Capital Market Directory. In *2011, 2013, 2015*.
- Kumara, D. P., & Dharma Saputra, I. D. G. (2014). PENGARUH EFISIENSI MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS KOPERASI SERBA USAHA. *E-Jurnal Akuntansi, [S.L.]*, 9(2), 340–355. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9078/0>
- Riyanto, B. (2001). *Dasar-dasar Pembelanjaan perusahaan (Keempat)*. BPFE.
- Santhi, I. A. P. I. W., & Dewi, S. K. S. (2014). Pengaruh Manajemen Modal Kerja Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013". *Jurnal Ekonomi*.
- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (4th ed.)*. BPEE.
- Sawir, A. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Gramedia Pustaka utama.
- Sufiana, N., & Purnawawati, K. (2012). *Pengaruh perputaran Kas, perputaran Piutang, Terhadap Profitabilitas*. Universitas Udayana.
- Sutrisno, H. (2008). *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekonesia.

Anatasija Limba¹
Clara Levenia Jamarua²

^{1,2}Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Pattimura
anatasijalimba508@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

21st-century learning should include STEM to grow interested in the Indonesian nation to love and master science, technology, engineering, and mathematics. They are included in it for physics learning. STEM is a practical learning approach because it combines knowledge, mathematics, technology, and techniques. This aim to make students as problem-solvers, inventors, have innovation, independent logical thinking, technological literacy, connect their culture and history with education, and apply their knowledge in real life. Thus, it is necessary to implement STEM-based learning integrated lokal wisdom /culture of the community in which the learners are located. One of the lokal wisdom of coastal communities in Maluku is Timba Laor. This research aims to develop a High School Physics Learning Tool business concept, and STEM-based Energy integrated lokal wisdom Timba Laor in the village of Allang Central Maluku district, a valid, practical, and effective Plomp model. The stages of mining carried out in this research activity are the development of high school physics learning tools business concept and STEM-based Energy integrated lokal wisdom Timba Laor in the village of Allang Central Maluku District. Test models by providing surveys of physics teachers to empirically validate the learning devices that have been compiled, analyzed, and revised. The resulting product is a learning device physics high school concept business, and energy-based STEM integrated lokal wisdom.

Keywords : Business and Energy, Learning Tools, STEM, Timba Laor

Pendahuluan

Masa abad 21 mewajibkan seluruh susunan warga Indonesia menggemari dan menerapkan hasil teknologi. Realitasnya, pemahaman tentang IPTEK oleh masyarakat masih banyak yang tidak ingin menekuni ataupun kurang berminat. Upaya minimum telah dicoba dengan memasukkan aspek sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam pendidikan di sekolah untuk mengembangkan perhatian generasi muda Indonesia untuk menikmati dan memahami ilmu pengetahuan, teknologi, teknik dan matematika (Kaniawati, 2019). Menurut Octavia, (2017), bahwa pendekatan pendidikan saat ini adalah pendidikan berdasarkan sains, teknologi, teknik, dan matematika yang sangat mendukung pencapaian kompetisi abad ke-21. Pendidikan STEM berfokus pada pendidikan yang melibatkan empat bidang disiplin ilmu. Hal ini disebabkan oleh ilmu pengetahuan alam, teknologi, rekayasa, dan matematika adalah dasar dalam pertumbuhan sains dan teknologi (IPTEKS). Secara universal tujuan pendidikan berbasis STEM ialah mempraktekkan konten dasar dari STEM dalam konteks kehidupan yang nyata sehingga siswa melek STEM (Bybee, 2013). STEM adalah metode pembelajaran pendidikan yang berbasis pada penerapan ilmu pengetahuan, matematika, teknologi, dan matematika (Sukmana, 2018).

Menurut Marrison, (2006), salah satu tujuan pendidikan STEM agar siswa terbentuk menjadi *problem solver*, penemu, inovasi, independen, berpikir logis, dan literasi teknologi serta mampu menghubungkan antara sejarah budaya, pendidikan dan pengetahuannya yang diterapkan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan hal tersebut maka implementasi pembelajaran berbasis STEM terintegrasi kearifan lokal/budaya masyarakat perlu digalakkan di lingkungan dimana peserta didik tinggal. Ibrahim, (2014) mengatakan bahwa integrasi kearifan lokal dalam aktifitas pendidikan dan pembelajaran sangat potensial untuk dimunculkan sebagai suatu inovasi atau kebaruan. Namun pada kenyataannya, belum semua Lembaga Pendidikan menerapkan pembelajaran STEM yang terintegrasi kearifan lokal, khususnya dalam pembelajaran Fisika di Maluku. Para peserta didik belum memanfaatkan sepenuhnya alternatif pembelajaran sains dan teknologi untuk merancang pendidikan yang lebih menarik dan bermakna. Mengaitkan budaya kearifan lokal di wilayah dimana siswa tersebut tinggal lebih dipahami sebagai kekayaan nasional yang dapat dipromosikan secara nasional atau internasional (Utami et al., 2017).

Menurut Oktavianti & Ratnasari, (2018), penerapan pendidikan di Indonesia menggunakan pembelajaran berbasis kearifan lokal bertujuan agar peserta didik mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus). Untuk mengidentifikasi hal ini maka adaptasi terhadap STEM harus diterapkan disesuaikan dengan informasi sains melalui pengembangan kualitas berpikir logis berbasis kearifan lokal setempat (Suastra, 2010). Pembelajaran yang menyeimbangkan pengetahuan Fisika melalui penanaman nilai-nilai ilmiah dan kearifan lokal akan terwujud jika perangkat pembelajaran disusun dan diterapkan dengan baik sehingga dapat menentukan keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Belajar dengan perangkat pembelajaran adalah indera atau peralatan bagi seorang guru. Keberhasilan guru dalam pembelajaran dapat dicapai melalui penggunaan perangkat pembelajaran yang optimal. Seorang guru dapat dibantu melalui penggunaan pedoman perangkat pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan teknik pengajarannya (Nuraini, Tindangen, M., & Maasawet, 2016). Beberapa komponen perangkat pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran. Salah satu diantaranya melalui pemanfaatan perangkat pembelajaran. Seorang pendidik akan sulit ditingkatkan efektivitas pembelajarannya jika tidak didukung dengan perangkat pembelajaran yang memadai (Hartini et al., 2017). Dengan demikian, dari hasil review terhadap kajian teori dan hasil-hasil penelitian relevan tentang pembelajaran Fisika berbasis STEM terintegrasi kearifan lokal di Kabupaten Maluku Tengah belum pernah dilakukan. Bertolak dari hal tersebut, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran usaha dan energi berbasis STEM terintegrasi kearifan lokal Timba Laor di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah?

Kajian Teoritis

Perangkat Pembelajaran

Menurut Akbar, (2013), bahwa perangkat pembelajaran adalah berbagai materi, perangkat, media, arahan, dan aturan yang akan digunakan dalam siklus pembelajaran di kelas. Siklus menginstruksikan belajar dapat terjadi dengan tepat setiap kali guru dan siswa menggunakan perangkat pembelajaran.

Beberapa sudut pandang yang dijadikan motivasi mengapa perangkat pembelajaran penting dalam siklus pembelajaran meliputi: 1) menjadi panduan; instrumen pembelajaran digunakan sebagai panduan bagi pendidik untuk mengevaluasi apa yang perlu dilakukan individu yang bersangkutan di ruang belajar. Panduan ini dimanfaatkan oleh Guru untuk membuat strategi mengajar dan merencanakan tools yang lebih baik; 2) instrumen pembelajaran sebagai tolok ukur: untuk mengetahui tingkat alat pembelajaran yang digunakan oleh Guru dan merencanakan aplikasi untuk menilai dirinya di kelas dan diandalkan untuk sebagai pilihan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat diperagakan dari seorang guru; 3) Perangkat pembelajaran dapat meningkatkan profesionalisme, metodologi dari pendidik dapat ditingkatkan dengan penyempurnaan perangkat pembelajaran. Hal Ini menyiratkan bahwa instrumen pembelajaran adalah sebagai pemenuhan kebutuhan manajerial, tetapi sebaliknya digunakan untuk memperbaiki cara dan metodologi mengajar; 4) Perangkat pembelajaran dibuat lebih sederhana: memiliki alat pembelajaran sederhana Guru dan Siswa dapat terbantu dan didorong berinteraksi pembelajaran. Melalui perangkat pembelajaran Guru tidak diragukan lagi dapat menyampaikan materi hanya dengan menyediakan perangkat tanpa harus berpikir dan mengingat.

Komponen-komponen perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari *Analisis SKL-KI/KD, silabus, RPP, LKPD* dan *penilaian*. Komponen-komponen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Perangkat pembelajaran ini diharapkan dapat dikembangkan dengan baik agar menjadikan pembelajaran di kelas lebih efektif.

Science, Tecknology, Engineering, and Mathematic (STEM)

Terminologi STEM pertama kali digunakan oleh NSF (*National Science Foundation*) pada tahun 1990-an yang merupakan akronim dari kata *Science, Engineering, Technology, dan Mathematics*. Ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya digunakan untuk mempelajari alam semesta, fakta-fakta, fenomena, dan keteraturan didalamnya. Teknologi ialah perubahan inovasi maupun modifikasi terhadap lingkungan alam untuk memberi kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia (International Technology Education Association, 2000).

Teknologi bertujuan untuk membuat modifikasi pada dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia (National Committee on Science Education Standard, 1996). Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa makna teknologi lebih

luas diartikan sebagai peningkatan kemampuan manusia untuk mengubah dunia dengan cara memotong, membuat, dan menyatukan material-material serta memindahkan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain. *Technology* (teknologi) dibentuk untuk mencapai sesuatu yang lebih hebat dengan bantuan tangan, bunyi, dan perasaan. *Engineering* (rekayasa) adalah sebuah profesi untuk memperoleh pengetahuan sains dan matematika yang dilakukan melalui studi, eksperimen, dan praktek serta mampu diaplikasikan dengan mempertimbangkan aspek metafisik dalam pengembangan bahan-bahan dan kekuatan alam untuk kebutuhan manusia. *Mathematics* ialah cabang disiplin ilmu yang digunakan dalam mengkaji berbagai macam pola maupun hubungan yang terjadi di alam (AAAS, 1993).

Bila ditinjau asal sudut pandang maka STEM bukanlah hanya sebuah jargon/akronim tetapi memiliki suatu tujuan dan pencapaian dalam dunia pendidikan. Pendidikan STEM bertujuan supaya semua peserta didik mampu menerapkan dan mempraktekkan konten dasar STEM sesuai situasi yang mereka hadapi/temukan didalam kehidupan supaya menjadi melek STEM (STEM literacy) (Bybee, 2013).

Acuan dari melek STEM lain: 1) seseorang individu memiliki pengetahuan, perilaku, dan keterampilan dalam mengidentifikasi sejumlah pertanyaan dan permasalahan kehidupan nyata dan mengungkapkannya secara alamiah dan terancang (*natural and design world*), serta menggambarkan simpulan berbasis berita maupun informasi terkait isu-isu terkini pembelajaran STEM. Seorang individu memerlukan pemahaman tentang karakteristik disiplin ilmu STEM yang dibentuk melalui pengetahuan, inkuiri, dan desain manusia; 2) seorang individu memiliki pengetahuan tentang bagaimana STEM dibentuk dari material, intelektual, dan budaya lingkungan, dan 3) seorang individu diharapkan untuk merangkaikan pengetahuan dengan informasi STEM dan menggunakan inspirasi/pandangan baru tentang *science, technology, engineering*, dan *mathematics* sebagai masyarakat yang konstruktif, peduli, dan reflektif.

Program pendidikan STEM dinilai perlu diintegrasikan berdasarkan kecakapan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan standar (NRC, 2010). Keterampilan yang harus dimiliki adalah sebagai berikut: 1) *Adaptability* (kecakapan untuk beradaptasi terhadap suatu kondisi yang tidak umum); 2) *Complex communication skills* (keterampilan dalam memproses dan menginterpretasi informasi baik secara verbal maupun non verbal). 3) *Non-routine problem solving* (kemampuan dalam menyelesaikan

masalah yang tidak umum). 4) *Self management and self development* (kecakapan untuk bekerja dalam kelompok maupun sendiri secara otomatis); *System thinking* (kecakapan untuk memahami kerja seluruh sistem bagaimana pengaruhnya dari suatu tindakan perubahan terhadap sistem).

Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan bagian dari budaya suatu warga yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa rakyat itu sendiri. Kearifan lokal umumnya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari ekspresi ke verbal. Kearifan lokal terdapat pada cerita warga, peribahasa, lagu, dan permainan warga. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh warga lokal tertentu melalui deretan pengalaman dalam mencoba yang diintegrasikan memaknai pemahaman terhadap budaya serta keadaan alam suatu kawasan (Baedowi, 2015). Pendapat lain mengungkapkan bahwa kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta aneka macam seni manajemen kehidupan yang diwujudkan melalui aktivitas masyarakat lokal untuk menjawab berbagai problematika pemenuhan kebutuhan. Dalam bahasa asing seringkali pula dikonsepsikan menjadi pengetahuan setempat/lokal atau eksistensi setempat.

Menurut Zulkarnain & Febriamansyah, (2008), terminology kearifan lokal berasal dari pandangan budaya bisa dicermati menjadi pengetahuan lokal dari budaya warga, unik, memiliki hubungan menggunakan alam berdasarkan sejarah yang panjang, mengikuti keadaan menggunakan sistem ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka terhadap pengetahuan baru. Mukti, (2010), menyatakan bahwa secara khusus kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan lokal, unik yang asal berasal budaya warga setempat dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada di tingkat lokal pada bidang pertanian, kesehatan, penyediaan kuliner, pendidikan, pengelolaan sumberdaya alam, dan beragam aktivitas lainnya pada komunitas-komunitas.

Kearifan lokal merupakan suatu pola kebiasaan yang terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu yang relatif lama. Dengan demikian bisa diartikan bahwa kearifan lokal memiliki keeratn hubungan dengan kebudayaan. Menurut Taylor, (2019), bahwa kebudayaan adalah keseluruhan aspek budaya yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, aturan, adat istiadat, dan norma-norma serta kemampuan-kemampuan lainnya pada manusia yang diperoleh sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka bisa disimpulkan bahwa

kearifan lokal ialah gagasan yang muncul dan berkembang disuatu wilayah dikenal sebagai norma adat, tata hukum/adat, nilai, budaya, kepercayaan, dan norma kehidupan sehari-hari. Penerapan kearifan lokal dalam proses pembelajaran Fisika bertujuan untuk meningkatkan penguasaan konsep peserta didik dengan menggali dan mencari informasi keadaan lingkungan fisik atau norma-norma yang ada pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat diaplikasikan dalam kelas pembelajaran Fisika. Hal mempengaruhi peserta didik dalam mengingat dan memahami materi pembelajaran karena konsep ini sering dialami oleh peserta didik itu.

Provinsi Maluku terdiri dari 11 Kabupaten/Kota termasuk dalam wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal dimana sebagian besar penduduk mendiami pulau besar dan kecil yang dipisahkan oleh laut dan selat. Laut pulau merupakan sebuah konsep pengembangan kepulauan yang terintegrasi dan sebagai perpaduan laut dan pulau-pulau maupun wilayah sekitarnya menjadi satu kesatuan utuh termasuk didalamnya potensi sumberdaya alam dan manusia penghuni pulau. Provinsi ini terbagi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota dan terdapat 118 kecamatan yang terdiri dari 35 kelurahan dan 1.198 desa maupun negeri. Jumlah penduduk terbesar berada di ibukota provinsi Kota Ambon, sedangkan wilayah terluas yaitu Kabupaten Maluku Tengah (Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2021). Tuhulele, (2009), mengatakan bahwa provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang secara geografis memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan dengan daratan, serta jumlah pulau mencapai 976 buah. Penduduk Maluku sebagian besar menempati wilayah pesisir pada pulau besar maupun kecil. Adanya persebaran penduduk pada wilayah pesisir menunjukkan bahwa masyarakat ini memiliki keragaman kearifan lokal. Masing-masing gugus pulau-pulau ini memiliki ciri khas tersendiri yang telah diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal yang dimiliki oleh penduduk setempat dapat memberikan inspirasi bagi pengayaan dan pengembangan bahan ajar Fisika. Nilai-nilai tradisional dalam budaya lokal ini perlu dilestarikan dan digunakan dalam pengembangan bahan ajar mata ajaran Fisika. Hal ini selaras dengan visi dari Universitas Pattimura untuk menjadi Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia, Ilmu pengetahuan, Teknologi, dan Seni yang Unggul, Berkarakter, Berbudaya, dan Berbasis laut pulau.

Salah satu budaya kearifan lokal pada masyarakat di wilayah pesisir di Maluku yang terus menerus dilestarikan adalah tradisi Timba Laor. Tradisi Timba Laor masih dipertahankan oleh warga Negeri Allang sebagai salah satu pola hidup sehari-hari yang

telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Arti dari Timba Laor merupakan kegiatan manusia untuk menangkap cacing laut. Tradisi ini merupakan berkat alam yang luar biasa bagi warga Negeri Allang dan telah dikenal sejak ratusan tahun lalu yang terus dilestarikan sampai saat ini. "Laor" adalah sejenis cacing laut dalam bahasa ilmiahnya *Lycde oele* termasuk dalam kelas *Polychaeta*, Filum *Anelida*. Hewan ini biasanya muncul saat terjadi purnama pasang tertinggi pada daerah pantai yang berkarang. Laor adalah salah satu hewan alternatif yang secara turun temurun sangat diminati oleh warga Negeri Allang. Hal ini disebabkan oleh gizi protein hewan tersebut yang tinggi sehingga oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai makanan bergizi. Hewan ini muncul diduga disebabkan oleh adanya dorongan pasang surut air laut dan kadar garam. Hewan ini biasanya melakukan proses reproduksi dipengaruhi oleh transisi perubahan musim panas (barat) ke musim hujan (timur). Proses ini biasanya terjadi pada bulan Maret atau April. Sebelum munculnya binatang ini, merupakan hari terpanas dalam satu tahun. Kejadian ini dijuluki oleh penduduk lokal sebagai panas Laor. Sedangkan malam hari saat cuaca panas terjadi panas Laor berlangsung selama 3 hari setelah bulan purnama.

Metode Penelitian

Penelitian ini ialah pada jenis penelitian dan pengembangan model. Model pengembangan penelitian ini merujuk pada model pengembangan pendidikan berdasarkan Plomp, (1997). Secara garis besar model ini dikelompokkan atas 3 tahapan besar. Tahapan-tahapan ini diuraikan sebagai berikut: 1) pengembangan perangkat pembelajaran Fisika SMA berbasis STEM terintegrasi kearifan lokal Kabupaten Maluku Tengah; 2) Uji model melalui survei terhadap guru-guru Fisika untuk memvalidasi secara empirik perangkat pembelajaran yang telah disusun, dianalisis, dan direvisi. Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Allang, kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, berlangsung selama 2 tahun. Tahun pertama, dilakukan uji coba subjek terbatas terhadap 8 orang guru Fisika SMA di Kabupaten Maluku Tengah. Data dikumpulkan dengan menggunakan: (a) lembar pengamatan kearifan lokal; (b) format keterkaitan STEM dengan kearifan lokal serta kaitannya dengan konsep Fisika SMA; (c) kuesioner untuk guru, berisikan pertanyaan atau pernyataan berkaitan dengan evaluasi diri terhadap penggunaan perangkat pembelajaran Fisika; (d) lembar penilaian perangkat pembelajaran; dan (e) kuesioner untuk validasi empirik perangkat pembelajaran yang

telah disusun terhadap. Perangkat-perangkat ini sebelum digunakan terlebih divalidasi dahulu oleh pakar (ahli). Analisis data hasil penelitian menggunakan statistik deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Setiap kegiatan penelitian, uraian hasil dan pembahasan disesuaikan dengan langkah-langkah penelitian yaitu *Preliminary investigation*; 2) *Design*; 3) *Realization/construction*; 4) *Test, evaluation, and revision*. Tahap awal kegiatan adalah mengumpulkan data dan informasi terkait kearifan lokal Timba Laor di Negeri Allang, analisis keterkaitan antara kearifan lokal penduduk setempat dengan konsep Fisika, dan pemanfaatan kearifan lokal dalam pembelajaran Fisika berbasis STEM. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan kajian artikel tentang kearifan lokal masyarakat setempat. Hasil observasi dan wawancara selanjutnya oleh Tim dan masyarakat setempat didiskusikan bersama dalam bentuk focus grup untuk menentukan keterkaitan antara kearifan lokal dengan konsep pembelajaran Fisika berbasis STEM. Konsep pembelajaran Fisika yang digunakan berhubungan dengan kearifan lokal Timba Laor adalah konsep usaha dan energi (SMA Kelas X). Observasi dan wawancara khusus terhadap guru mata pelajaran Fisika juga telah dilaksanakan pada salah satu SMA di Kecamatan Leihitu Barat terkait dengan topik penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik tidak pernah menggunakan kearifan dalam pembelajaran ilmu Fisika berbasis STEM. Hal ini dikarenakan tidak adanya informasi dari pendidik ini tentang pemanfaatan budaya kearifan lokal yang dapat dilaksanakan dalam pembelajaran. Instruktur juga merasa tertarik dan bersedia memanfaatkan materi ini dalam siklus pembelajaran karena hal ini oleh siswa di lingkungan tempat tinggalnya. Cara ini sangat baik karena budaya kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Seorang pendidik harus memiliki pilihan untuk membuat jenis materi pembelajaran yang menarik sehingga siswa tertarik untuk mempelajari dan ada peningkatan dalam pembelajaran (Rahmayanti, Wati, dan Mastung, 2017).

Inovasi pembelajaran Fisika semakin menarik jika materi yang diajarkan sebagai sarana sumber belajar terkait dengan aktivitas sehari-hari pebelajar. Peserta didik difasilitasi dalam pembelajaran Fisika oleh guru melalui pemanfaatan sumber-sumber belajar yang berhubungan dengan kearifan lokal penduduk setempat. Selanjutnya dari

hasil investigasi awal ini akan dijadikan sebagai dasar untuk merancang tahap awal pembuatan desain perangkat pembelajaran Fisika konsep Usaha dan Energi berbasis STEM terintegrasi kearifan lokal Timba Laor. Kegiatan yang telah dilakukan adalah merancang perangkat pembelajaran melalui analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL), mengembangkan Silabus, mengembangkan RPP, dan mengembangkan LKPD.

Tahapan desain (*design*) merupakan kegiatan lanjutan pada tahap perancangan. Pada tahap ini dihasilkan prototipe 1 (awal) sebagai realisasi hasil perancangan perangkat pembelajaran Fisika konsep Usaha dan Energi berbasis STEM terintegrasi kearifan lokal Timba Laor. Tahapan fase-fase yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Menyusun konsep Fisika terkait dengan kearifan lokal untuk digunakan dalam analisis SKL.
2. Membagi kearifan lokal sesuai dengan IPK pada konsep yang diajarkan dan disesuaikan juga dengan sintaks/langkah-langkah pembelajaran berbasis STEM.
3. Mengembangkan perangkat pembelajaran Fisika konsep Usaha dan Energi berbasis STEM terintegrasi kearifan lokal Timba Laor. Perangkat pembelajaran ini selanjutnya dirancang sesuai desain yang sudah dibuat pada tahap perencanaan.

Model perangkat pembelajaran ini dikonstruksi dan diteliti kembali apakah sudah memenuhi kecukupan teori-teori pendukung model dan telah diterapkan dengan baik pada setiap komponen-komponen model yang siap diuji validasi oleh para ahli dan praktisi berdasarkan sudut rasional teoritis serta kekonsistenan konstruksi. Pada tahap ini, didapatkan prototipe 1 sebagai bagian terintegrasi. Contoh prototipe 1, yakni realisasi hasil perancangan pembelajaran Fisika konsep usaha dan energi berbasis STEM terintegrasi kearifan lokal Timba Laor di Negeri Allang, kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Hasil-hasil konstruksi ini diteliti kembali apakah perangkat pembelajaran telah memperlihatkan secara operasional sintaks pembelajaran STEM, apakah teori-teori pendukung telah diterapkan dengan baik, dan apakah siswa difasilitasi pembelajarannya dengan mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan berbasis kearifan lokal. Jika hal ini sudah bisa terjawab maka langkah berikutnya adalah melakukan uji validasi perangkat pembelajaran, rasionalitas, teoritis, dan kekonsistenan konstruksinya oleh para pakar maupun praktisi.

Pada tahapan *test, evaluation, and revision*; ada 2 kegiatan utama yang dilakukan antara lain: a) kegiatan validasi oleh pakar terkait konten Fisika dan

pembelajaran; (b) melakukan ujicoba lapangan prototipe model hasil validasi. Kegiatan validasi ini dilakukan memakai lembar validasi yang sudah divalidasi terlebih dahulu oleh para pakar untuk menguji kelayakan instrumen-instrumen tersebut untuk mengukur aspek-aspek yang telah ditetapkan, ditinjau dari kejelasan tujuan pengukuran yang dirumuskan, kesesuaian butir-butir pertanyaan setiap aspek, penggunaan bahasa, dan kejelasan petunjuk penggunaan instrumen.

Kegiatan validasi isi dan konstruksi model dilakukan oleh tim pakar dan praktisi terhadap perangkat pembelajaran maupun instrumen. Para ahli bertindak sebagai validator konten Fisika dan pendidikan Fisika, sedangkan guru Fisika bertindak sebagai praktisi. Validasi perlu dilakukan untuk meminta pertimbangan ahli dan praktisi tentang kelayakan draft perangkat pembelajaran (prototipe 1) yang telah direalisasikan. Hasil validasi yang telah disarankan oleh pakar dan praktisi digunakan sebagai landasan penyempurnaan atau revisi model. Hasil validasi yang dilakukan oleh ke (8) delapan validator bersifat valid dengan sedikit revisi. Saran dan masukan yang diusulkan oleh para validator terkait operasional sintaks dan produk STEM dalam RPP dan LKPD maupun tampilan gambar-gambar. Validator menyarankan untuk mengaitkan kejelasan antara gambar-gambar dan keterkaitan peristiwa kearifan lokal dengan konsep Fisika Usaha dan Energi. Selanjutnya setelah dilakukan revisi atas masukan dari para validator untuk menyempurnakan perangkat pembelajaran. Dari hasil revisi perangkat pembelajaran dan validasi akhir merupakan produk penelitian tahun pertama yang siap diujicobakan pada tahun kedua.

Kesimpulan

Perangkat pembelajaran Fisika SMA konsep Usaha dan Energi berbasis *STEM* terintegrasi kearifan lokal Timba Laor di desa Allang Kabupaten Maluku Tengah hasil analisis dan revisi uji empirik dapat digunakan untuk uji coba skala kecil dan skala luas untuk menghasilkan produk hasil pengembangan.

Daftar Pustaka

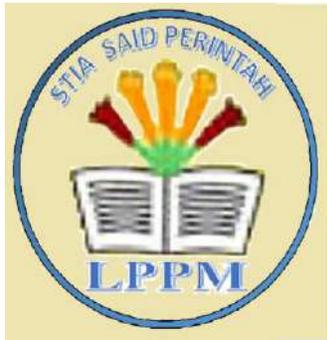
- AAAS. (1993). *Benchmarks for science literacy*. Oxford University Press.
- Akbar, S. (2013). *Instrumen Perangkat Pembelajaran*. Rosdakarya.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Provinsi Maluku 2021. In *Statistik Provinsi Maluku*. BPS Provinsi Maluku. file:///C:/Users/CHRISLEIWA/Downloads/Documents/Provinsi

- Maluku Dalam Angka 2021.pdf
- Baedowi, A. (2015). *Calak Edu 4: Esai-esai Pendidikan 2012-2014*. Pustaka Alvabet.
<https://books.google.co.id/books?id=gDSLcWAAQBAJ>
- Bybee, R. (2013). *STEM education challenges and opportunities*. Virginia: NSTA Press.
- Hartini, S., Misbah, Helda, & Dewantara, D. (2017). The effectiveness of physics learning material based on South Kalimantan lokal wisdom. *AIP Conference Proceedings*, 1868. <https://doi.org/10.1063/1.4995182>
- Ibrahim, M. (2014). Inovasi Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal. In S. N. "Sains dan I. P. B. K. Lokal" (Ed.), *Inovasi Pembelajaran Sains Berbasis Kearifan Lokal*. IKIP Mataram.
- International Technology Education Association. (2000). *STANDARDS FOR TECHNOLOGICAL LITERACY: Content for the Study of Technology* (p. 9).
- Kaniawati. (2019). *Implementasi Pembelajaran Fisika Berbasis STEM dalam Meningkatkan Kemampuan Abad 21*.
- Marrison, J. . (2006). *Attributes of STEM education: The students, the academy, the classroom*.
- Mukti, A. (2010). *Beberapa Kearifan Lokal Suku Dayak Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam* (p. 1). Brawijaya.
- National Committee on Science Education Standard. (1996). *National Science Education Standards*. NATIONAL ACADEMY PRESS.
- NRC. (2010). *National Science Education Standard*. Academic Press.
- Octavia, R. (2017). Bahan Ajar Berbasis Science, Technology, Engineering, Mathematics (Stem) untuk Mendukung Pembelajaran IPA Terpadu. *Jurnal Semesta Pendidikan IPA*, 32–36.
- Plomp, T. (1997). *Educational and Training System Design*. Twente University.
- Rahmayanti, P. ., Wati, M., & Mastuang. (2017). Pengembangan Modul Suhu dan Kalor Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Somatic, Auditory, Visual, and Intellegent (SAVI) untuk Siswa Kelas X SMA Negeri 7 Banjarmasin. *Berkala Ilmiah Fisika*, 4(3).
- Ratnasari, I., & Oktavianti, Y. (2018). Etnopedagogi dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar Melalui Media Berbasis Kearifan Lokal. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2353>
- Suastra, I. W. (2010). Model pembelajaran sains berbasis budaya lokal untuk

- mengembangkan kompetensi dasar sains dan nilai kearifan lokal di SMP 43(1). *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 43(1).
- Sukmana, W. . (2018). PENDEKATAN SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS (STEM) SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENGEMBANGKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.23969/jp.v2i2.798>
- Taylor, E. . (2019). *Religion and Culture* (L. T. S. Paul-François Tremlett, Graham Harvey (ed.)). Bloomsbury Academic.
- Tuhulele, P. (2009). *Pembakuan Nama Pulau Indonesia Upaya Mempertahankan Konsep Negara dan Kepulauan*. Gajah Mada.
- Utami, I. ., Firman, R., Septiyanto, Catur, F., Wibowo, & Suryana, A. (2017). *Pengembangan STEM-A (Science, Technology, Engineering, Mathematic and Animation) Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Fisika*. 6(1), 67–73. <https://doi.org/10.24042/jpifalbiruni.v6i1.1581>
- Zulkarnain, A. A., & Febriamansyah, R. (2008). Kearifan lokal dan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir. *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*, 1, 69–85.

Jakobus A. Rahajaan¹
Sarifa Niapele²

^{1,2}Prodi Ilmu Administrasi Negara STIA Said Perintah
jackyrahajaan@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This research is in the form of a juridical study of underage marriage. Using the normative legal research method, namely analyzing the provisions of the articles of laws and regulations related to the minimum age limit for a person who can be granted permission to have a marriage. The results of the research obtained are as follows: According to article 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which amends Article 7 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974, requires that the marriage is legal, if permitted by the parents of the parties, if the age of the prospective bride and groom has reached 19 years. On the other hand, the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) article 15 paragraph (1), have not revised the age limit of 19 years. This can lead to polemics in society that have the potential to lead to misinterpretation or ambiguity that can lead to unlawful practices, namely underage marriage. Furthermore, in paragraph (2) Article 7 of the Marriage Law Number 1974 as amended by Law Number 16 of 2019, provides space for underage marriages, namely in the form of dispensation for underage marriages. The weaknesses of this statutory regulation must be addressed immediately by revising article 15 paragraph (1) of the KHI, as well as the provisions of Article 1 of Law Number 16 of 2019, namely the provisions of Article 7 paragraphs (2) and (3), regarding the dispensation of underage marriages.

Keywords : Juridical Study, Marriage, Underage

Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap manusia berkeinginan untuk memenuhinya. Abraham H. Maslow, (1970) mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu;

1. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.
2. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu; kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.
3. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan diatas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
4. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian dan kebebasan.
5. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.

Berpedoman pada pendapat Maslow seperti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan

cara yang tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah perkawinan atau dikenal pula istilah pernikahan, tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki – laki dengan seorang wanita. Prawirohamidjojo dan Pohan, (2000) menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang–undang (yuridis) dan kebanyakan religius. Subekti, (2000) mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Pendapat Kaelani sebagaimana dikutip oleh Subekti, (2000) mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Untuk mewujudkan nilai-nilai luhur perkawinan, maka salah satu pertimbangan yang menjadi syarat sahnya perkawinan adalah batas umur minimal yang dipandang cukup matang jasmani dan rohani untuk berumahtangga.

Selama beberapa dekade, mulai dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2019, batas umur 16 tahun bagi wanita yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974), menjadi acuan bagi masyarakat, ketika hendak menikah. Lahirnya UU Perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun, telah menimbulkan konflik norma antara UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan sejak tahun 2003 sampai tahun 2019. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang dijadikan delik berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak.

Benturan dua UU yang sederajat (*Lex Specialis*) diranah hukum masing-masing (*Privat & Publik*), menimbulkan polemik dalam masyarakat. Masyarakat akhirnya mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 yang memohon perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut dengan mengeluarkan amar putusan

Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yang mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan kepada Pembentuk UU (DPR RI) untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam kurun waktu tersebut, DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati Perubahan atas Pasal 7 ayat UU No.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, terkait ketentuan batas minimal usia menikah bagi Laki-laki dan Perempuan, serta dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Perubahan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan menetapkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian konflik norma terkait batas usia minimal bagi wanita untuk kawin antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak telah teratasi, karena kini secara yuridis Laki-laki dan Perempuan baru boleh diizinkan kawin bila telah berumur 19 Tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga judicial dengan alasan-alasan yang kuat.

Di Indonesia, pernikahan dibawah umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dibawah umur. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka Perceraian diusia dini juga tinggi (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019).

Mencermati angka perkawinan dibawah umur yang masih memprihatinkan maka penulis mencoba melakukan kajian yuridis normatif terhadap peraturan perUndang-Undangan terkait batasan umur yang boleh diizinkan untuk kawin, khususnya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI, (2019) Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya, serta Kompilasi Hukum Islam.

Kerangka Teoritis

Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bahkan sakral dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari

kehidupan manusia itu sendiri, meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan kasih sayang dan persaudaraan, serta memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (Jakobus Anakletus Rahajaan, 2020). Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal (Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000).

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI, 1974). Selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Perkawinan di Indonesia dilangsungkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirobah sebagian pasal-pasal dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan Hukum Adat yang beragam.

Salah satu syarat Sahnya Perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara Sistem hukum perundang-undangan, hukum Adat dan Hukum Islam. Undang-Undang RI, (2019) tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas umur Minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 tahun, selanjutnya kompilasi hukum Islam masih menggunakan standar umur 16 tahun bagi seorang perempuan yang boleh diizinkan kawin, sedangkan dalam hukum adat yang sangat kompleks, terdapat berbagai kualifikasi batas umur yang boleh diizinkan kawin, biasanya ditandai dengan masa aqil balik (pubertas), seorang anak dianggap telah dewasa dan boleh diizinkan kawin jika telah mencapai masa pubertas. Bagi anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, tumbuhnya bulu-bulu, perubahan warna suara dan mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan, ditandai dengan dimulainya haid (menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas umur minimal ini pun mencuat dalam realitas perkawinan dibawah umur yang dilarang oleh ketentuan UU Perkawinan.

Konsep Tentang Anak

Usia seseorang sebagai subyek hukum, menjadi tolak ukur untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atau yang dialaminya. Pengertian *anak* adalah, keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin (Marsaid, 2015).

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak menjadi korban kekerasan. Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional (Ciptaningsih Utaryo, 2003). Pasal 91 ayat 4 KUHP memberikan penjelasan tentang anak adalah orang yang ada dibawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan orang tuanya (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993). Setelah lahirnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dalam Pasal 1 ayat 1 undang-undang ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jelaslah bahwa batasan usia kedewasaan seseorang menurut Undang–Undang Perlindungan anak ini adalah minimal 18 (delapan belas) Tahun. Anak yang belum mencapai usia 18 Tahun dianggap belum dewasa, berarti belum memiliki kecakapan hukum, termasuk untuk kawin.

Hal ini dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, untuk memberikan perlindungan kepada seorang anak sebagaimana layaknya, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam pasal 26 ayat 1 butir (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa; Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak–anak (dibawah 18 Tahun).

Untuk kualifikasi usia anak menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti norma-norma dan azas-azas hukum. Selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan (Bahder Johan Nasution, 2008). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primair, yaitu peraturan perUndang-Undangan, yang berikut, bahan hukum sekunder, yaitu referensi, buku rujukan, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, link berita dan lain sebagainya. Selanjutnya bahan hukum tertier seperti, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah *library research* atau studi dokumen/kepastakaan. Selanjutnya data-data kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Hukum Indonesia Terhadap Hukum Perkawinan.

Perkawinan dibawah umur atau sering disebut juga Perkawinan dini, adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang jasmani dan rohani terkait dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan spiritual. Perkawinan di Indonesia diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disamping itu terdapat pula ketentuan tentang Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Indonesia dengan beragam suku bangsa, adat dan budaya, juga mempunyai ketentuan-ketentuan mengenai Perkawinan.

Kompleksitas hukum perkawinan ini berakar dari Sistem hukum Indonesia yang menerapkan sistem hukum campuran (*mixed system*) dimana berlaku sistem hukum Perundang-undangan, hukum Adat, dan hukum Islam (Achmad Ali, 2009). Walaupun Hukum Indonesia didominasi oleh Civil law sebagai sistem hukum perundang-undangan yang diwariskan oleh Kolonial Belanda, namun sejak Kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam yang sempat dijajah pula oleh *civil law system*, kembali bangkit dan merdeka dengan segala eksistensinya, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum perundang-undangan.

Keragaman ketentuan tentang perkawinan akan mempengaruhi terbentuknya sebuah perkawinan, dan yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini adalah batas minimal usia Perkawinan yang bervariasi antara ketentuan dalam UU dengan KHI maupun dengan hukum adat. Hukum Adat merupakan Hukum Asli Bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai luhur yang diturunkan oleh leluhur dan biasanya dalam bentuk tidak tertulis (Dominikus Rato, 2011).

Kompleksitas hukum Perkawinan terkait batas umur minimal ini memicu multitafsir yang menimbulkan legal gap dalam masyarakat antara Hukum Perundang-undangan dengan Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat, yang berujung pada konflik hukum, semisal kasus perkawinan dibawah umur yang kemudian dijadikan delik.

Kontradiksi Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Sahnya Perkawinan menurut Hukum di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan antara lain dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 ini menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam ayat 2 diwajibkan setiap perkawinan dicatat oleh aparat Negara yang berwenang yang kemudian menerbitkan kutipan akta perkawinan ataupun buku nikah.

Syarat lain yakni, Perkawinan sah bila memenuhi azas Konsensualisme atau kesepakatan (persetujuan) para pihak, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) Tentang Perkawinan yang bunyinya, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Selanjutnya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). Ini berarti salah satu syarat Sahnya perkawinan adalah harus

mendapatkan izin kedua orang tua jika pasangan yang hendak kawin masih berumur dibawah 21 Tahun. Kemudian menurut Pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang RI, 1974) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI, (2019) yang mensyaratkan bahwa sebuah perkawinan sah bila diizinkan oleh orang tua para pihak, jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI, (2019) ini kian memperkuat jaminan perlindungan terhadap anak karena memberikan batas umur minimal setahun lebih tinggi daripada batas umur anak yang ditetapkan oleh UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kontradiksi terjadi ketika kami temukan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat 1, dikatakan bahwa, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun. Seterusnya dalam ayat ke 2 di sebutkan, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 yang masih menetapkan batas umur minimal bagi wanita yang hendak melangsungkan perkawinan adalah usia 16 tahun, berpotensi menimbulkan multitafsir terutama bagi kalangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan KHI, seolah – olah ada dualisme hukum dalam penentuan batas umur minimal bagi seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinannya. Sesungguhnya potensi multitafsir ini muncul dari pemahaman tiap-tiap orang terhadap hukum dan perundang-undangan itu berbeda-beda. Bagi orang yang belajar ilmu hukum mungkin saja paham bahwa ketentuan umur minimal 16 tahun bagi calon mempelai perempuan sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan KHI Pasal 15 ayat 1 itu secara otomatis tidak berlaku lagi setelah berlakunya ketentuan UU No.16 Tahun 2019 Pasal I Tentang Perubahan pasal 7 UU no. 1 Tahun 1974. Sehingga ketentuan pasal 15 ayat 2 terkait batas usia minimal bagi calon mempelai perempuan yakni 16 tahun tidak berlaku lagi dan kalangan hukum tentu

sangat paham hal ini, apalagi ada pula azas–azas hukum yang memperkuat, misalnya azas, *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Jadi ketentuan dalam UU tentang perkawinan jelas lebih tinggi kedudukannya daripada ketentuan KHI.

Kemudian ada pula azas, *Lex Posterior derogate Legi Priori*, hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Dengan demikian ketentuan Pasal I UU No.16 tahun 2019, tentang perubahan pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, akan mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tersebut, maupun ketentuan Pasal 15 ayat 1 KHI. Mungkin bagi kalangan hukum atau orang yang belajar ilmu hukum sangat memahami ketentuan perundang–undangan dan azas–azas hukum yang berlaku, namun bagaimanakah dengan kalangan awam atau orang yang tidak belajar ilmu hukum atau tidak paham akan perubahan–perubahan dalam peraturan perundang–undangan dan azas–azas hukum yang berlaku? Tentu akan bingung walaupun nantinya dapat dituntun oleh aparatur negara pada institusi yang melangsungkan pencatatan perkawinan, tapi tingkat profesionalitas aparatur ini pun berbeda–beda, dan indikator–indikator inilah yang mempengaruhi dinamika perkawinan dibawah umur masih cukup marak terjadi diberbagai pebsok tanah air Indonesia. Pemahaman masyarakat dan aparatur yang sangat bervariasi tingkat pengetahuannya ini berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku yaitu antara pasal–pasal dalam UU No.1 Tahun 1974, UU No.16 tahun 2019 dan KHI, terkait batas minimal umur seorang calon mempelai perempuan yang wajib mendapatkan izin jika hendak melangsungkan perkawinannya. Multi tafsir kemudian dapat menimbulkan pula potensi pelanggaran hukum berupa terjadinya banyak kasus perkawinan dibawah umur.

Kerancuan hukum dalam praktik hukum perkawinan ini dapat kita simak dalam beberapa kasus perkawinan dibawah umur yang viral dimedia sosial seperti kasus perkawinan Syech Pudji, seorang dewasa yg menikah Ulfa, seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Di Bantaeng – Sulawesi Selatan, selama empat bulan terakhir ada empat kasus perkawinan anak dibawah umur. Kasus pertama di Bantaeng terjadi pada April 2018, perkawinan bocah berusia 14 tahun dan 15 tahun. Permohonan dispensasi perkawinan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Belum genap sebulan, kembali terjadi kasus perkawinan dibawah umur lagi, tepatnya awal Mei 2018. Namun perkawinan tersebut batal karena penghulu takut berbenturan dengan hukum. Batalnya perkawinan

tersebut menimbulkan kerugian dan masalah bagi para pihak dari kedua mempelai (detik.com, 2020).

Selanjutnya yang ketiga, masih di Sulsel, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), DPPA Makassar menemukan perkawinan dibawah umur yang akan dilangsungkan di Kecamatan Manggala Makassar, dan perkawinan itu dibatalkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar melalui upaya mediasi. Informasi terbaru ada lagi perkawinan dibawah umur antara bocah laki-laki berusia 13 Tahun dan masih duduk dibangku sekolah dasar, menikahi gadis berusia 17 tahun yang masih duduk dibangku SMU. Perkawinan mereka digelar dengan pesta adat seperti perkawinan pada umumnya. Perkawinan tersebut dilakukan dengan cara nikah siri, sebab pihak KUA tidak diundang saat pernikahan tersebut dan tentunya pernikahan seperti ini tidak terdaftar di KUA. Demikian segelintir kasus perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini yang viral di media social (detik.com, 2020).

Belum disesuaikannya ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 dengan ketentuan pasal I UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 1, akan tetap menjadi masalah yang berpotensi terhadap pelanggaran hukum yaitu perkawinan dibawah umur sebagai sebuah perkawinan yang dianggap tidak legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu pengambil kebijakan di republik ini harus dapat segera menyeragamkan atau mengharmonisasikan berbagai peraturan terkait batasan usia dewasa seorang anak dan khususnya batasan minimal usia bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan, setidaknya, ketentuan pasal 15 ayat 1 KHI harus segera direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal I UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, agar masyarakat yang awam hukum dapat lebih jelas memahami maksud dari ketentuan perundang-undangan terbaru terkait umur minimal 19 Tahun bagi calon mempelai perempuan.

Namun akan lebih arif dan bijaksana lagi bila perihal dibahas ini, direspon oleh pengambil kebijakan dengan melakukan harmonisasi peraturan perUndang-Undangan, khususnya dalam pasal-pasal terkait batasan umur anak atau batasan usia dewasa maupun batasan minimal umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk kawin, misalnya diseragamkan umur 18 tahun ataukah 19 tahun, lakukanlah penyeragaman demikian sehingga tercipta pula harmonisasi peraturan perUndang-Undangan diantara

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah sebagian pasalnya dengan UU No.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi hukum Islam (KHI). Tercipta pula harmonisasi antara ranah hukum perdata dengan ranah hukum pidana, antara lapangan hukum perkawinan dengan lapangan hukum perlindungan anak serta harmonisasi antara ketentuan batas usia minimal perkawinan anatar UU perkawinan dengan kompilasi hukum Islam, maupun hukum adat yang begitu kompleks, sehingga secara substantif sistem hukum menjadi harmonis.

Penutup

Kesimpulan

Sebuah Perkawinan wajib mempertimbangkan kematangan jasmani dan rohani pasangan yang hendak kawin. Untuk itu Ketentuan UU Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal seseorang boleh diizinkan untuk kawin adalah umur 19 Tahun. Namun kenyataannya masih tinggi angka perkawinan dibawah umur di Indonesia bahkan Indonesia berada diperingkat kedua tertinggi di ASEAN. Hal ini memprihatinkan, padahal substansi hukum (UU Perkawinan) telah menetapkan batas umur minimal seseorang boleh diberikan izin untuk kawin adalah 19 tahun. Belum disesuaikannya ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 dengan ketentuan pasal I UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat 1, akan tetap menjadi masalah yang berpotensi terhadap pelanggaran hukum yaitu perkawinan dibawah umur sebagai sebuah perkawinan yang dianggap tidak legal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi kalangan hukum atau orang yang belajar ilmu hukum tentu paham bahwa secara yuridis ketentuan pasal 15 ayat 2 KHI ini telah gugur dan tidak belaku lagi sesuai dengan azas hukum *lex superior derogate legi inferiori*. Namun bagi masyarakat awam yang tidak paham azas-azas hukum, demikian pula dengan aparat yang kurang profesional, dapat menimbulkan potensi kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan hukum dan berakibat pada pelanggaran hukum memprihatinkan yaitu perkawinan dibawah umur. Belum lagi perbedaan pemahaman batas usia minimal perkawinan antara hukum perundang-undangan dengan hukum adat yang tidak dibahas secara mendalam disini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil kajian ini maka beberapa hal yang direkomendasikan antara lain;

1. Perlu dilakukan banyak sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait batasan umur bagi siapa dapat diberikan izin untuk melangsungkan sebuah perkawinan di Indonesia.
2. Pemangku kebijakan melakukan harmonisasi antara peraturan perundang – undangan, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya dengan kompilasi hukum Islam dan dengan Undang-Undang RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dengan menetapkan penyeragaman batasan umur anak dan batasan umur bagi siapa yang dapat diberikan izin untuk melangsung perkawinan adalah 18 tahun atau 19 tahun, dan segala ketentuan hukum-hukum adat terkait perihal tersebut harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pekanggaran terhadap ketentuan yang berlaku harus ditindak dengan sanksi yang tegas, baik secara administrasi, perdata maupun pidana.
3. Perlu dilakukan Harmonisasi Ketentuan hukum Perkawinan terkait batas minimal usia perkawinan, antara Hukum Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abraham H. Maslow. (1970). *Motivation and Personality*. New York: Harper & Row Publishers.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. (1993). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia (1st ed.)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ciptaningsih Utaryo. (2003). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*.

- Yogyakarta.
- detik.com. (2020). Nikah dibawah Umur. *www.Detik.Com*. Retrieved from <https://www.detik.com/tag/NIKAH-DI-BAWAH-UMUR>
- Dominikus Rato. (2011). *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Jakobus Anakletus Rahajaan. (2020). Legalitas Penikahan Siri di Indonesia. *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00217-0>
- Marsaid. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH (Studi Kasus Penanganan Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Jambi). *Nurani*, 15(2), 1–26. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/280>
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. (2000). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subekti. (2000). *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Undang-Undang RI. *Perkawinan*. , (1974).
- Undang-Undang RI. *Perubahan atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. , (2019).
- Undang-Undang RI 23 Tahun 2002. *Perlindungan Anak*. , (2002).

Cintya Meiske Idi¹
Johanis Darwin Borolla²
(Penulis Korespondensi)

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura
borolla703@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

The goal of this study is to decide how the effects of the analysis of predictions of financial distress using the Altman Z-score method with estimates for the period 2014-2018 on PT. Golden Plantation Tbk are determined. PT. Golden Plantation, which is a business engaged in the oil palm plantation industry with the type of data used, is the focus of this study, namely quantitative data in the form of the financial statements of PT. Golden Plantation for the period 2014 to 2018. And the Altman Z - Score Adjusted variabel approach is the data analysis method used in this study. It can be inferred that, based on the findings of the report, the organization started to encounter financial distress in 2014. In 2015 to 2018 the altman z - score of PT. Golden Plantation was <1.1 or a dangerous zone which means that PT. Golden Plantation Tbk is in a bankrupt condition. We can be sure that the company will also face financial problems in the next few years. This is attributable to the selection of debt used by the firm. The utilization of the company's existing debt tends to rise each year, exceeding the value of the company's current assets, so that the working capital of the company still has a negatif variabel. To Future research is suggested to add other variabels in examining financial distress.

Keywords : Financial Distress, Altman Z-Score

Pendahuluan

Pada dasarnya Perusahaan dibentuk untuk mencapai tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, memperoleh laba merupakan tujuan jangka pendek yang harus dicapai oleh perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan adalah tujuan jangka panjang sebuah perusahaan. Laba tercipta atas hasil dari Pendapatan atau penjualan perusahaan yang dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, biasanya perusahaan menggunakan laba yang diperoleh untuk mengembangkan dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Apabila target laba tidak mampu diperoleh, maka akan berdampak serius bagi perusahaan. Dalam jangka pendek bisa saja tidak terlalu berpengaruh, namun apabila perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan banyak kerugian, misalnya kemungkinan perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja atau mungkin yang lebih parah yaitu perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu membiayai aktivitasnya. Berpacu dari teori kebangkrutan Menurut (Mastuti S, 2003) kebangkrutan (*Bankruptcy*) biasanya diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. (Sartono, 2014) menyatakan bahwa salah satu penyebab kebangkrutan yaitu apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang akan jatuh tempo, dan apabila nilai *asset* lebih kecil dari pada nilai hutang, seperti yang dialami PT. Golden Plantation Tbk. Kebangkrutan biasanya berawal dari kesulitan keuangan (*financial distress*) yaitu dimulai ketika perusahaan gagal memenuhi pembayaran kewajibannya. *Financial Distress* dan tanda-tanda awal kebangkrutan dapat diketahui melalui analisis terhadap data yang terdapat dalam laporan keuangan. Faktor-faktor penyebab terjadinya *financial distress* adalah oleh faktor ekonomi, kesalahan dalam manajemen, dan bencana alam (Sudana, 2011).

Melalui kajian awal, peneliti menemukan beberapa indikator *financial distress* yang terlihat pada PT. Golden Plantation Tbk yaitu: 1). Memiliki kecenderungan kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan yang semakin menurun dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur; 2) Diindikasikan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi dan 3). Laba bersih (*net profit*) perusahaan bernilai negatif.

Untuk terhindar dari hal tersebut, seorang manajer harus selalu berusaha agar perusahaannya dapat berjalan dengan baik. Kondisi keuangan merupakan faktor penting

yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui sejauh apakah perusahaan mampu menjaga kelancaran operasi agar tidak terganggu. Salah satu cara mengetahui kondisi atau keadaan suatu perusahaan adalah dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan serta hasil-hasil yang telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah diterapkan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kebangkrutan yaitu dengan menggunakan metode Altman *z-score*.

PT. Golden Plantation, mengalami penurunan Produksi tanda buah pada tahun 2018 sebesar 16, 143 MT dibanding tahun 2017 yang mencapai 36,931 MT. Diduga turunya harga minyak sawit di pasaran, menyebabkan penjualan yang dilakukan PT. Golden Plantation menurun, sehingga produksi yang buruk dan penjualan yang menurun berimbas pada kinerja keuangan perusahaan dalam hal memperoleh laba. Selain itu terjadi kenaikan kurs yang membuat nilai rupiah melemah sehingga melonjaknya biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan, Hal ini menjadi permasalahan lainnya yang menyebabkan perusahaan kewalahan dalam membayar kewajiban karena harus membayar biaya yang besar untuk biaya utang. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel Laba/Rugi dan Penjualan 2014-2018
(per 31 Desember)**

Tahun	Laba /Rugi (Rp)	%	Penjualan (Rp)	%
2014	6,719,921,719	-	137,617,015,544	-
2015	(16,376,054,178)	(44%)	128,703,398,359	(6%)
2016	7,997,434,060	49%	94,111,177,843	(27%)
2017	(34,943,115,769)	(37%)	214,860,495,031	8%
2018	(131,123,521,988)	(79%)	98,391,684,290	(54%)

Sumber; www.idx.co.id

Data diatas menunjukkan bagaimana kondisi naik turun laba/rugi yang dialami perusahaan dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 perusahaan mengalami kerugian sebesar 44% dari laba yang diperoleh tahun 2014, hal ini terjadi akibat naiknya harga minyak kelapa sawit di pasaran. Pada tahun 2016 perusahaan mampu mengatasi hal tersebut, sehingga perusahaan kembali memperoleh laba yang artinya kerugian yang terjadi pada tahun 2015 berkurang 49% pada, namun sampai pada 2017 perusahaan kembali mengalami kerugian sebesar 37% dari laba yang diperoleh pada 2016, diduga peningkatan volume penjualan menjadi masalah bagi perusahaan dengan

harga kelapa sawit yang sedang naik dipasaran. Pada tahun 2018 perusahaan kembali mengalami kerugian sebesar 79% dari kerugian yang terjadi pada tahun 2017, diduga kinerja produksi dan penjualan yang memburuk berimbas pada kinerja keuangan yang juga mengalami penurunan. Pada 2018, penjualan bersih PT. Golden Plantation hanya menyentuh Rp. 98,3 miliar atau 54% dibandingkan tahun 2017 yang mampu mencapai Rp. 214,8 miliar. Perusahaan menargetkan penjualan sebesar Rp.246 miliar untuk tahun 2017 dan membukukan penjualan sebesar Rp.214,8 miliar. Perbedaan yang terjadi terutama karena jumlah produksi TBS dan CPO dibawah target diakibatkan terbatasnya dana yang dapat dialokasikan untuk pemeliharaan tanaman dan mengoptimalkan panen.

Perbandingan Total *Asset* dari Tahun 2014 – 2018

Tahun	Total <i>asset</i> lancar (Rp)	%	Total <i>asset</i> tetap (Rp)	%
2014	577,378,457,455		1,397,916,854,346	-
2015	146,531,271,703	75%	2,016,989,210,358	7%
2016	74,081,742,748	(49%)	2,301,960,937,928	6%
2017	58.044.412.244	(22%)	2.413.153.748.986	5%
2018	55.020.622.698	(7%)	2.540.663.606.435	5%

Sumber; www.idx.co.id

Data diatas menunjukkan perubahan penggunaan *asset* dan utang dari 5 tahun belakangan, dilihat pada kolom aset lancar yang dimiliki perusahaan dari tahun 2014 sampai pada tahun 2018 terus menurun, dapat terlihat pada kolom Aset tetap, pada tahun 2014 sampai pada tahun 2018 Aset tetap terus naik . Diakhir tahun 2017, total *Asset* tetap Perseroan naik menjadi Rp. 2,41 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan investasi tanaman yang belum menghasilkan. Pada tahun 2015 diduga perusahaan mulai kesulitan pendanaan dikarenakan nilai *asset* lancar yang kecil dibandingkan nilai utang jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki perusahaan sampai pada 2018. Data *liabilitas* dapat dilihat pada tabel berikut.

Perbandingan Total *Liabilitas* dari Tahun 2014 – 2018

Tahun	<i>Liabilitas</i> jangka pendek (Rp)	%	<i>Liabilitas</i> jangka panjang (Rp)	%
2014	78,161,525,105	-	964,222,742,955	-
2015	177,752,061,184	7%	1,066,217,030,541	9%
2016	174,007,074,307	3%	1,228,226,371,116	5%
2017	456,335,199,382	62%	1,077,143,162,033	(2%)
2018	1.515.466.917.089	32%	269.501.150.790	(75%)

Sumber; www.idx.co.id

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dimulai pada tahun 2015 penggunaan utang jangka pendek yang digunakan naik 7% dari tahun 2014, pada tahun 2016 terjadi penurunan utang (*liabilitas*) jangka pendek yaitu sebesar 3% dari tahun 2015. Pada

tahun 2017 penggunaan utang jangka pendek kembali bertambah 62% dari tahun 2016, pada tahun 2018 utang (*liabilitas*) jangka pendek yang dimiliki perusahaan terus naik bertambah 32% dari utang yang digunakan tahun 2017 hal ini tentu saja akan menjadi masalah bagi perusahaan, diikuti dengan kenaikan kurs, akan membuat perusahaan semakin kewalahan dalam memenuhi kewajiban. Dapat dilihat juga penggunaan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan, pada tahun 2015 penggunaan utang perusahaan bertambah 9% dari tahun 2014, kembali utang jangka panjang bertambah 5% pada tahun 2016. Perusahaan berusaha memenuhi utang jangka panjang sehingga pada tahun 2017 utang jangka panjang berkurang 12% dan tahun 2018 utang berkurang 75%. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka permasalahan yang dapat di rumuskan yaitu: Bagaimana hasil *Financial Distress* PT Golden Platation dengan menggunakan metode altman z- score?

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis Penelitian

Financial Distress

Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih dan nilai buku ekuitas serta perusahaan tersebut melakukan merger (Brahmana, 2007). Fenomena lain dari *financial distress* adalah perusahaan cenderung mengalami kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan yang semakin menurun dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Hanifah & Purwanto, 2013) *financial distress* juga terjadi ketika perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Apabila terus mengalami laba bersih (*net profit*) negatif selama beberapa tahun.

Indikasi terjadinya *financial distress* lainnya yaitu kondisi dimana perusahaan mengalami *delisted* akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan tersebut telah demerger (Almilia & Kristijadi, 2003) banyak faktor yang dapat menyebabkan perusahaan menghadapi *financial distress* yaitu antara lain kenaikan biaya operasi, ekspansi berlebihan, ketinggalan teknologi, kondisi persaingan, kondisi ekonomi, kelemahan manajemen perusahaan dan penurunan aktifitas

perdagangan industri (Whitaker, 1999) menyatakan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak buruk, kebanyakan perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah akibat dari kelemahan manajemen. Indikator yang menunjukkan apakah suatu perusahaan mengalami *financial distress* antara lain jika selama 2 tahun mengalami laba bersih operasi negatif dan selama lebih dari 1 tahun tidak melakukan pembayaran dividen, (Almilia & Kristijadi, 2003) mendefinisikan *financial distress* jika perusahaan mengalami *net income* negatif selama 3 tahun.

Pengukuran financial distress dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu Springate, Zmijewski, dan salah satu model kesulitan keuangan yang paling terkenal adalah Altman *Z-score*. Metode *Z-score* Altman merupakan indikator untuk mengukur potensi kebangkrutan (*financial distress*) suatu perusahaan. *Z-score* dikembangkan oleh Edward I Altman, Ph.D, seorang profesor dan ekonom keuangan dari New York University's Stern School of Business pada tahun 1968.

Altman Z-Score

Model *Z-Score* adalah suatu model prediksi kebangkrutan yang ditemukan oleh Edward I. Altman tahun 1968. Model *Z-Score* menggunakan metode *Multiple 15 Discriminant Analysis* dengan lima jenis rasio keuangan. Model *Z-score* merupakan model yang memelopori model multi *discriminant analysis* dan telah digunakan secara luas diseluruh dunia. Menurut (Mastuti S, 2003) metode *Z-Score* adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Menurut (Hadi & Anggraeni, 2008), model prediksi Altman atau *Z-Score* merupakan prediktor terbaik diantara ketiga model prediksi kebangkrutan yaitu model Zmijewski dan model Springate. Model *Z-Score* ini pada dasarnya bertujuan untuk mencari nilai *Z*, nilai ini adalah nilai yang dapat menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan, apakah dalam kondisi sehat atau tidak sehat dan dapat menunjukkan kinerja perusahaan. Penggunaan model altman dalam mengukur Nilai *Z* pada setiap perusahaan *go public* maupun non *public*, altman terus memodifikasi rumus altman, berikut perkembangan metode altman *z – score*:

1. Model Altman pertama yaitu;

Edward I. Altman pada tahun 1967 mengukur kerentanan bisnis terhadap kegagalan dengan menggunakan statistik *multivariat*. Dia menggunakan sistem pembobotan dari lima rasio keuangan utama yang merilis hasilnya pada tahun 1968 sebagai model Altman *Z- Score* pertama dengan rumus;

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 0,999X_5$$

Menurut Altman nilai Z merupakan angka yang akan menjelaskan pada perusahaan apakah perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan maupun sedang mengalami kebangkrutan, pada Altman pertama nilai Z dikategorikan menjadi 3 yaitu;

- a. Jika nilai $Z < 1,8$ maka termasuk perusahaan yang bangkrut.
 - b. Jika nilai $1,8 < Z < 2,99$ maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
 - c. Jika nilai $Z > 2,99$ maka perusahaan tidak bangkrut.
2. Model Altman Z-*score* revisi (1983)

Altman mengembangkan dua model lanjutan Z *Score* dengan menggunakan sampel perusahaan swasta dan perusahaan non-manufaktur. Sehingga, model yang diupdate tersebut lebih relevan untuk semua perusahaan. Untuk perusahaan swasta, karena informasi harga saham tidak tersedia, Altman mengganti nilai pasar ekuitas (*Market Value Of Equity*) pada variabel X4 dengan nilai buku ekuitas (*book value of equity*) pemegang saham. Model Altman Z-*Score* untuk perusahaan swasta adalah:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,108X_3 + 0,42X_4 + 0,988X_5$$

Untuk Model revisi 1983, nilai Z-*Score* yang bagus untuk perusahaan swasta yaitu;

- a. Jika nilai $Z' < 1,23$ maka termasuk perusahaan yang bangkrut.
 - b. Jika nilai $1,23 < Z' < 2,9$ maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
 - c. Jika nilai $Z' > 2,9$ maka perusahaan tidak bangkrut.
3. Model Altman modifikasi (1984)

Seiring berjalannya waktu banyak peneliti yang memodifikasi Altman Z-*score* agar dapat lebih produktif terlebih saat digunakan dalam sektor industri tertentu. Dalam model terakhir ini rasio penjualan terhadap total aset dihilangkan dengan harapan bahwa dapat memberi efek industri. Selain menghilangkan rasio penjualan terhadap total aset, sampel yang digunakan diganti menjadi perusahaan dari negara berkembang dengan adanya perubahan dalam rumus Z-*Score* modifikasi menjadikan Z''-*Score* lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk perusahaan *go public* maupun perusahaan non *public*. Berikut rumus nilai Altman modifikasi;

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Adapun nilai Z yang digunakan sebagai acuan untuk mengkategorikan perusahaan pada model modifikasi ini yaitu;

- Jika nilai $Z'' < 1,1$ maka termasuk perusahaan yang bangkrut.
- Jika nilai $1,1 < Z'' < 2,6$ maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).
- Jika nilai $Z'' > 2,6$ maka Perusahaan tidak bermasalah dengan kondisi keuangan. (zona aman)

Altman menggunakan rasio-rasio keuangan dalam memprediksi *financial distress* perusahaan, yaitu modal kerja dibagi total aktiva, laba ditahan dibagi total aktiva, *Earning before interest and tax* dibagi total aktiva, nilai pasar saham dibagi nilai buku total hutang, dan penjualan dibagi dengan total aktif (Thohari, Sudjana, & A, 2015) Kebangkrutan yang menandakan suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan juga didefinisikan dalam berbagai pengertian yang dikemukakan oleh Weston & Copeland dalam penelitian oleh (Thohari et al., 2015) yaitu;

1. Kegagalan dalam Ekonomi. Kegagalan yang dimaksud adalah apabila pendapatan dari perusahaan tidak bisa menutupi semua biaya yang harus dikeluarkan, dengan kata lain bahwa persentase tingkat laba perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran biaya modalnya.
2. Kegagalan Keuangan yaitu insolvensi dimana terdapat dua jenis bentuk yakni *default* teknis yang apabila terjadi dalam suatu perusahaan gagal memenuhi syarat kinerja di dalam perusahaan seperti kondisi rasio aktiva lancar ataupun hutang lancar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Seiring berjalanya waktu banyak peneliti yang memodifikasi altman *z-score* agar dapat lebih produktif terlebih saat digunakan dalam sektor industri tertentu. Melihat latar belakang PT. Golden Plantation yang merupakan perusahaan *go public* yang bergerak dalam sektor perkebunan kelapa sawit maka peneliti memilih untuk menggunakan metode altman *z-score* modifikasi. Variabel-variabel atau rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam analisis diskriminan model Altman versi modifikasi empat variabel dalam (Agnes Sawir, 2000) yaitu;

1. *Net Working Capital to Total Assets* (WCTA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aktiva. Modal kerja bersih diperoleh dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan

kewajiban lancar. Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya.

2. *Retained Earnings to Total Assets* (RETA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan kata lain, laba ditahan menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Dengan demikian, laba ditahan yang dilaporkan dalam neraca bukan merupakan kas dan tidak tersedia untuk pembayaran dividen atau yang lain.
3. *Earnings Before Interest and Tax to Total Assets* (EBITTA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva perusahaan, sebelum pembayaran bunga dan pajak.
4. *Book Value of Equity to Book Value of Liabilities* ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengetahui besarnya modal perusahaan yang digunakan untuk menanggung beban hutang dalam jangka panjang. Metode ini diformulasikan sebagai berikut;

$$Z_i = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Dimana;

X_1 = (Aktiva lancar-utang lancar)/total aktiva

X_2 = Laba yang ditahan/total aktiva

X_3 = Laba sebelum bunga dan pajak/total aktiva

X_4 = Nilai buku ekuitas/nilai buku hutang

Setelah serangkaian rasio keuangan perhitungan metode *z-score* dilakukan, maka akan menghasilkan angka yang memiliki penjabaran atau interpretasi tertentu.

Interpretasi Nilai Z-Score Model Altman

Nilai z-socer	Interprestasi
$Z > 2,6$	Perusahaan tidak bermasalah dengan kondisi keuangan. (zona aman)
$1,1 < Z < 2,6$	Kondisi keuangan Perusahaan tidak baik, namun akan mengalami permasalahan jika tidak segera memperbaiki (zona abu – abu / grey)
$Z < 1, 1$	Perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. (zona berbahaya)

Hipotesis Penelitian

Dalam sebuah perusahaan, adanya kebijakan yang sering diambil oleh pihak internal demi keberlangsungan perusahaan. Agar dapat mengambil kebijakan yang baik untuk perusahaan maka penting bagi sebuah perusahaan untuk menata dengan baik segala aktivitas. Salah satunya adalah penyusunan laporan keuangan, dimana segala pencapaian perusahaan akan tercatat. Laporan keuangan dapat tercatat dalam bentuk triwulan, maupun tahunan. Dari laporan keuangan perusahaan dapat melihat dan meninjau kembali bagaimana perkembangan perusahaan selama tahun berjalan. Ada berbagai macam cara agar dapat melihat perkembangan dan kondisi perusahaan, salah satunya menganalisis *financial distress* dari sebuah perusahaan.

Terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk menganalisis *financial distress*, salah satunya yaitu menggunakan metode Altman *Z-score* dari hasil analisis metode ini maka perusahaan dapat melihat bagaimana kondisi perusahaan, agar terhindar dari masalah serius, dan jika perusahaan berada dalam kondisi bermasalah serius maka perusahaan harus mengambil langkah yang bijak untuk mengatasi masalah yang ada dan melihat kembali hal apa yang menjadi masalah bagi perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah PT. Golden Plantation, Tbk berada dalam kondisi *financial distress*.

Metode Penelitian

Objek Penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu PT. Golden Plantation, Tbk dengan periode 2014 - 2018 dengan menggunakan metode Altman's *Z-Score*. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan PT. Golden Plantation Tbk periode 2014 - 2018 (www.idx.com). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel rasio keuangan (rasio likuiditas yakni *current ratio*; rasio profitabilitas yakni rasio laba ditahan dan rasio leverage; serta rasio solvabilitas). Metode analisis yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan Metode Altman *Z-Score* dengan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa data laporan neraca dan laba rugi. Hasil dari perhitungan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio – rasio dalam model *z – score* dengan Formulasi Altman yaitu; $Z_i = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$.

Hasil dan Pembahasan

Net Working Capital to Total Asset (X1)

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aktiva. Modal kerja bersih diperoleh dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Modal kerja bersih yang negatif kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Berikut adalah tabel mencari Modal kerja (*Net Working Capital* PT. Golden Plantation, Tbk periode 2014 sampai pada 2018).

Net Working Capital (Modal Kerja) Periode 2014 – 2018 **(dalam Rupiah penuh)**

Tahun	<i>Asset</i> Lancar	Hutang lancar	<i>Net Working Capital</i>
2014	577,378,457,455	78,161,525,105	499,216,932,350
2015	146,531,271,703	177,752,061,184	(31,220,789,481)
2016	74,081,742,748	174,007,074,307	(99,925,331,559)
2017	58,044,412,244	456,335,199,382	(398,290,787,138)
2018	55,020,622,698	1,514,466,917,089	(1,459,446,294,391)

Sumber: Olah data sekunder

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa perseroan pada tahun 2014 memiliki nilai *net working capital* yang positif yaitu sebesar 499,216 yang dapat diartikan bahwa pada tahun 2014 perseroan masih mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Namun pada tahun 2015 *Asset* lancar perusahaan menurun, diikuti utang lancar perseroan juga meningkat sehingga menghasilkan nilai negatif pada *net working capital* yang dapat diartikan bahwa dengan kondisi tersebut PT. Golden Plantation menghadapi kesulitan membayar hutang lancar yang dimiliki.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016-2018 nilai aset lancar yang dimiliki perseroan terus menurun, sedangkan hutang lancar terus meningkat, sehingga pada 3 tahun tersebut nilai modal kerja perseroan bernilai negatif. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2016, 2017 sampai 2018 perusahaan tidak mampu mengatasi hutang lancar yang dimiliki. Hal tersebut menandakan adanya kecenderungan memiliki masalah *financial distress* yang serius. Berikut adalah Hasil perhitungan X1 (*net working capital to total asset*) pada PT. Golden Plantation.

**Net Working Capital to Total Aset (X1) Periode 2014 – 2018
(dalam Rupiah penuh)**

Tahun	Net Working Capital	Total Aset	Net working Capital
			Total Asset X1
2014	499,216,932,350	1,975,295,311,801	0.252730278
2015	(31,220,789,481)	2,163,520,482,061	(0.01443055)
2016	(99,925,331,559)	2,376,042,680,676	(0.042055361)
2017	(398,290,787,138)	2,471,198,161,230	(0.161173148)
2018	(1,459,446,294,391)	2,595,684,229,133	(0.562258798)

Sumber: Olah data sekunder

Dikutip dari (Fitriyah & Hariyati, 2013) yang mengatakan *Working Capital to Total Assets* (WCTA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Modal kerja bersih yang positif memiliki kemungkinan kecil menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai negatif memiliki kemungkinan yang besar menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hasil rasio X1 bernilai positif Namun tahun 2015-2018 PT Golden Plantation memiliki nilai X1 negative. Sehingga dapat diartikan bahwa pada tahun 2014 PT Golden Plantation masih mampu menghasilkan modal kerja bersih, namun pada tahun 2015-2018 mempunyai nilai modal kerja *negative* dengan kemungkinan akan kesulitan menutupi kewajiban Perseroan.

Retained Earnings to Total Asset (X2)

Retained Earnings to Total Assets (RETA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham atau laba ditahan menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Dengan demikian, laba ditahan yang dilaporkan dalam neraca bukan merupakan kas dan tidak tersedia untuk pembayaran dividen atau yang lain. Hasil perhitungan X2 pada PT. Golden Plantation dapat dilihat berikut ini.

**Retained Earnings to Total Assets (X2) Periode 2014-2018
(dalam Rupiah penuh)**

Tahun	Laba ditahan (Retained Earnings)	Total Asset	Retained Earnings
			Total Asset X2
2014	9,386,749,386	1,975,295,311,801	0.004752074
2015	(3,270,459,719)	2,163,520,482,061	(0.001511638)
2016	(2,938,031,571)	2,376,042,680,676	(0.001236523)
2017	(30,916,383,627)	2,471,198,161,230	(0.012510686)
2018	(138,948,616,615)	2,595,684,229,133	(0.053530632)

Sumber: Olah data sekunder

Data diatas merupakan tabel perhitungan laba ditahan terhadap total *asset* berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Adi, Intan, & Rahmawati, 2015) menurut Altman, Perusahaan yang memiliki nilai laba ditahan yang tinggi juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membiayai asetnya melalui labanya sehingga tidak menggunakan hutang yang besar. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan berarti perusahaan memiliki laba yang tinggi untuk membiayai asetnya dan membayar deviden, sehingga akan menurunkan kemungkinan terjadinya *financial distress*. dari uraian tersebut maka dapat diartikan Pada tahun 2014 nilai rasio X2 menunjukkan 0.004. Pada tahun 2015 dan 2016 hasil rasio X2 menunjukkan -0.001 untuk tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2017 hasil rasio menunjukkan -0.012. Pada tahun 2018 hasil rasio menunjukkan -0.053. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 PT Golden Plantation mampu menghasilkan laba ditahan. Namun pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2018 nilai rasio X2 menunjukkan angka negative yang artinya Perseroan belum mampu menghasilkan laba, sehingga laba ditahan berniali negative, hal tersebut mengakibatkan pemkaian utang yang akan bertambah untuk membiayai kegiatan oprasional perseroan.

Earning Before Interest to Total Asset (X3)

Earnings Before Interest and Tax to Total Assets (EBITTA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva (*asset*) perusahaan, sebelum pembayaran bunga dan pajak. Hasil perhitungan X3 pada PT. Golden Plantation dapat dilihat berikut ini.

**EBITTA (X3) Periode 2014-2018
(dalam Rupiah penuh)**

Tahun	EBIT	Total Asset	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Total Asset}} \times 3$
2014	5,410,251,481	1,975,295,311,801	0.002738958
2015	(20,473,880,547)	2,163,520,482,061	(0.009463225)
2016	15,008,385,841	2,376,042,680,676	0.006316547
2017	(23,943,115,769)	2,471,198,161,230	(0.009688869)
2018	(131,123,521,988)	2,595,684,229,133	(0.050515976)

Sumber: Olah data sekunder

Data diatas menunjukkan Rasio laba sebelum pajak (EBIT) terhadap total asset dari PT Golden Plantation. Dikutip dari (Fitriyah & Hariyati, 2013) menurut (Brigham & Houston, 2014) *Earnings Before Interest and Tax to Total Assets* (EBITTA) atau *Basic Earning Power Ratio* menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi (laba dari aktiva perusahaan). Rasio EBITTA ini digunakan untuk mengukur kemampuan atau produktivitas *asset* dalam menghasilkan laba. Semakin rendah nilai rasio EBITTA menunjukkan rendahnya produktivitas aktiva dalam menghasilkan laba, semakin besar nilai rasio ini maka semakin efektif pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat diartikan sebagai berikut; pada tahun 2014 hasil Rasio X3 sebesar 0.002. Pada tahun 2015 hasil Rasio X3 yaitu -0.009. Pada tahun 2016 hasil Rasio X3 yaitu 0.006. Kemudian Pada tahun 2017 hasil Rasio X3 yaitu -0.009. Dan Pada tahun 2018 hasil Rasio X3 yaitu -0.050. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2016 perusahaan mampu mengelola *asset* yang dimiliki secara produktif dan masih mampu menyeimbangi biaya oprasionalnya. Namun, pada tahun 2015, 2017 dan 2018 memiliki hasil nilai rasio X3 dengan angka negatif yang dapat diartikan bahwa pada tahun tersebut biaya oprasional yang dimiliki perusahaan lebih besar, Sehingga kinerja perusahaan menjadi tidak produktif, hal ini dapat menjadi indikasi *financial distress*

Book Value of Equity to Book Value of Total Debt (X4)

Book Value of Equity to Book Value of Total Debt (Pasar Modal terhadap Total Hutang) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kewajiban jangka panjang dari nilai modal sendiri (saham biasa). Hasil perhitungan X4 pada PT. Golden Plantation dapat berikut ini.

**Book Value of Equity to Book Value of Total Debt (X4) Periode 2014-2018
(dalam Rupiah penuh)**

Tahun	Nilai Pasar Saham (EKUITAS)	Total Utang	<i>Book Value Equity</i>
			<i>book value of Total Debt X4</i>
2014	932,911,043,741	1,042,384,268,060	0.894978054
2015	919,551,390,336	1,243,969,091,725	0.739207587
2016	973,809,235,253	1,402,233,445,423	0.694470124
2017	937,719,799,815	1,533,478,361,415	0.611498553
2018	810,716,161,254	1,784,968,067,879	0.454190848

Sumber: Olah data sekunder

Data diatas menunjukkan hasil X4. Didasarkan penelitian terdahulu oleh (Adi et al., 2015) menurut Altman, Hal ini dikarenakan semakin rendah rasio ini mencerminkan semakin kecilnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang berasal dari modal sendiri, sehingga akan meningkatkan kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. dimana X4 rasio ekuitas terhadap total utang, PT Golden Plantation dari tahun 2014 – 2018, penjelasan sebagai berikut; Pada tahun 2014 rasio total ekuitas terhadap total total utang hasil rasio X4 yaitu 0.89. Pada tahun 2015 hasil rasio X4 yaitu 0.73, terlihat bahwa hasil X4 menurun dari tahun 2014. Pada tahun 2016 hasil rasio yaitu 0.69, pada tahun ini hasil X4 menurun dari pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2017 hasil rasio X4 kembali menurun dari tahun sebelumnya yaitu. Pada tahun 2018, total hasil rasio X4 yaitu 0.45 dapat dilihat juga bahwa hasil rasio X4 untuk tahun 2018 menurun dari tahun 2017. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT Golden Plantation mampu untuk memenuhi utang/kewajiban jangka panjang yang dimiliki dengan total ekuitas perseroan. Namun dapat terlihat juga, bahwa nilai rasio ekuitas terhadap total utang terus menurun dari tahun 2014 – 2015.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. Golden Plantation mampu untuk memenuhi utang/kewajiban jangka panjang yang dimiliki dengan total ekuitas perseroan. Namun dapat terlihat juga, bahwa nilai rasio ekuitas terhadap total utang terus menurun dari tahun 2014 – 2015.

Hasil Metode Altman Z-Score

Setelah hasil perhitungan dari semua rasio altman z-score pada PT. Golden Plantation diperoleh, kemudian setiap hasil dari masing-masing tahun akan dimasukkan dalam formulasi altman dan dikalikan dengan bobot masing-masing rasio altman z-

score. Hasil dari perhitungan penyesuaian formulasi altman dapat dilihat pada tabel berikut.

**Hasil Perhitungan Formulasi Alman Z- *score*
Periode 2014-2018**

Tahun	6,56 X1	3,26 X2	6,72 X3	1.05 X4	Altman Z- <i>score</i>
2014	1,64	0	0	0.93	2,57
2015	(0.06)	0	(0.06)	0.76	0.64
2016	(0.26)	0	0.06	0.72	0.52
2017	(1.05)	(0.03)	(0.06)	0.64	(0.47)
2018	(3.67)	(0.16)	(0.33)	0.47	(3.69)

Sumber: Olah data sekunder

Hasil diatas dapat dilihat hasil perhitungan formulasi Altman yaitu; dari perhitungan 6,56 multiplikasi nilai X1 menghasilkan nilai positif pada tahun 2014 yaitu 1,64, namun dengan nilai tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2014 perusahaan masih mampu menghasilkan modal kerja bersih dan masih sanggup untuk mengatasi utang lancar/kewajiban jangka pendek. Namun dari tahun 2015–2018 bernilai negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membayar utang jangka pendeknya. Hal ini disebabkan keren perusahaan memiliki nilai utang lancar yang lebih besar dibandingkan dengan *asset* lancar yang dimiliki.

Pada hasil perhitungan dari 3,26 multiplikasi nilai X2 tiga tahun belakangan yaitu pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 memiliki nilai 0 yang dapat diartikan bahwa perusahaan tidak mampu mencadangkan laba (laba ditahan). Pada tahun 2017 dan 2018 bernilai negatif, dimana tahun 2017 sebesar 0,03 dan tahun 2018 sebesar 0,16. Hal ini dapat menunjukkan bahwa laba ditahan perusahaan bernilai negatif yang berarti bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan laba ditahan dan mengalami masa sulit, serta sedang mengalami kerugian.

Hasil perhitungan dari 6,72 multiplikasi nilai X3 menunjukkan, tahun 2014 memiliki nilai 0 pada X3, dan tahun 2015 perseroan memperoleh nilai negatif yaitu 0.06 yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan pada tahun 2015 mengalami kerugian. Pada tahun 2016 nilai X3 bernilai 0.06. Pada dua tahun terakhir, 2017 dan 2018 nilai X3 berniali negatif, dimana tahun 2017 dengan nilai sebesar 0,06 dan 2018 sebesar 0.33 yang dapat diartikan bahwa perusahaan mengalami kerugian atau tidak mampu menghasilkan laba dari aktiva yang dimiliki.

Hasil perhitungan dari 1,05 multiplikasi nilai X4 pada tahun 2014–2018 tidak bernilai negatif akan tetapi nilai yang dimiliki perusahaan menyentuh pada angka nol ini

dapat diartikan bawa perusahaan dapat juga mengalami kesulitan dalam membayar utang jangka panjang, mengingat utang jangka pendek perusahaan yang bernilai negatif.

Perhitungan yang dilakukan sesuai dengan formulasi altman untuk mencari nilai Altman Z – *Score* PT. Golden Plantation maka diperoleh nilai Altman tahun 2014 yaitu 2,57, tahun 2015 nilai Altman 0.64, tahun 2016 dengan nilai altman 0.52, dan tahun 2017 dan 2018 yang memiliki nilai altman negatif, yaitu tahun 2017 bernilai negatif sebesar 0,47 dan tahun 2018 dengan nilai Altman negatif sebesar 3,69. Selanjutnya nilai Altman tersebut diimpertasikan sesuai dengan Nilai Z yang ada. Berikut adalah tabel impertasi nilai Altman PT. Golden Plantation.

Interprestasi Nilai Z

Interprestasi Nilai Z Prediksi PT. Golden Plantation Tbk Periode 2014 – 2018

Tahun	Altman Z - <i>Score</i>	Nilai Z	Ket
2014	2.57	$1.1 < Z < 2.6$	Mulai mengalami <i>financial distress</i>
2015	0.64	< 1.1	Adanya masalah <i>financial distress</i> yang serius
2016	0,52	< 1.1	Mengalami <i>financial distress</i> serius
2017	(0.47)	< 1.1	Berada pada kondisi bangkrut
2018	(3.69)	< 1.1	Bangkrut
Sumber; Olah data sekunder			

Data diatas, didasarkan pada penelitian terdahulu oleh (Ramadhani & Lukviarman, 2009) dan (Altman, 1968) maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2014 PT. Golden Plantation memiliki nilai altman sebesar 2.57 dimana nilai $Z < 2.6$ yang artinya pada tahun ini perseroan mulai mengalami *financial distress*, seharusnya pada kondisi seperti ini perusahaan harus melihat apa yang menjadi masalah di dalam keuangan dan kinerja perusahaan. Pada tahun 2015 perseroan memperoleh nilai altman yaitu 0.64 dimana nilai Z pada tahun 2015 < 1.1 pada tahun ini adanya masalah *financial distress* yang serius, diakibatkan kerugian yang dialami perusahaan dan kewajiban perusahaan bertambah. Pada tahun 2016 nilai altman PT. Golden Plantation menurun menjadi 0,52 diman nilai $Z < 1.1$, tentu saja hal ini sudah menjadi masalah serius yang harus ditanggapi serius oleh perusahaan, walaupun pada tahun 2016 perusahaan memperoleh laba dan liabilitas menurun 3% dan liabilitas jangka pendek ikut menurun akan tetapi *asset* lancar perusahaan tahun 2016 menurun sebesar 49 %, sehingga perusahaan kewalahan membayar kewajiban pada tahun tersebut. Pada tahun 2017 nilai Altman yang diperoleh

perusahaan bernilai negatif yaitu 0.47 dimana nilai $Z < 1.1$, dengan nilai altman yang negatif dapat dipastikan perusahaan berada dalam kondisi *financial distress* tinggi sehingga dapat mengalami kondisi kebangkrutan (Ramadhani & Lukviarman, 2009). Sampai pada 2018 nilai Altman pada PT. Golden Plantation Tbk memiliki nilai altman yang negatif sebesar 3.69 dimana nilai $Z < 1.1$. Kinerja Perseroan di tahun 2018 juga dipengaruhi oleh rugi selisih kurs sebesar Rp. 36 miliar yang berasal dari pinjaman yang dalam dolar Amerika Serikat, karena rupiah mengalami pelemahan dibanding dolar Amerika Serikat.

Financial disterss dapat terjadi dari berbagai faktor salah satunya faktor internal perusahaan (Peter & Yoseph, 2011) dimana *financial distress* yang dialami PT. Golden Plantation tahun 2017-2018 terjadi akibat kerugian yang dialami perusahaan terutama pada tahun 2017 dan 2018. *Liabilitas* jangka pendek perusahaan juga ikut bertambah, dan *asset* lancar yang terus menurun, mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi tidak baik. Selain faktor *internal financial distress* juga dapat terjadi akibat faktor eksternal (Peter & Yoseph, 2011), yang dihadapi PT. Golden Plantation yaitu melemahnya rupiah terhadap dolar amerika membuat perusahaan kewalah membayar kewajiban dan adanya sentimen negatif kebijakan REDII oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit dan minyak sawit untuk Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena adanya masalah lingkungan yang dianggap CPO Indonesia tidak ramah lingkungan, serta naiknya pajak impor India membuat kegiatan ekspor perusahaan menjadi terhambat sehingga mengganggu produksi dan berimbas pada penjualan perusahaan. Sehingga hasil perhitungan variabel-variabel formulasi altman-*score* menghasilkan nilai $Z < 1.1$. Dengan nilai Z tersebut dapat diartikan bahwa perseroan sedang berada dalam kondisi mengalami *finansial distress* yang serius dan dapat dikatakan perusahaan pada beberapa tahun berikutnya akan terus mengalami kesulitan keuangan dan mengalami kebangkrutan.

Setelah melalui proses perhitungan sesuai dengan variabel altman bahwa *financial distress* PT. Golden Plantation dimulai akibat nilai hutang lancar yang dimiliki perusahaan lebih besar dari pada aktiva lancar, sehingga berdampak pada modal kerja perusahaan yang bernilai negatif. Selanjutnya perseroan pada tahun 2015, 2017 dan tahun 2018 tidak mampu menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Serta melemahnya nilai variabel-variabel pada rasio Altman lainnya yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi mengalami *financial distress* serius dan pada akhirnya perusahaan mengalami kebangkrutan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti pada PT. Golden Plantation dengan menggunakan metode Altman *Z-Score* periode 2014 - 2018 dapat disimpulkan bahwa PT. Golden Plantation Tbk mengalami *financial distress* yang terlihat melalui;

1. Pada tahun 2014 perusahaan mulai diindikasikan mengalami *financial distress*.
2. Pada tahun 2015 sampai pada 2018 nilai Altman *Z-Score* PT. Golden Plantation berada pada angka dibawah 1.1 atau zona berbahaya yang berarti bahwa PT. Golden Plantation Tbk berada dalam kondisi bangkrut.
3. Dapat dipastikan bahwa pada beberapa tahun berikutnya perusahaan akan masih mengalami kesulitan keuangan. Hal ini disebabkan akibat pemilikan utang yang digunakan perusahaan. Penggunaan utang lancar yang dimiliki perusahaan terus meningkat tiap tahun, melebihi nilai *asset* lancar yang dimiliki perusahaan sehingga modal kerja perusahaan juga bernilai negatif.

Daftar Pustaka

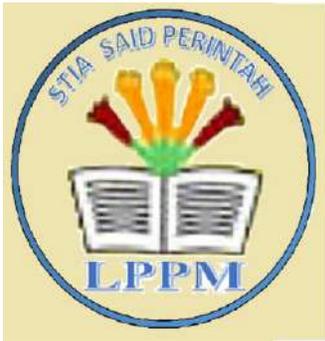
- Adi, S. W., Intan, A., & Rahmawati, E. (2015). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 737-747.
- Agnes Sawir. (2000). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Almilia, L. S., & Kristijadi, E. (2003). Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*.
- Altman, E. I. (1968). FINANCIAL RATIOS, DISCRIMINANT ANALYSIS AND THE PREDICTION OF CORPORATE BANKRUPTCY. *The Journal of Finance*.
- Brahmana, R. K. (2007). Identifying Financial Distress Condition in Indonesia Manufacture Industry. *Journal Business*.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2014). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan : Assetials Of Financial Management. In *Salemba Empat*.
- Fitriyah, I., & Hariyati. (2013). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress

- Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(3), 760–773.
- Hadi, S., & Anggraeni, A. (2008). Pemilihan Prediktor Delisting Terbaik (Perbandingan Antara the Zmijewski Model , the Altman Model , Dan the Springate Model). *Jurnal Auditing Dan Akuntansi Indonesia*.
- Hanifah, O. E., & Purwanto, A. (2013). PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL INDICATORS TERHADAP KONDISI FINANCIAL DISTRESS (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Mastuti S, S. (2003). No Title. *Validitas Penggunaan Z-Score Altman Untuk Menilai Kebangkrutan Pada Perusahaan Perbankan Go Publik Di Bursa Efek*, (Jakarta Kompak no 7), 68–93.
- Peter, & Yoseph. (2011). Analisis Kebangkrutan Dengan Metode Z-Score Altman, Springate dan Zmijewski Pada PT.Indofood Sukses Makmur TBK Periode 2005-2009. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Ramadhani, A. S., & Lukviarman, N. (2009). Perbandingan Analisis Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Model Altman Pertama, Altman Revisi, dan Altman Modifikasi dengan Ukuran dan Umur Perusahaan sebagai Variabel Penjelas (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Siasat Bisnis*.
- Sartono, A. (2014). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE. In *Revolusi Industri 4.0: Desain Perkembangan Transaksi dan Sistem Akuntansi Keuangan*.
- Sudana, I. M. (2011). Manajemen Keuangan Perusahaan Teori & Praktik. In *Erlangga*.
- Thohari, M. Z., Sudjana, N., & Zahroh Z. (2015). Prediksi Kebangkrutan Menggunakan Analisis Model Z-Score (Studi pada Subsektor Textile Mill Products yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Whitaker, R. B. (1999). The early stages of financial distress. *Journal of Economics and Finance*.

www.idx.co.id

Leonora Ferdinandus¹
Stevanus Johan Gomies²
(Penulis Korespondensi)

^{1,2}Jurusan Adm. Niaga Politeknik Negeri Ambon
stgomies74@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This research aims to analyze the impact of service quality and value in consumer satisfaction and feel the intensity of purchases on PT. Mulia Travel in Ambon, the instrument used was a questionnaire distributed to consumers PT. Travel noble by random sampling on the 300 respondents who met on the field during the period of this study. Data analysis methods used is to use the technique (Confirmatory Factor Analysis / CFA) to validate the questions on the questionnaire. The data collected were analyzed using multiple regression analysis, F test, t test and determination.

The results showed that service quality variables are positive and significant effect on customer satisfaction, as well as the variable value in feeling positive and significant effect on customer satisfaction. Then the results of the study also showed that service quality variables are positive and significant effect on the intensity of consumer purchases, as well as the variable value in feeling positive and significant effect on the intensity of consumer purchases. So is the consumer satisfaction is positively and significantly affect the intensity of consumer purchases. Thus concluded the entire hypothesis is accepted.

Keywords : Service Quality, Value in Feeling, Consumer Satisfaction, Intensity of Purchases

Pendahuluan

Kualitas pelayanan merupakan isu terpenting bagi organisasi dalam bentuk pengakuan akan kinerja dan pelayanannya, yang terkait dengan peran dan strategi yang berkelanjutan dalam memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kebutuhan mengukur *service quality* adalah sangat utama dan relevan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan informasi yang secara konstan mampu merubah lingkungan bisnis.

Beberapa penelitian dalam bidang marketing dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelayanan direspon oleh konsumen, seperti kualitas pelayanan yang dirasakan, kepuasan pelanggan dan intensitas pembelian. Penelitian Taylor, (1994) mengemukakan bahwa *service quality* dan kepuasan konsumen diakui sebagai kunci utama yang mempengaruhi intensitas konsumen untuk membeli. Taylor, (1994) menyatakan bahwa hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen merupakan 2 (dua) konstruk yang mempengaruhi intensitas pembelian konsumen. Selain itu dikatakan bahwa kepuasan merupakan variabel yang memoderasi pengaruh antara kualitas pelayanan dan intensitas pembelian (*purchase intentions*). Penelitian lain oleh Handriana, (1998) menunjukkan kesenjangan antara harapan mahasiswa dan persepsi dosen dalam tiga dimensi meliputi dimensi respek terhadap mahasiswa, dimensi pengetahuan dosen dan dimensi lingkungan fisik perguruan tinggi.

Peneliti lainnya yakni Olsen, (2002) menyatakan bahwa kepuasan adalah *mediating variable* antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pembelian kembali (*repurchase loyalty*). Kepuasan konsumen akan memberikan pengaruh positif terhadap *customer loyalty* dan *customer retention* (Rust, R. T. and Zahorik, 1993). Hal tersebut akan terjadi selama penyedia jasa mampu mengenali dimensi-dimensi pelayanan yang memberikan pengaruh terbesar terhadap kepuasan konsumen. Dabholkar dan Surprenant, (1982) dalam Olsen, (2002) menyatakan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap intensitas pembelian yang dimediasi oleh kepuasan konsumen lebih kuat dibanding pengaruh langsung kualitas pelayanan terhadap intensi pembelian. Rust, R. T. and Oliver, R. L., (1994) mengemukakan bahwa hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen sangat penting untuk efektifitas manajemen. Bitner, M. J. and Hubbert, (1994) mengidentifikasi bagaimana memicu kualitas produk dan jasa dan bahwa kepuasan konsumen merupakan sasaran utama perusahaan. Bolton, R. and Drew, (1991) juga mengemukakan bahwa penelitian di

bidang pemasaran fokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan yang dirasakan untuk menggolongkan penilaian konsumen terhadap pelayanan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Lee, G. G. And Lin, H. F., (2005) dengan bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan nilai yang dirasakan kepuasan konsumen intensi pembelian dengan sebagai variabel intervening dengan mengadopsi variabel dimensi *reability, tangible, responsibility, assurance* dan *emphaty* dari konsep model Servqual (Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. And Berry, 1988). Perbedaannya dengan kajian-kajian terdahulu yakni pada elemen-elemen dari dimensi kualitas pelayanan dan objek yang diteliti. Artikel Lee, G. G. And Lin, H. F., (2005) menggunakan objek dengan pelayanan secara *online* sedangkan penelitian ini hanya menggunakan objek PT. Mulia Travel yang secara langsung melayani konsumen dan konsumen secara langsung sehingga konsumen dapat merasakan bentuk pelayanan yang diberikan. Dengan demikian peneliti melakukan *revise model* dari model sebelumnya. Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah hasil yang diperoleh sama dengan penelitian sebelumnya dari objek yang diteliti.

PT. Mulia Travel adalah salah satu dari beberapa perusahaan jasa yang ada di kota Ambon yang melayani penjualan tiket pesawat. Sejak awal berdirinya, PT. Mulia Travel sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat terutama dari segi pelayanan yang dalam operasionalnya telah mejalin kerja sama dengan PT. Lion Air, PT. Batik, PT. Sriwijaya, PT. Trigana, PT. Expres dan PT. Garuda Indonesia sebagai agen penjualan tiket pesawat di Kotamadya Ambon. Perkembangan penjualan tiket penerbangan PT. Mulia Travel adalah sebagaimana disajikan berikut ini.

Tabel Perkembangan Penjualan Tiket Penerbangan

Tahun	Jenis Penerbangan				Penjualan
	Lion	Garuda	Sriwijaya	Trigana	
2017	2143	1937	1449	1171	6700
2018	1739	1679	1936	1124	6478
2019	2226	2080	1583	1270	7159
2020	1958	1736	1832	1227	6753
Jumlah :					27090

Sumber; PT. Mulia Travel

Dari data dalam tabel diatas, diketahui bahwa volume penjualan tiket penerbangan pada PT. Mulia Travel Ambon selama kurun waktu tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi.

Fluktuasi jumlah penjualan tiket pada PT. Mulia Travel Ambon, antara lain disebabkan karena adanya persaingan pada penjualan sejenis. Tiket penerbangan yang dijual pada PT. Mulia Travel Ambon terdiri dari dua jenis penjualan yaitu penjualan promo dan penjualan biasa berdasarkan dengan harga jual berbeda sebagaimana dapat dilihat berikut ini.

Tabel Harga Jual Tiket Tahun 2020

Jenis penjualan	Harga jual
Promo	Rp, 700 – 1jt
Biasa	Rp, 1jt – 3 jt

Sumber; PT. Mulia Travel

Strategi pemasaran pada pokoknya meliputi strategi produk, harga, distribusi, promosi, dan pelayanan. Untuk menghadapi persaingan dan sekaligus memperluas jangkauan layanan penjualan. PT. Mulia Travel Ambon mempekerjakan 12 orang karyawan. Selain itu juga dilakukan upaya promosi, antara lain melalui pemasangan iklan di koran Ambon Ekspres selama 1 tahun berjalan, brosur, leaflet, spanduk dan baliho. Hasil *pilot study* melalui wawancara dengan beberapa konsumen yang sering menggunakan jasa PT. Mulia Travel Ambon, diketahui bahwa mereka lebih senang membeli tiket pada PT. Mulia Travel Ambon karena pelayanan yang diberikan sangat memuaskan serta adanya kebijakan bonus kepada konsumen yang sering membeli tiket maupun yang membeli dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan uraian diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan topik analisa pengaruh kualitas pelayanan dan nilai yang dirasakan terhadap kepuasan konsumen dan intensitas pembelian.

Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Kualitas Pelayanan

Salah satu model kualitas layanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model *ServQual (Service Quality)* seperti yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry seperti yang dikutip oleh Zeithaml, Valarie A. and Bitner, (2000) dalam serangkaian penelitian mereka terhadap enam sektor jasa, reparasi, peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, otomotif, ritel, dan pialang sekuritas. *ServQual (Service Quality)* dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (*Perceived Service*) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan atau diinginkan (*Expected Service*). Model

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. And Berry, (1988) mengemukakan bahwa terdapat 5 dimensi utama dari *service quality* yaitu;

- 1) *Reliability* (keandalan) didenisikan sebagai kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan/*complaint* yang diajukan konsumen.
- 2) *Responsiveness* (daya tanggap) yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan/*complaint* yang diajukan konsumen.
- 3) *Assurance* (kepastian) yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen.
- 4) *Tangible* (berwujud) yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi.
- 5) *Emphaty* (empati) yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada langganan.

Nilai yang dirasakan

Nilai yang dirasakan (*Customer Perceived Value*) oleh konsumen adalah merupakan perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dan pengorbanan dari pelanggan, dibandingkan dengan dengan yang diberikan pesaing (Leslie de Chernatony, 2000). Pada definisi ini dapat diketahui bahwa seorang konsumen akan memperhitungkan berapa yang keuntungan yang akan diperoleh dengan pengorbanan yang diberikan dibanding dengan yang diberikan oleh pesaing, dan jika ternyata menurut konsumen, yang diberikan tidak sesuai dengan harapannya, maka dia tidak akan menggunakan jasa dari perusahaan tersebut lagi dan pindah ke perusahaan pesaing yang dapat memberikan nilai yang lebih bagus.

Kepuasan Konsumen

Tse dan Wilton, seperti yang dikutip oleh Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, (2005) menguraikan bahwa kepuasan pelanggan adalah respon konsumen pada evaluasi persepsi terhadap perbedaan antara ekspektasi awal atau standar kinerja tertentu dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah konsumsi produk. Maksud dari definisi tersebut adalah bahwa bila kinerja produk, baik barang atau pun jasa, jauh lebih rendah dibandingkan dengan harapan pelanggan, pembeli dapat dikatakan tidak puas.

Sebaliknya, bila kinerja sesuai dengan harapan atau bahkan melebihi harapan, maka pembeli akan merasa puas atau sangat gembira. Selanjutnya Fandi Tjiptono dan Antasia, (2001) juga mengutip pendapat lain dari Wilkie, (1990) yang mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan (*Customer Satisfaction*) adalah suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.

Kedua definisi tersebut memperlihatkan bahwa pelanggan akan melihat secara keseluruhan apa yang telah mereka rasakan setelah membeli dan mengkonsumsi suatu produk, baik barang maupun jasa. Pelanggan sangat kritis terhadap produk yang mereka konsumsi. Mereka akan menilai berdasarkan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka peroleh dari pengorbanan mereka pada kenyataannya. Tingkat kepuasan pelanggan itu sendiri amat subyektif dimana ukuran kepuasan satu pelanggan dengan pelanggan lain akan berbeda.

Intensitas Pembelian

Intensitas Pembelian merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek. Tamaela, (2015) mengemukakan bahwa perilaku pembelian konsumen seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungan yang lain. Intensitas Pembelian juga merupakan niat pembelian ulang yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang (Assael, 2001). Selanjutnya Assael, (2001) juga mengemukakan bahwa pemasar akan selalu menguji elemen-elemen dari bauran pemasaran yang mungkin mempengaruhi Intensitas Pembelian.

Salah satu teori yang dapat menerangkan hubungan sikap, minat dan perilaku adalah Teori Fishbein dan Ajzen (1975, 1980) dalam Dharmmesta, (2003) tentang model intensi perilaku atau dikenal dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori tersebut memprediksi niat untuk berperilaku, bukan perilaku itu sendiri. Perilaku seseorang sangat tergantung pada minatnya sedangkan minat berperilaku sangat tergantung pada sikap dan norma subyektif. Fishbein dan Ajzen (1980) dalam Dharmmesta, (2003) mengemukakan bahwa niat ditentukan oleh dua kognisi yang didasarkan pada keyakinan. Variabel kognisi yang pertama, sikap terhadap pelaksanaan perilaku sasaran, diukur sebagai keyakinan responden bahwa suatu tindakan tertentu akan mempunyai suatu hasil atau akibat, ditimbang dengan evaluasinya pada akibat tersebut.

Penelitian Woodside, A. G.; Lisa, L. and Daly, R. T., (1989) menyatakan bahwa pelanggan menilai sikap dari pemberi jasa sebagai ekspektasi awal mengenai kinerja toko dan sikap ini mempengaruhi minat pembelian pada sebuah toko. Perubahan sikap menjadi input yang menentukan minat pembelian pelanggan. Teori aksi reaksi dari Fishbein yang dimodifikasi menunjukkan bahwa evaluasi produk mempengaruhi konsekuensi yang dirasakan atas merek yang diyakini dari suatu aksi (*brand beliefs perceived consequences of actions*). Evaluasi keseluruhan dari suatu aksi dipengaruhi oleh konsekuensi yang dirasakan atau merek yang diyakini dari suatu aksi dan norma sosial yang terdiri dari keyakinan normatif dan motivasi.

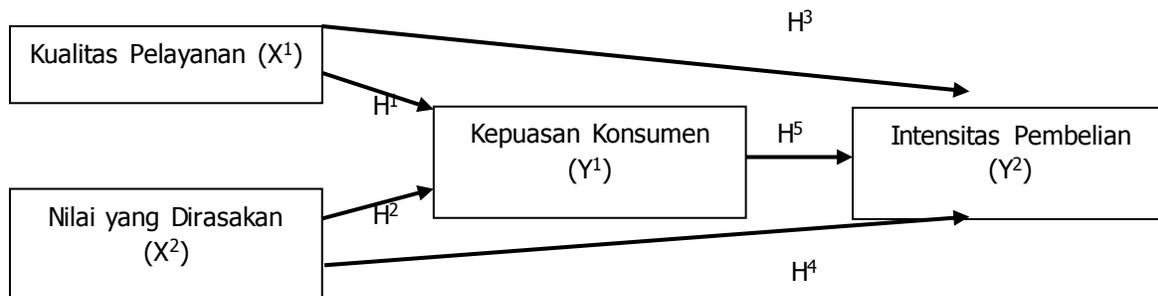
Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Pengembangan hipotesa penelitian ini didasarkan pada beberapa kajian terdahulu seperti yang diuraikan berikut ini. Diputra Yudha Bagja, (2007) melalui hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan penetapan harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Hasil ini juga didukung oleh hasil kajian Agustiano Arief, (2009) dan Sudarno, (2009).

Peneliti lainnya Setiawati & Murwanti, (2006) menyatakan bahwa variabel-variabel kualitas jasa pelayanan berpengaruh positif terhadap intensitas pembelian. Penelitian oleh Widijanarko, (2007) membuktikan bahwa ada pengaruh yang searah antara nilai yang dirasa dengan kepuasan pelanggan. Kajian oleh Lee, G. G. And Lin, H. F., (2005) mengemukakan bahwa intensi pembelian konsumen merupakan salah satu proksi dari perilaku membeli dan dijelaskan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan berpengaruh positif terhadap intensi pembelian. Hasil ini juga didukung oleh hasil kajian; Sulistiono, (2010). Hasil kajian lainnya oleh Rust, R. T. and Zahorik, (1993) menyatakan bahwa keseluruhan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen mempengaruhi retensi konsumen, pangsa pasar dan profitabilitas. Llusar, J. C. B.; Zornoza, C. C. and Tena, A. B. E., (2001) mempertimbangkan kepuasan konsumen sebagai mediator antara hubungan kualitas pelayanan yang dirasakan dan intensi pembelian konsumen.

Berdasarkan hasil kajian-kajian terdahulu diatas maka hipotesa penelitian yang diajukan seperti yang terlihat pada model penelitian berikut ini.

Gambar Model Penelitian



Hipotesis ¹ ; Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Hipotesis ² ; Nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Hipotesis ³ ; Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas pembelian konsumen.

Hipotesis ⁴ ; Nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas pembelian konsumen.

Hipotesis ⁵ ; Kepuasan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas pembelian.

Metode Penelitian

Kategori penelitian ini termasuk penelitian eksplanatoris (*explanatory research*) yaitu jenis penelitian yang berupaya menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun, 2006). Berdasarkan analisis datanya, penelitian ini merupakan penelitian analitis, karena menganalisis data dengan statistik induktif dan deskriptif yang digeneralisasi untuk kesimpulan populasi (Arikunto Suharsimi, 2013). Data yang dikumpulkan merupakan data yang bersifat *cross sectional* yang diperoleh dari responden dalam merespon item-item yang berkaitan dengan variabel-variabel kualitas layanan, kepuasan konsumen dan intensitas pembelian selama penelitian ini dilaksanakan yaitu dalam waktu dua bulan.

Populasi dalam kajian ini adalah seluruh konsumen yang membeli tiket pada PT. Mula Travel yang dianggap sebagai populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel yang

digunakan adalah *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. Karena populasi dalam penelitian ini sudah diketahui, penentuan ukuran besarnya sampel dilakukan dengan menetapkan jumlah persentasi tertentu dari besarnya populasi sehingga sampel akhir sebanyak 300 responden.

Proses analisa data penelitian dimulai dari uji validitas yang mempergunakan teknik *confirmatory factor analysis* (CFA) dengan tujuan untuk mengestimasi measurement model, menguji unidimensionalitas dari konstruk-konstruk eksogen dan endogen. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas dan heterokedastisitas). Alat analisis yang digunakan untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian adalah analisis regresi linier berganda.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Asumsi Klasik

Pengujian validitas menggunakan teknik *confirmatory factor analysis* (CFA) atau biasanya dikenal dengan analisis faktor yang didalamnya melihat korelasi KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) atau Bartlett's test. Kriteria Besarnya KMO minimal 0.5 dan jika ada variabel yang tidak memenuhi batas 0.5 maka variabel tersebut harus dikeluarkan dan dilakukan pengujian ulang. Jika ada lebih dari satu variabel yang memiliki nilai MSA kurang dari 0.5 maka yang dikeluarkan adalah variabel dengan MSA terkecil dan tentunya proses pengujian tetap diulang. Hasil pengujian validitas dapat dilihat dibawah ini.

Tabel Uji Validasi *Confirmatory Factor Analysis*

Variabel	Indikator	KMO and Bartlett's Test		<i>Anti Image Matrices</i>
		MSA	Sig.	<i>Anti-Image Correlation (a)</i>
Kualitas Pelayanan	Tangible	0,672	0,000	0,704a
				0,797a
				0,640a
				0,623a
	Reliability	0,837	0,000	0,921a
				0,788a
				0,766a
				0,905a
	Responsiveness	0,851	0,000	0,908a
				0,830a
				0,803a
				0,911a

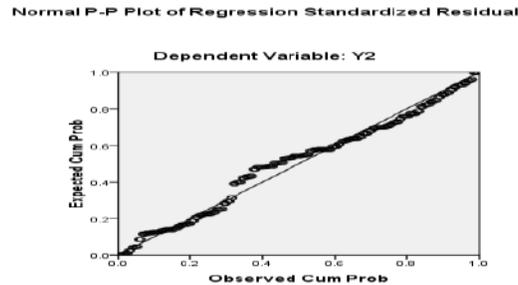
Variabel	Indikator	KMO and Bartlett's Test		Anti Image Matrices
		MSA	Sig.	Anti-Image Correlation (a)
	Assurance	0,703	0,000	0,879a
				0,690a
				0,708a
				0,712a
				0,704a
	Emphaty	0,758	0,000	0,810a
				0,703a
				0,708a
				0,797a
				0,877a
Nilai yang dirasakan	Nilai Yang Dirasakan	0,716	0,000	0,742a
				0,760a
				0,663a
Kepuasan Konsumen	Kepuasan Konsumen	0,734	0,000	0,717a
				0,677a
				0,796a
				0,841a
Intensitas Pembelian	Intensitas Pembelian	0,768	0,000	0,784a
				0,709a
				0,798a
				0,824a

Sumber; Hasil pengolahan data, (2021)

Hasil analisis pada tabel diatas diperoleh nilai KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) atau Bartlett's test, ditemukan nilai MSA diatas 0,5 untuk seluruh butir pertanyaan dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan nilai *anti image correlation* secara keseluruhan berada diatas 0,5 sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa instrument ini telah memenuhi syarat valid.

Pengujian data selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang dimulai dengan uji normalitas dengan menggunakan histogram maupun *normal probability plot* dengan kriteria, data dikatakan memiliki distribusi yang normal jika data tersebut berbentuk seperti lonceng. Sedangkan pada *normal probability plot*, dapat dikatakan normal jika ada penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal. Hasil uji menunjukan bahwa peyebaran data mengikuti arah diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa data telah berdistribusi normal.

Grafik Normal Probability Plot



Sumber; Hasil pengolahan data, (2021)

Pengujian selanjutnya adalah uji multikolinearitas dengan menggunakan perhitungan nilai *Tolerance* kurang dari 0,100 atau nilai VIF lebih dari 10, maka hal ini menunjukkan adanya multikolinearitas (Ghozali, 2006). Hasil uji menunjukkan bahwa data terbebas dari multikolinieritas karena nilai *Tolerance* kurang dari 0,100 dan nilai VIF lebih dari 10 seperti yang terlihat berikut ini.

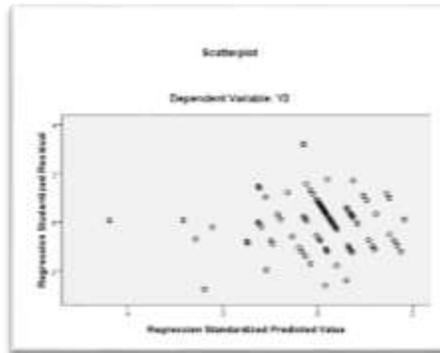
Tabel Analisis Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 X1	.478	2.093
X2	.394	2.538
Y1	.334	2.990

Sumber; Hasil pengolahan data, (2021)

Uji selanjutnya adalah uji heterokedastisitas dengan melihat grafik plot antar prediksi variabel dependen (*ZPRED*) dengan residualnya (*SRESID*) dengan kriteria analisisnya yakni; a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas dan b). Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi seperti yang terlihat berikut ini.

Grafik Scatter Plot



Sumber; Hasil pengolahan data, (2021)

Uji Signifikansi Simultan

Uji signifikansi simultan dalam kajian menggunakan uji statistik F dengan hasil berikut ini

Tabel Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124.032	3	41.344	820.277	.000 ^a
	Residual	14.919	296	.050		
	Total	138.952	299			

a. Predictors: (Constant), Y1, X1, X2

b. Dependent Variable: Y2

Sumber; Hasil pengolahan data, (2021)

Hasil analisis membuktikan bahwa variable kualitas pelayanan (X1), nilai yang dirasakan (X2) maupun kepuasan konsumen (Y1), secara simultan berpengaruh terhadap intensitas pembelian, dimana nilai signifikansi 0.000 signifikan pada 0.05. Hal ini diperkuat dengan nilai F hitung sebesar $820.277 > F$ tabel 3,92 (df = 300, dengan taraf signifikansi (α) = 0,05).

Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis penelitian dalam kajian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan ringkasan hasil analisis sebagai berikut.

**Tabel Uji t Variabel Kualitas Layanan
dan Nilai yang dirasakan Terhadap Kepuasan Konsumen**

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.932	.127		7.348	.000
X1	.308	.037	.366	8.383	.000
X2	.493	.040	.532	12.180	.000

a. Dependent Variable: Y1

Sumber; Hasil pengolahan data, (2021)

H1 : Pengaruh kualitas layanan (X1) terhadap kepuasan konsumen (Y1)

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel kualitas layanan sebesar 8,383 dengan signifikansi 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung yaitu $8,383 > t$ tabel yaitu sebesar 1,282 ($df = n - 2, 300-2 = 298$ pada $\alpha = 0,05$) yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara kualitas layanan terhadap keputusan konsumen sehingga dapat dikatakan hipotesa ke 1 atau H1 diterima.

H2 : Pengaruh nilai yang dirasakan (X2) terhadap kepuasan konsumen (Y1)

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel nilai yang dirasakan sebesar 12,180 dengan signifikansi 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung yaitu $12,180 > t$ tabel yaitu sebesar 1,282 ($df = n - 2, 300-2 = 298$ pada $\alpha = 0,05$) yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara nilai yang dirasakan terhadap keputusan konsumen sehingga dapat dikatakan hipotesa ke 2 atau H2 diterima.

H3 : Pengaruh Kualitas Layanan (X1) terhadap Intensitas Pembelian (Y2)

**Tabel Uji t Variabel Kualitas Layanan
dan Nilai yang Dirasakan Terhadap Intensitas Pembelian**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.023	.077		.293	.770
X1	.239	.022	.264	10.649	.000
X2	.751	.025	.754	30.394	.000

a. Dependent Variable: Y2

Sumber; Hasil pengolahan data, (2021)

Berdasarkan data diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel kualitas layanan sebesar 10,649 dengan signifikansi 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung yaitu $10,649 > t$ tabel yaitu sebesar 1,282 ($df = n - 2$, $300-2 = 298$ pada $\alpha = 0,05$) yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara kualitas layanan terhadap intensitas pembelian sehingga dapat dikatakan hipotesa ke 3 atau H3 diterima.

H4 : Pengaruh nilai yang dirasakan (x2) terhadap intensitas pembelian (Y2)

Berdasarkan informasi diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel nilai yang dirasakan sebesar 30,384 dengan signifikansi 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung yaitu $30,384 > t$ tabel yaitu sebesar 1,282 ($df = n - 2$, $300-2 = 298$ pada $\alpha = 0,05$) yang artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara nilai yang dirasakan terhadap intensitas pembelian sehingga dapat dikatakan hipotesa ke 4 atau H4 diterima.

H5 : Pengaruh kepuasan konsumen (Y1) terhadap intensitas pembelian (Y2)

**Tabel Uji t Variabel Kepuasan Konsumen
Terhadap Intensitas Pembelian**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.016	.084		-.186	.852
X1	.226	.025	.250	9.074	.000
X2	.731	.030	.733	24.165	.000
Y1	.341	.035	.338	5.162	.000

a. Dependent Variable: Y2

Sumber; Hasil pengolahan data, (2021)

Berdasarkan informasi diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel kepuasan konsumen (Y1) sebesar 5,162 dengan signifikansi 0,00. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung yaitu $5,162 > t$ tabel yaitu sebesar 1,282 ($df = n - 2, 300 - 2 = 298$ pada $\alpha = 0,05$) yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara kepuasan konsumen terhadap intensitas pembelian (Y1) sehingga dapat dikatakan hipotesa ke 5 atau H5 diterima.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil analisis koefisien determinasi data penelitian dalam kajian terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.945 ^a	.893	.892	.22451

a. Predictors: (Constant), Y1, X1, X2

b. Dependent Variable: Y2

Sumber; Hasil pengolahan data, (2021)

Hasil penelitian ini memberikan hasil nilai adjusted R^2 sebesar 0,892 yang mengindikasikan bahwa 89,2% intensitas pembelian konsumen pada PT. Mulia Travel di Kota Ambon dapat dijelaskan oleh kualitas pelayanan, nilai yang dirasakan dan kepuasan konsumen sedangkan selebihnya 10,8% intensitas pembelian konsumen dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model ini. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas pembelian konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, nilai yang dirasakan

dan kepuasan konsumen, namun ada variabel lain yang mempengaruhi intensitas pembelian konsumen.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen

Hasil analisa membuktikan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, pengaruh kualitas pelayanan dinilai positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dapat dijelaskan bahwa kualitas pelayanan tiket yang diberikan oleh PT. Mulia Travel di Kota Ambon terbukti memenuhi kebutuhannya dan bahkan melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Mulia Travel meliputi 5 dimensi yaitu 1) *Reliability* (keandalan) dimana adanya usaha karyawan PT. Mulia Travel di Kota Ambon untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa tiket dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan/ *complaint* yang diajukan konsumen dalam hal pembelian tiket. 2) *Responsiveness* (daya tanggap) dimana adanya kesediaan dan kemampuan para karyawan PT. Mulia Travel untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara tepat terkait dengan pembelian tiket.

Kualitas pelayanan lainnya adalah 3) *Assurance* (kepastian) dimana adanya kemampuan karyawan PT. Mulia Travel untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen terhadap pembelian tiket. 4) *Tangible* (berwujud) dimana adanya penampilan fasilitas fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi yang dilakukan oleh karyawan PT. Mulia Travel dapat memuaskan pelanggannya dan 5) *Empathy* (empati) dimana adanya kesediaan karyawan PT. Mulia Travel untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada langganannya terkait dengan pembelian tiket. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diputra Yudha Bagja, (2007); Herry Agustiano Arief, (2009) dan Sulistiono, (2010).

Pengaruh Nilai yang Dirasakan Terhadap Kepuasan Konsumen.

Hasil analisa uji t ditemukan adanya pengaruh nilai yang dirasakan terhadap kepuasan konsumen, pengaruh nilai yang dirasakan dinilai positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil analisis membuktikan bahwa nilai yang dirasakan konsumen pada PT. Mulia Travel di Kota Ambon bahwa konsumen merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan karyawan PT. Mulia Travel, kemudian konsumen merasa adanya kesesuaian antara harga tiket yang dijual dengan pelayanan yang ditawarkan, dan besarnya harga

dengan pesaing cukup bersaing. Hasil yang diuraikan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widijanarko, (2007) yang juga membuktikan bahwa ada pengaruh yang searah antara nilai yang dirasa dengan kepuasan pelanggan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Intensitas Pembelian Konsumen.

Hasil analisa uji t ditemukan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap intensitas pembelian konsumen, pengaruh kualitas pelayanan dinilai positif dan signifikan terhadap intensitas pembelian konsumen. Hasil analisis membuktikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Mulia Travel di Kota Ambon berpengaruh terhadap intensitas pembelian tiket yang artinya bahwa apa yang diharapkan oleh konsumen dalam pembelian tiket tercapai sehingga terjadi intensitas pembelian tiket pada oleh PT. Mulia Travel. Hasil yang diuraikan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iswayanti, (2010) mengatakan bahwa factor yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah factor kualitas produk.

Pengaruh Nilai yang dirasakan Terhadap Intensitas Pembelian Konsumen.

Hasil analisa uji t ditemukan adanya pengaruh nilai yang dirasakan terhadap intensitas pembelian konsumen, pengaruh nilai yang dirasakan dinilai positif dan signifikan terhadap intensitas pembelian konsumen. Temuan ini berarti bahwa nilai yang dirasakan oleh konsumen dari PT. Mulia Travel di Kota Ambon berpengaruh terhadap intensitas pembelian tiket yang artinya bahwa apa yang dirasakan oleh konsumen dalam pembelian tiket sesuai dengan yang diharapkan sehingga terjadi intensitas pembelian tiket. Hasil ini mendukung temuan hasil penelitian oleh penelitian Woodside, A. G.; Lisa, L. and Daly, R. T., (1989) yang menyatakan bahwa pelanggan menilai sikap dari pemberi jasa sebagai ekspektasi awal mengenai kinerja toko dan sikap ini mempengaruhi minat pembelian pada sebuah toko serta hasil kajian oleh Setiawati & Murwanti, (2006) yang juga berhasil membuktikan bahwa variabel kualitas jasa pelayanan berpengaruh positif terhadap intensitas pembelian.

Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap intensitas Pembelian.

Hasil analisa uji t ditemukan adanya pengaruh kepuasan konsumen terhadap intensitas pembelian konsumen, pengaruh kepuasan konsumen dinilai positif dan signifikan terhadap intensitas pembelian konsumen. Hasil ini menunjukkan bahwa ada pengaruh kepuasan konsumen terhadap intensitas pembelian maka dapat dijelaskan bahwa kepuasan

konsumen atas jasa yang diberikan oleh PT. Mulia Travel dapat dengan serta-merta membuat konsumen melakukan pembelian ulang. Secara cepat membuat keputusan untuk membeli atau menggunakan jasa dari PT. Mulia Travel, selalu membeli tiket dari PT. Mulia Travel dan merekomendasikan kepada orang untuk membeli tiket pada PT. Mulia Travel Ambon. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil oleh Mochamad Rifqi Aditya Pradana, (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas pembelian serta kepuasan pelanggan juga turut berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas pembelian.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Kualitas pelayanan dan nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dan intensitas pembelian yang artinya kualitas pelayanan yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan konsumen dan intensitas pembelian.
2. Kualitas pelayanan dan nilai yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas pembelian konsumen yang artinya kualitas pelayanan dan nilai yang dirasakan yang lebih baik akan meningkatkan intensitas pembelian konsumen.
3. Kepuasan konsumen berpengaruh dan signifikan terhadap intensitas pembelian konsumen.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran bahwa untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap intensitas pembelian maka manajemen PT. Mulia Travel harus memperhatikan nilai yang dirasakan seperti memberikan rasa nyaman atas pelayanan yang diberikan, konsumen harus merasa bahwa adanya kesesuaian harga dengan pelayanan yang diberikan, serta harga dengan pesaing.

Daftar Pustaka

- Arikunto Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta Bangun.
- Assael, H. (2001). *Consumer Behavior and Marketing Action* (6th ed.). Singapore: Thomson

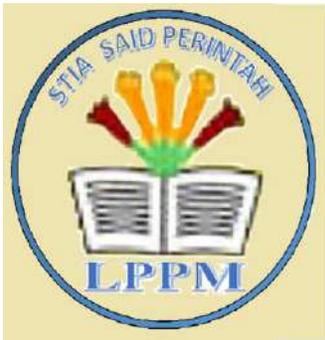
Learning.

- Bitner, M. J. and Hubbert, A. R. (1994). *in Service Quality: new Directions in Theory and Practice* (1st ed.). New York: The Mc Graw Hill Companies Inc.
- Bolton, R. and Drew, J. H. (1991). a Multistage Model of Customer Assessments Of Service Quality and Value. *Ournal of Consumer Research*, 17, 375–384.
- Dharmmesta, B. S. (2003). Sikap dan Perilaku Konsumen Dalam Pemasaran: Sebuah Tinjauan Sosial Kognitif. *Jurnal Kajian Bisnis*, (29), 1–25.
- Diputra Yudha Bagja. (2007). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa dan Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen pada Hotel Arwana di Jakarta*. Universitas Sebelas Maret.
- Eduard Yohannis Tamaela. (2015). Determinan Dimensi Kepercayaan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Kaos Merek Gagartang di Kota Ambon - PDF. *Benchmark*, 4(1), 48–61. Retrieved from https://www.academia.edu/42295768/Determinan_Dimensi_Kepercayaan_Merek_Terhadap_Keputusan_Pembelian_PDF
- Fandi Tjiptono dan Antasia, D. (2001). *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi.
- Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. (2005). *Manajemen Kualitas Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program SPSS* (4th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handriana, T. (1998). *Analisa Perbedaan Harapan Kualitas Pelayanan pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Surabaya*. Universitas Gadjah Mada.
- Iswayanti, I. P. (2010). *Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Harga dan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Rumah Makan "Soto Angkring Mas Boed" di Semarang)*. UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG.
- Lee, G. G. And Lin, H. F. (2005). Customer Perception of e-Service Quality in Online Shopping, International. *Journal of Retail & Distribution Management*, 33(2), 161–176.
- Leslie de Chernatony, F. H. and F. D. R. (2000). Added Value; Its Nature, Roles and Sustainability. . . *European Jurnal of Marketing*.
- Llusar, J. C. B.; Zornoza, C. C. and Tena, A. B. E. (2001). Measuring the Relationship Beetwen Firm Perceived Quality and Customer Satisfaction and its Influence on Purchase Intentions. *Total Quality Management*, 12(6), 119–134.

- Olsen, S. O. (2002). Comparative evaluation and the relationship between quality, satisfaction, and repurchase loyalty. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 30(3), 240–249. <https://doi.org/10.1177/00970302030003005>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. And Berry, L. L. (1988). *Servqual: A Multiple Item Scale for Measuring Customer Perception of Service Quality*.
- Rust, R. T. and Oliver, R. L. (1994). *Service Quality, New Directions in the Theory and Practice* (2nd ed.). London: Sage.
- Rust, R. T. and Zahorik, A. (1993). Customer Satisfaction, Customer Retention, and Market Share. *Journal of Retailing*, 69(4)105–113).
- Setiawati, E., & Murwanti, S. (2006). Pelanggan Dalam Pembentukan. *Benefit*, 10(1), 79–92.
- Singarimbun, M. dan S. E. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: , LP3ES.
- Taylor, S. A. and T. L. B. (1994). An Assessment of the Relationship Between Service Quality and Customer Satisfaction in the Formation of Consumer Purchase Intention. *Journal of Retailing*, 70, 163–178.
- Widijanarko, A. (2007). *Analisis Pengaruh Produk dan Nilai yang dirasakan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Wilkie, W. L. (1990). *Consumer Behaviour* (2nd ed.). New York: Wiley & Sons.
- Woodside, A. G.; Lisa, L. and Daly, R. T. (1989). Linking Service Quality, Customer Satisfaction, and Behavioral Intentions. *Journal of Health Care Marketing*, 9, 133–138.
- Zeithaml, Valerie A. and Bitner, M. J. (2000). *Service Marketing* (1st ed.). New York: McGraw Hill Inc.

Khaeril Khaeril¹
Yolanda Mohungo²
Laela³

¹STIEM Rutu Nusa Ambon
^{1,2}Universitas Al Khairun Ternate
pettalla14@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

Village are the smallest community entities that exist in a state structure. There are many problems faced, for example poverty, inadequate basic infrastructure, less skilled human resources, insufficient employment opportunities. Tourism village - Agri tourism is expected to be a solution to dealing with classic problems that exist in rural areas. This article aims to identify research gaps in the field of study of tourism villages in a systematic search, identify reference authors in the field of Rural Tourism, agri-tourism., Identify the theories used in the Tourism Village article. The article implements a qualitative method with the Literature review method with the help of the Perish Publish Program to compile the data script and Vos Viewer is used to analyze the data. The results show that there is an opportunity to continue studying tourism villages, especially with regard to sustainable development, involvement of local communities and development / development of tourist villages, adopting ICT for tourism villages in order to improve performance and tourism visits, and alleviate poverty. Also obtained are several authors who become references in the study of tourist villages. There are also 13 theories used in studying tourism villages and agritourism, this shows that the tourism village as an object of study is still open to being in and is very dynamic in its development.

Keywords : Tourism Village, Agri Tourism, Literature Review, Vos Viewer

Pendahuluan

Desa wisata (*rural tourism*) telah menjadi perhatian oleh para ilmuwan diberbagai belahan dunia dalam beberapa dekade terakhir. Agriwisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait (misalnya kebun, kandang hewan, peternakan hewan, industri pertanian) yang menjadi daya tarik wisatawan. Ada beberapa jenis agriwisata antara lain seperti; labirin jagung, wisata petik buah, memberi pakan hewan ternak hingga restoran di atas laut. Ada beberapa kategori tema yang berkaitan dengan desa wisata antara lain : Pertama, desa wisata dengan pengentasan kemiskinan; dalam hal ini ada yang berpendapat dan menemukan bahwa wisata desa mendukung pengentasan kemiskinan di desa (Anderson, 2015; Deller, 2010; Hillbom, 2003). Sedangkan (Hillman, 2003) yang meneiliti di Provinsi Yunan Bagian Barat China menemukan bahwa pembangunan wisata di desa di Yunan belum terbukti dapat menyelesaikan kemiskinan, bahkan orang miskin tidak memiliki akses untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata yang dibangun. Kedua, relasi antara desa wisata dan kebijakan publik (Aly, Yuliawan, Noviyanti, Firdaus, & Prasetyo, 2019; Ardi, Mistriani, Bakhri, & Dwiloka, 2018; Marcouiller, 2007; Su, Wang, & Zhang, 2018). Ketiga, desa wisata dihubungkan dengan aspek keberlanjutan (Okech, Haghiri, & George, 2012; Petrović-Randelović & Miletić, 2012; Petrović et al., 2018; Podovac & Jovanović Tončev, 2016). Keempat, desa wisata dan *marketing strategy management* (Brunori et al., 2008; Cîrstea, 2014; Knickel, Tisenkopfs, & Peter, 2009; Prabhakaran, Nair, & Ramachandran, 2014; Surchev, 2010). Kelima, desa wisata dan ICT (Polo Peña, Frías Jamilena, & Rodríguez Molina, 2013b; Townsend, Wallace, Fairhurst, & Anderson, 2017). Keenam, desa dan *health-tourism* (Droli & Osti, 2013).

Tujuan artikel ini adalah untuk; (1) menemukan kecenderungan penelitian baru dalam Kajian Desa Wisata (*rural tourism*) (2) untuk menemukan teori-teori yang digunakan oleh para peneliti dalam mengkaji *rural tourism* di berbagai belahan dunia (3) untuk mengetahui penulis- penulis rujukan utama dalam tema-tema *rural tourism* dan *agri-tourism*.

Literature Review

(Alves, Silva, & Salazar, 2017) menjelaskan bahwa *rural tourism*;

"characterized by set of tourist activities developed in rural area and committed to be agricultural Production, Stands out from other tourism modalities because its adds Value to products and services provided in the region in which it is

developed, beside promoting the cultural and Natural heritage of community in which it is Inserted".

Menurut Dewan Eropa (*European Councils*) yang dikutip oleh (Sikiri, 2015) *rural tourism* adalah;

"rural tourism is a type of tourism taking places in rural area, including all the activities carried out in respective area. The most important Characteristics of this type of tourism are a quiet environment. Lack of noise, well = preserves landscapes communication with hosts, home-made food, and involvement in the activities of the farm operation".

Humaira Irshad (2010) mendefinisikan rural tourism;

"Rural tourism can define as The "country experience" which encompasses a wide range of attractions and activities that take places in agricultural or non-urban areas. Its essential characteristics include wide-open spaces, low level of tourism development, and Opportunities for visitors to directly experiences agricultural and/or Natural environments".

Sehingga sebuah desa wisata setidaknya memiliki ciri sebagai berikut; (1) berlokasi di wilayah desa (*located in rural area*), (2) berfungsi/berjalan di desa (*functionally rural*), (3) dalam Skala desa baik dalam artian gedung dan lingkungan (*Rural in scale – Both in term a building and settlements- usually Small scale*) (4) Bercirikan Tradisional (*traditional in characters*). Humaira Irshad (2010) mengatakan bahwa ada beberapa manfaat mengembangkan desa wisata antara lain; (1) Penciptaan lapangan kerja (*job creation*), (2) *Job retention*, (3) Peluang bisnis baru (*new business opportunity*), (4) Peluang kerja untuk anak muda (*opportunity for youth*), (5) *Service retention*, (6) Diverifikasi komunitas (*community diversification*), (7) Meningkatkan desa wisata dan merevitalisasi kebanggaan Komunitas (*rural tourism enhances and revitalizes community pride*), (8) Menjaga budaya desa dan peninggalan Budaya (*Preservation of rural cultural and Heritage*), (9) Meningkatkan penjualan kerajinan dan souvenir (*increase arts and crafts sales*), (10) Konservasi Lahan (*landscape conservation*), (11) Perbaikan kualitas lingkungan (*environmental improvement*), (12) Bangunan-bangunan bersejarah (*the historic built environment*).

Pakurar & Olah (2008) mendefinisikan desa wisata;

"Rural Tourism can be defined as tourism products which approach accentuates the importance of supply management and marketing activities".

Desa wisata sebagai tema kajian ilmiah telah diteliti oleh para cendekiawan dari berbagai belahan dunia; Naderi, Nasrolahi Vosta, Ebrahimi, & Jalilvand (2019)

menemukan bahwa kepemimpinan transformatif berasosiasi secara positif dengan *social value* (nilai sosial), modal sosial, dan kinerja organisasi sosial. Kewirausahaan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai sosial, modal sosial dan kinerja, kreativitas dan nilai sosial memprediksi kinerja organisasi sosial. Modal sosial ditemukan memiliki hubungan positif dengan kreativitas. Parra López & Calero García (2006) mengatakan bahwa mereka percaya kunci sukses untuk pertumbuhan ekonomi desa dan ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi pulau Canary dapat dilakukan dengan mengaplikasikan pelayanan yang berkualitas dan sistem manajemen lingkungan pariwisata yang terintegrasi dan kedua adanya integrasi antara bisnis dan komunitas lokal.

Mahalyanaarachchi, (2016) mengatakan bahwa produk dan jasa *agri-tourism* dapat menjadi nilai tambah (*value added*) untuk mempromosikan praktek pertanian yang berkelanjutan, jika hal ini dilakukan maka akan mensupport para petani dan penggarap dimana mereka akan melakukan diversifikasi produk yang tentunya akan menambah aktivitas ekonomi mereka serta berdampak pada pendapatan masyarakat desa yang lebih baik. Royo-vela (2009) menyatakan bahwa ada dua hal yang ditemukan dalam penelitian mereka yaitu; (1) perlu membangun skala yang *realible* (cocok) untuk tipe *rural tourism* yang bersifat kauntitatif dalam mengukur *image* sebagai alat/peralatan bagi manajemen. (2) Bentuk Modelkonsep *formasi "Rural tourism- cultural destination"* juga harus memiliki relasi dengan "*In situ-emotional response*". Sedangkan Ying & Zhou (2007) menyatakan bahwa sangat penting untuk menciptakan partisipasi komunitas dalam pembangunan, pengembangan aktivitas desa wisata-*cultural destination*. Singh, Gantait, Puri, & Swamy (2016) menyatakan bahwa jika desa- desa di India dapat di *re-developed, rejuvenated* dan dipromosikan sebagai spots wisata, maka penduduk desa akan memiliki alternatif pekerjaan dan hal ini akan menyebabkan mereka tidak akan meninggalkan desa, sehingga dengan demikian kondisi sosia-ekonomi akan membaik. Untuk mencapai hal itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang *setting* desa, manusia, sosial- ekonomi, latar belakang politik dan sentimen lokal masing-masing desa.

Peneliti di Indonesia juga telah menulis tentang desa wisata misalnya (Risman, Wibhawa, & Fedryansyah, 2016) mengatakan bahwa dalam rangka memerangi kemiskinan pemerintah dapat mendorong dan mengembangkan pariwisata. Pariwisata nampaknya dapat diandalkan untuk menjadi salah satu pilihan solusi alternatif dalam proses pemberdayaan masyarakat desa dan pesisir. Di wilayah Bali (Pariwisata, Sudiarta,

& Wayan, 2016) menemukan bahwa; (a) penyebab kemiskinan diantaranya adalah faktor alam, budaya, dan kurangnya masyarakat miskin terlibat dalam sektor bisnis pariwisata (b) dampak pariwisata bagi masyarakat pesisir sangat positif karena terbukanya beberapa peluang lapangan kerja seperti; pengantar tamu *diving*, *porter* dan penjual cenderamata. Susyanti & Latianingsih (2013) mengatakan bahwa untuk menyiapkan penduduk agar mampu mengelolah desa wisata maka perlu diberikan pelatihan kompetensi untuk mengelolah desa wisata, sehingga pelestarian budaya dan pengentasan kemiskinan dapat terwujud.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam paper ini adalah metode *literatur review* secara sistematis dimana metode ini merupakan salah satu metode dalam menelaah kajian pustaka. Untuk menganalisis literatur, kami menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dan *VOS viewer*. Keduanya merupakan aplikasi yang sering digunakan untuk melakukan penelitian bibliographi. *Publish or Perish* didesain untuk menolong individu secara akademik untuk melakukan analisis pada dampak penelitian. *Publish or Perish* dapat menggambarkan metrik sitasi dengan berbagai bentuk. Sedangkan *VOS viewer* digunakan untuk memvisualkan bibliografi, atau *data set* yang berisi *field* bibliografi (judul, pengarang, penulis, nama jurnal, dan sebagainya). Dalam dunia penelitian, *Vos viewer* digunakan untuk analisis bibliometrik, mencari topik yang masih ada peluang untuk diteliti, mencari referensi yang paling banyak digunakan pada bidang tertentu dan sebagainya.

Artikel-artikel yang kami *review* berasal dari jurnal *online* dari beberapa kelompok penerbit yang mencakup; Sage, Emerald dan Sciendirect yang bisa kami *download*. Adapun tahapan dalam proses pengumpulan data yang kemudian dianalisis di *Vos viewer* dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, penulis melakukan beberapa proses, yaitu 1). Mendownload artikel jurnal dengan menggunakan *Publish or Perish* yang bersumber dari *Google Scholar* dengan total 200 jurnal. 2). Data disimpan dalam format RIS. 3). Data RIS dianalisis menggunakan aplikasi *Vos viewer* untuk mendapatkan visual. 4). Hasil analisis dengan *VOS viewer* dituliskan di *paper*. Tahap kedua, penulis melakukan beberapa proses, yaitu 1). Mendownload artikel jurnal dengan menggunakan *Publish or Perish* yang bersumber dari *crossreff*, 2). Data disimpan dalam format RIS, 3). Mengubah data di program *reference mendeley* penulis dengan *folder Rural Tourism*

– *Agritourism* menjadi format RIS. 4). Data dalam format RIS yang didapatkan dari *Publish or Perish* baik dari *Google Scholars*, *Crossreff*, dan *Mendeley* penulis selanjutnya dianalisa dengan *VOS viewer* untuk mendapatkan data visual. 5). Hasil analisa disajikan pada *paper*. Tahap ketiga. Pada tahap ini, penulis merunning untuk ketiga kalinya untuk mendapatkan hasil tentang jejaring author yang telah berkontribusi dalam penelitian desa wisata-agriwisata destinasi wisata dalam kurun waktu 2000-2020.

Hasil analisis data yang didapatkan dalam bentuk gambar yang menunjukkan tentang peta dan tema-tema yang muncul berdasarkan kategorisasi dalam *output* program *VOS viewer* yang berisi tentang visualisasi data seperti; 1) besar kecilnya garis yang menghubungkan, serta lingkaran. Hal ini berkaitan dengan besar kecilnya angka hasil analisis *VOS Viewer*, 2) beberapa angka ini menjadi terbagi menjadi *link* (jejaring yang dimiliki) dengan menghitung kekuatan *link* (dihitung berdasarkan *full* atau *fractional counting*) dan banyaknya kemunculan.

Selain itu, beberapa jenis analisis yang dilakukan dalam paper ini mencakup: a). Sitasi akan memvisualisasikan dokumen yang diamati. Dokumen yang diuji/diamati akan dihubungkan dengan dokumen lain, jika mereka menyitir artikel lain yang sama-sama diamati. Analisis ini berguna untuk memperlihatkan sitasi antar dokumen; b). *Bibliografi coupling* artikel diuji dengan memvisualisasi dan dibuatkan *networknya* jika memiliki referensi yang sama. Analisis ini menunjukkan kedekatan kajian antar dokumen; c). *Co-authorship*, menganalisis kolaborasi penulis dengan penulis lain. Analisis ini akan memvisualisasikan hasil berdasarkan nama penulis, organisasi penulis, atau negara asal penulis. Adapun hasil *output VOS viewer* memiliki tiga tampilan visualisasi, yaitu *network*, *overlay*, dan *density visualization*.

Hasil Penelitian

1. Hasil Penelitian dengan Perish Publish

Berdasarkan hasil analisa program *Perish Publish* didapatkan data tentang artikel yang dapat dikumpulkan dan selajutnya di analisa sebagai berikut.

Item		
Publication yeaes	:	2000- 2020
Paper	:	200
Citations	:	1460
Citation/years	:	7.30
Author /paper	:	0.94
h- indeks	;	22

Item		
g- indeks	:	36
hI- norm	:	18
HI- annual	:	0.86
Paper with Acc	:	1.2.5.20.20: 32.21, 7,2,1.

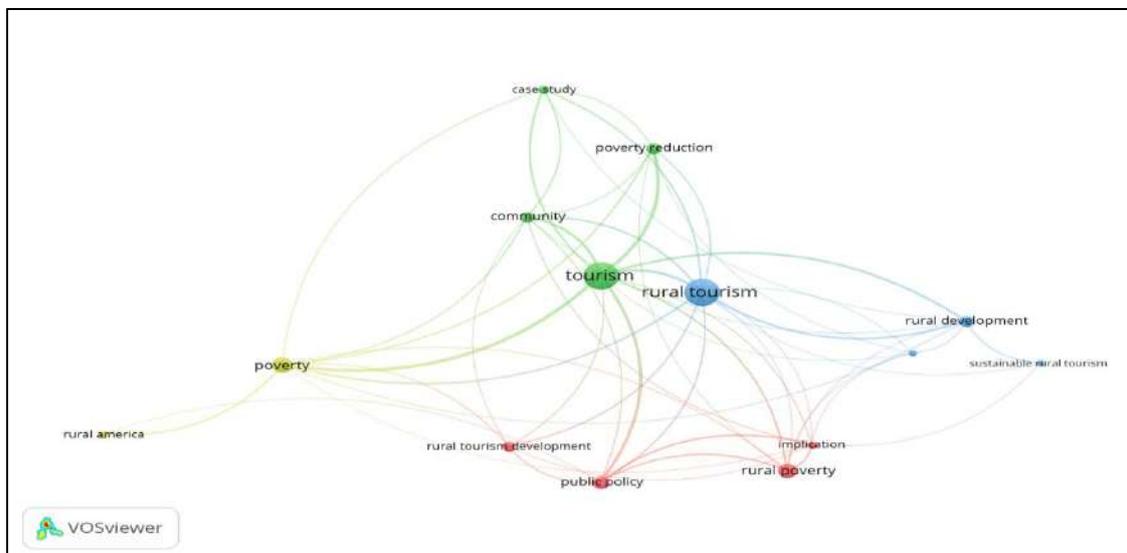
2. Analisis Tahap 2

Adapun analisis tahap kedua adalah menganalisis kumpulan data yang di dapatkan dari *Perish Publish* dengan program *VOS viewer*, didapatkan hasil sebagai berikut;

Cluster	Item dalam Kluster
1	Implikation, public policy, rural poverty, rural tourism development
2	Case study, community. Poverty reduction, tourism
3	Rural development. Rural tourism. Sustainable rural tourism, sustainable tourism
4	Poverty, rural america

Adapun Hasil Analisa Networking *Vos Viewer* sebagai berikut;

Gambar 1. Hasil Analisa Networking Vos Viewer

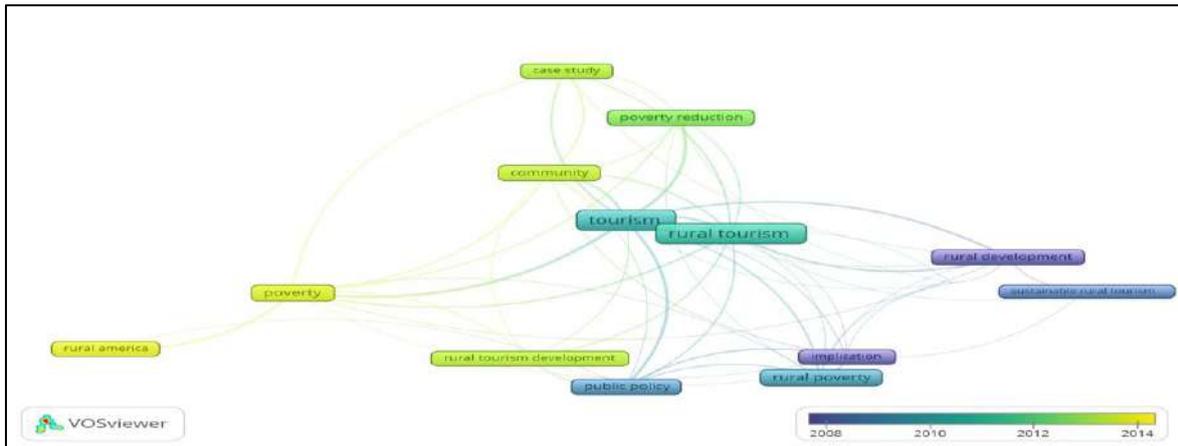


Sumber; Penulis (2021)

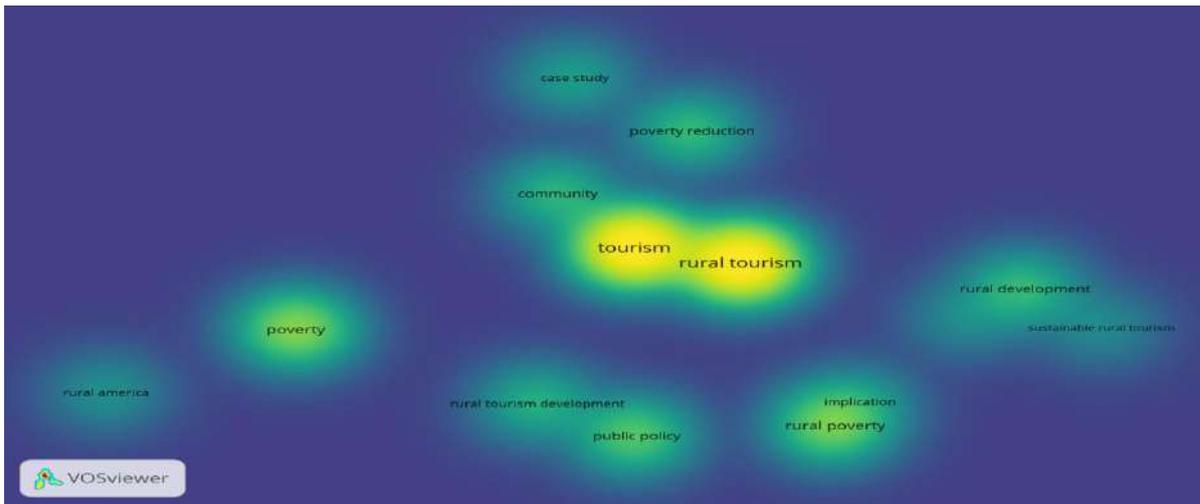
Berdasarkan *output* yang ditampilkan pada Gambar 1 terlihat bahwa jejaring tema yang tercipta ada beberapa kluster dan adapun tema-tema yang sudah banyak menjadi bahan kajian peneliti antara lain tentang *tourism*, dan *rural tourism* ditandai dengan bulatannya lebih besar dibandingkan yang lainnya, dari jejaring tersebut tersirat informasi tambahan lainnya tentang peluang untuk mendalami, meneliti *space* yang masih jarang diteliti misalnya relasi desa wisata dan pengentasan kemiskinan,

pembangunan desa, pembangunan desa wisata, kebijakan Publik dan desa wisata, desa wisata yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan garis yang menghubungkannya masih relatif kecil dan tidak tebal, serta bulatan temanya masih kecil berwarna hijau.

Gambar 2. Over Lay

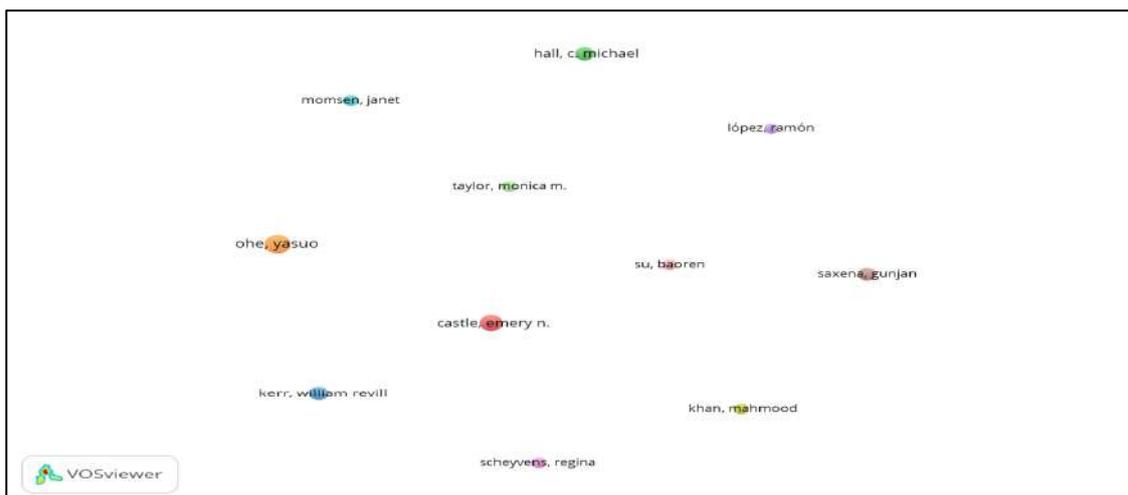


Gambar 2 adalah hasil *Output Vos View* yang menggambarkan tentang periodisasi tema-tema penelitian ini dilakukan dimana digambarkan bahwa antara tahun 2008- 2010 tema yang dikaji adalah : keterkaitan antara pariwisata dengan kebijakan publik, dampak implementasi desa wisata, wisata dan kemiskinan, pembangunan desa. Pada periode 2010- 2012 ditemukan tema-tema tentang; desa wisata direlasikan dengan penelitian study kasus wisata, komunitas di desa, pengurangan kemiskinan, Sedangkan pada periodisasi 2012- 2014 ditemukan *highlight item* seperti; wisata dan kemiskinan, pembangunan/pengembangan desa wisata.

Gambar 3. *Density*

Gambar 3 *Density* ini menunjukkan tentang tema mana yang berpeluang menjadi celah penelitian lanjutan hal ini dapat kita saksikan, dapatkan dengan memperhatikan warna dan besarnya lingkaran pada gambar, lingkaran tema yang ruangnya semakin besar menunjukkan bahwa tema seduang cenderung menjadi pusat seperti; *tourism* dan *rural tourism*, selanjutnya bulan yang sedang dan berwarna hijau seperti; *poverty reduction*, *community*, *poverty*, *rural development* memberikan syarat/ibarat bahwa tema-tema ini sudah dilirik dan telah menyita sedikit perhatian para Ilmuwan, sedangkan bulatan kecil berwarna hijau seperti; *public policy*, *sustainable developmet tourism*, memberikan petunjuk bahwa bahan kajian ini masih sedikit dan sangat kurang kaji. Hasil untuk penulis

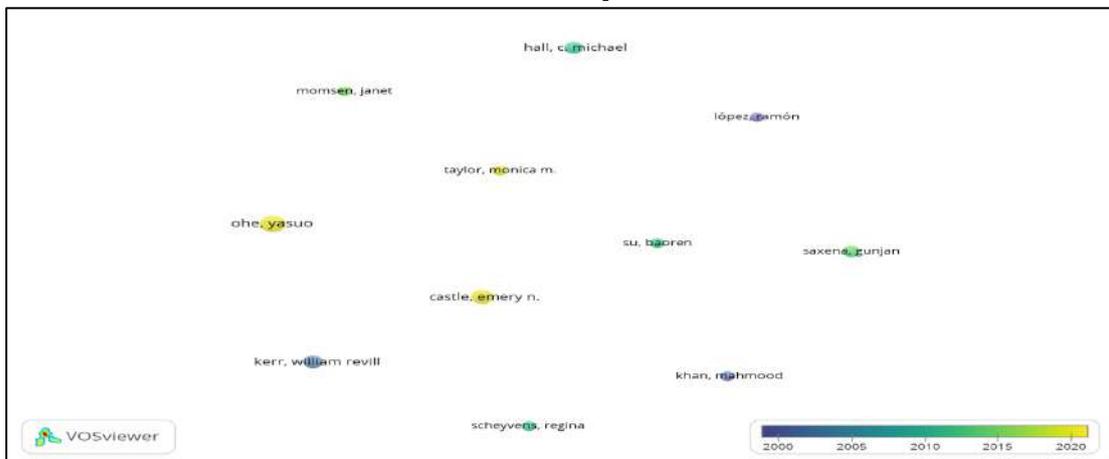
Gambar 4. Hasil untuk penulis



Berdasarkan gambar 4 memperlihatkan informasi tentang siapa saja para ilmuwan, cendekiawan yang telah meneliti yang berkaitan dengan desa wisata diberbagai dunia , namun sayangnya jejaring yang terbentuk belum terlalu erat karena para penulis yang telah berkontribusi menunjukkan bahwa mereka tidak saling berjejaring satu sama lain, tidak saling mengutip antara satu dengan yang lainnya. Antara kelompok penulis kurang dalam kolaborasi antar tema penulis.

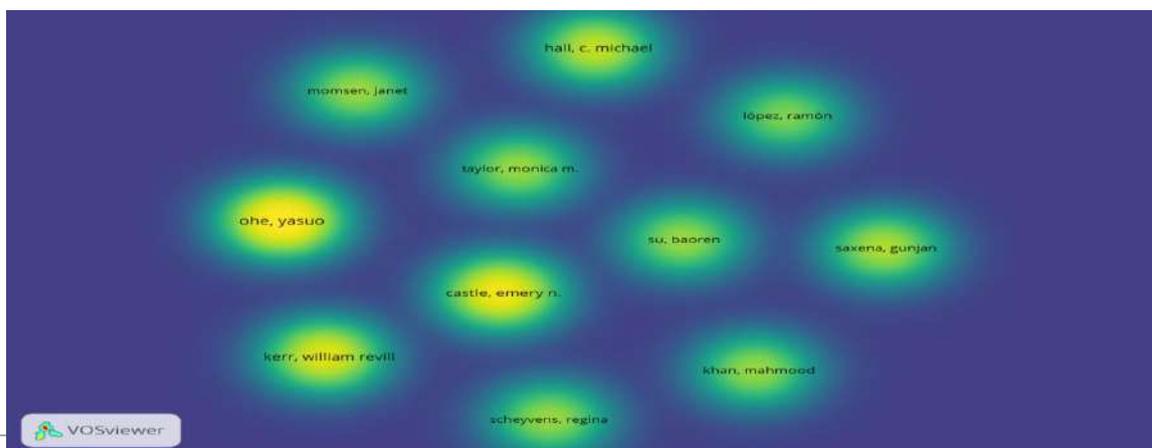
Overlay penulis

Gambar 5. Overlay Penulis



Adapun gambar 5 menggambarkan tentang kurun waktu terbitnya artikel yang dianalisa dimana *vosviewer* memberikan hasil pembagian antara lain; pertama, periode 2000-2005 muncul; Khan Mahmud, Keer, William revil. Kedua, periode 2005- 2020 diperlihatkan penulis yang berkontribusi antara lain : Scheyvenn, regina, Su Baoren, hall-Michael. Ketiga, periode (2010-2015); momsen, Janet, Lopez, ramon, periode (2015-2020) muncul penulis; Castel, Emery,n; Ohe, Yasou. Semua penulis ini adalah penulis yang dikategorikan oleh *VOS viewer* sebagai rujukan dalam penelitian Desa wisata.

Gambar 6



Gambar 6 adalah hasil analisis yang menggambarkan tentang penulis mana yang lebih dominan dan menjadi rujukan dalam tema besar desa wisata, untuk mengetahuinya dapat dilihat dari segi warna dan besar kecilnya bulatan dalam gambar *desnity*, namun dari hasil gambar dapat dilihat bahwa bulatannya cenderung relatif sama, namun dari segi warna Castel, emery, serta Ohe, Yasuo lebih kekuningan dibandingkan bulatan lainnya, sehingga hal ini dapat menjadi pertanda bahwa penulis ini relatif dapat menjadi rujukan dibandingkan dengan yang lainnya.

Adapun teori-teori yang digunakan oleh para peneliti dalam mengkaji membangun model, membahas tentang desa wisata, agri wisata adalah sebagai berikut; *Quality of Services (Chin & Lo, 2017)*, Perencanaan Strategis oleh (Su et al., 2018), *Sustainable Development (Matyakubov & Defrancesco, 2018)* dan *sustainable tourism (Podovac & Jovanović Tončev, 2016)*, *Integrated Model Of destination Competitiveness (Petrović et al., 2018)*, *Policy Planning Perspectives (Feng, Wei, Zhang, & Gu, 2018)*, *Community Empowerment (Ardi et al., 2018)* dan *community participation (Thetsane, 2019)*, *Subjective well-being Theory (Rivera, 2010)*, *Social Entrepreneurship dan Transformational Leadership (Naderi et al., 2019)*, *Poverty Theory & Rural Development (Deller, 2010)*.

Pembahasan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil penelitian *Literatur Vos viewer* didapatkan hasil tentang jejaring tema yang telah menjadi perhatian dan perodesasi terbitan artikel, peluang untuk penelitan lanjutan, serta penulis- penulis yang telah banyak berkontribusi dalam kajian desa wisata yang menarik untuk diskusikan adalah tentang dampak Implementasi desa wisata terhadap pengembangan Desa wisata relasinya dengan kesiapan penduduk Lokal agar mampu mengelola desa wisata yang memerlukan upaya/program peningkatan kapasitas manajemen wisata, pelestarian lingkungan serta pengentasan kemiskinan di desa (Susyanti & Latianingsih, 2013). Kemiskinan masih menjadi masalah yang menjadi Pekerjaan rumah, persoalan yang harus dicarikan solusinya, karena pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja seperti; pengantar tamu *diving, porter*, dan menjual cenderamata bagi pelancong yang mengunjungi desa dan obyek wisata di lingkungan mereka. (Pariwisata et al., 2016).

Pelibatan dan meningkatkan partisipasi komunitas dalam pembangunan dan aktivitas wisata di desa merupakan hal yang penting (Singh et al., 2016). Di India disarankan oleh para peneliti untuk melakukan pembangunan ulang, *rejuvenated* dan mempromosikan ulang spot wisata sehingga penduduk lokalnya memiliki alternatif pekerjaan lain, hal ini akan menyebabkan mereka tidak akan meninggalkan desa. Dengan adanya aktivitas ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja di desa maka membuat kualitas hidup penduduk lokal menjadi lebih baik., tetapi untuk sampai pada tingkat itu diperlukan pengetahuan antropologi dan manajemen perubahan ditingkat desa. (Singh et al., 2016). Dalam konteks pelibatan komunitas lokal (Fun, Chiun, Songan, & Nair, 2014) menyatakan bahwa kerangka konsep keterlibatan komunitas lokal, kualitas hubungan dan desa berkelanjutan perlu diperkuat dengan adanya *self-efficacy* dari penduduk lokal.

Berkaitan dengan tema desa wisata yang berkelanjutan (Ciblac et al., 2019) menyatakan bahwa diperlukan transformasi di desa untuk mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan *agritourism* dengan memperhatikan beberapa hal antara lain; (1) meningkatkan tingkat *civilization* dan kenyamanan pada akomodasi (rumah) dengan memperhatikan keaslian dan *diversity*. (2) merubah mental dari "*giving up way of thinking synthesised by this is fine, too*". (3) mengembangkan semangat wirausaha bagi para pemuda lokal. Perkembangan/pembangunan desa untuk maju harus didorong untuk sampai pada penggunaan, pengadopsian ICT pada desa wisata untuk menunjang kinerja desa wisata dan meningkatkan kunjungan wisata (Polo Peña, Frías Jamilena, & Rodríguez Molina, 2013a).

Penutup

Kesimpulan

Artikel Ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah penelitian dalam bidang kajian desa wisata secara penelurusan sistematis, menemukannya para penulis rujukan dalam bidang *rural tourism, agri-tourism*. Hasil analisis menyimpulkan bahwa terdapat peluang untuk melanjutkan mendasar tentang desa wisata khususnya dengan hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan, pelibatan masyarakat lokal dan pembangunan/pengembangan desa wisata, pengadopsian ICT untuk desa wisata dalam rangka meningkatkan Kinerja dan kunjungan wisata, serta pengentasan kemiskinan. Temuan lainnya bahwa didapatkan juga beberapa penulis yang menjadi rujukan dalam

kajian desa wisata dan ditemukan juga 13 teori yang digunakan dalam mengkaji desa wisata dan *agritourism*, hal ini menunjukkan bahwa desa wisata sebagai obyek kajian masih terbuka untuk di dalam dan sangat dinamis perkembangannya.

Kelemahan dan Rekomendasi

Kelemahan penelitian ini adalah bersifat kualitatif dan hanya menggunakan dua program untuk literature review yaitu *Perish or Publish* dan *VOS viewer*, dan belum menggunakan bibliometerik, dan metode kuantitatif. Kelemahan lain adalah keterbatasan naskah dan akses Penulis dalam mendapatkan jurnal yang terindeks *Scopus* dan *WOS*, yang tidak dapat dijangkau oleh *Publish Perish*. Olehnya Itu penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkannya dengan menggunakan program *software* lain dan atau memperdalam dengan penelitian kuantitatif.

Daftar Pustaka

- Alves, L. D. O., Silva, L. A., & Salazar, V. S. (2017). *Competitive Advantage in Rural Tourism: Analysis of the Strategic Resources by Farm Hotels*. 532–550.
- Aly, M. N., Yuliawan, R., Noviyanti, U. D. E., Firdaus, A. A., & Prasetyo, A. (2019). Public policy and rural tourism development in East Java Province, Indonesia. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 2019(Special Issue), 1–8.
- Anderson, W. (2015). Cultural tourism and poverty alleviation in rural Kilimanjaro, Tanzania. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 13(3), 208–224. <https://doi.org/10.1080/14766825.2014.935387>
- Ardi, R. P., Mistriani, N., Bakhri, S., & Dwiloka, B. (2018). Development Policy of Sustainable Life Community in Central Java Tourism Village, Indonesia. *The 5th IBSM International Conference on Business, Management and Accounting*, (April), 321–328. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/62580/>
- Brunori, G., Rand, S., Proost, J., Barjolle, D., Granberg, L., & DOCKES, A. C. (2008). Towards a conceptual framework for agricultural and rural innovation policies. *Projeto Insight. Report on the Conceptual Framework (WP1)*, 1–27.
- Chin, C. H., & Lo, M. C. (2017). Rural tourism quality of services: fundamental contributive factors from tourists' perceptions. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 22(4), 465–479. <https://doi.org/10.1080/10941665.2016.1276465>
- Ciolac, R., Adamov, T., Iancu, T., Popescu, G., Lile, R., Rujescu, C., & Marin, D. (2019). Agritourism-A sustainable development factor for improving the "health" of rural settlements. Case study Apuseni Mountains area. *Sustainability (Switzerland)*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/su11051467>
- Cîrstea, Ş. D. (2014). Travel & Tourism Competitiveness: A Study of World's Top Economic Competitive Countries. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 1273–1280. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00588-7](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00588-7)

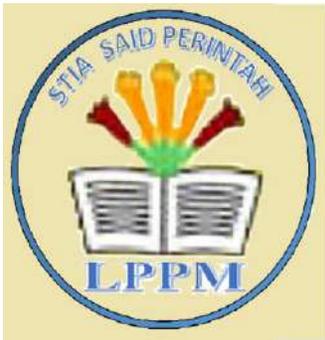
- Deller, S. (2010). Rural poverty, tourism and spatial heterogeneity. *Annals of Tourism Research*, 37(1), 180–205. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2009.09.001>
- Droli, M., & Osti, L. (2013). Developing Health Tourism in Healthier Rural Areas: the Role of Matrix-resources. *Re-Inventing Rural Tourism and the Rural Tourism Experience Conserving, Innovating and Co-Creating for Sustainability, ORTE Conference - International Conference on Rural Tourism*, (September), 317–332. <https://doi.org/10.13140/2.1.4023.9685>
- Feng, N., Wei, F., Zhang, K. H., & Gu, D. (2018). Innovating rural tourism targeting poverty alleviation through a multi-industries integration network: The Case of Zhuanshui Village, Anhui Province, China. *Sustainability (Switzerland)*, 10(7). <https://doi.org/10.3390/su10072162>
- Fun, F. S., Chiun, L. M., Songan, P., & Nair, V. (2014). The Impact of Local Communities' Involvement and Relationship Quality on Sustainable Rural Tourism in Rural Area, Sarawak. The Moderating Impact of Self-efficacy. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 144, 60–65. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.274>
- Hillbom, B. B. & ellen. (2003). Linking Economic Growth and Poverty Reduction. *Development*, (November).
- Hillman, B. (2003). the Poor in Paradise: Tourism Development and Rural Poverty in China ' S Shangri-La. *Science And Technology*, (August 2002), 545–553.
- Knickel, K., Tisenkopfs, T., & Peter, S. (2009). *Innovation processes in agriculture and rural development Results of a cross-national analysis of the situation in seven countries , research gaps and recommendations*. 1–169. Retrieved from http://www.insightproject.net/files/IN-SIGHT_final_report.pdf%5Cnwww.insightproject.net
- Mahalyanaarachchi, R. P. (2016). Agri Tourism as a Risk Management Strategy in Rural Agriculture Sector: with Special Reference to Developing Countries. *Journal of Agricultural Sciences*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.4038/jas.v11i1.8075>
- Marcouiller, D. (2007). "Boosting" tourism as rural public policy: Panacea or Pandora's box? *Journal of Regional Analysis and Policy*, 37(1), 28–31.
- Matyakubov, U., & Defrancesco, E. (2018). Role of agritourism in sustainable rural development in Uzbekistan: insights from the Italian Experience. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, VI(3), 88–102.
- Naderi, A., Nasrolahi Vosta, L., Ebrahimi, A., & Jalilvand, M. R. (2019). The contributions of social entrepreneurship and transformational leadership to performance: Insights from rural tourism in Iran. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 39(9–10), 719–737. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-06-2019-0124>
- Okech, R., Haghiri, M., & George, B. (2012). Rural Tourism as a Sustainable Development Alternative: An Analysis with Special Reference to Luanda, Kenya. *CULTUR: Revista de Cultura e Turismo*, 6(3), 36–53.
- Pakurar, M., & Olah, J. (2008). Definition of rural tourism and its characteristics in the northern great plain region. *System*, VII(November), 777–782.
- Pariwisata, K., Sudiarta, I. N., & Wayan, I. (2016). Dampak Pariwisata terhadap

- Kemiskinan di Kawasan Pariwisata di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 209–228.
- Parra López, E., & Calero García, F. J. (2006). Agrotourism, sustainable tourism and Ultraperipheral areas: The Case of Canary Islands. *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 4(1), 85–97. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2006.04.006>
- Petrović-Randjelović, M., & Miletić, D. (2012). (No) Competitiveness and Sustainable Development of Serbian Tourism. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 44, 78–87. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.007>
- Petrović, M. D., Vujko, A., Gajić, T., Vuković, D. B., Radovanović, M., Jovanović, J. M., & Vuković, N. (2018). Tourism as an approach to sustainable rural development in post-socialist countries: A comparative study of Serbia and Slovenia. *Sustainability (Switzerland)*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su10010054>
- Podovac, M., & Jovanović Tončev, M. (2016). *The Importance of Sustainable Rural Tourism Development in Serbia*. (January 2016), 575–581. <https://doi.org/10.15308/sinteza-2016-575-581>
- Polo Peña, A. I., Frías Jamilena, D. M., & Rodríguez Molina, M. Á. (2013a). Impact of Customer Orientation and ICT Use on the Perceived Performance of Rural Tourism Enterprises. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 30(3), 272–289. <https://doi.org/10.1080/10548408.2013.774921>
- Polo Peña, A. I., Frías Jamilena, D. M., & Rodríguez Molina, M. Á. (2013b). Market Orientation as a Strategy for the Rural Tourism Sector: Its Effect on Tourist Behavior and the Performance of Enterprises. *Journal of Travel Research*, 52(2), 225–239. <https://doi.org/10.1177/0047287512459108>
- Prabhakaran, S., Nair, V., & Ramachandran, S. (2014). Community Participation in Rural Tourism: Towards a Conceptual Framework. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 144, 290–295. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.298>
- Risman, A., Wibhawa, B., & Fedryansyah, M. (2016). Kontribusi Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13622>
- Rivera, M. A. (2010). *Testing the impact of tourism on competitiveness: the case of Puerto Rico*. 16, 217–234.
- Royo-vela, M. (2009). Rural-cultural excursion conceptualization: A local tourism marketing management model based on tourist destination image measurement. *Tourism Management*, 30(3), 419–428. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.07.013>
- Sikiri, D. (2015). *Model for the Implementation of the Rural Tourism Development Strategy in the Count of Zadar Concept, term and meaning of rural tourism*. 1017–1027.
- Singh, K., Gantait, A., Puri, G., & Swamy, A. (2016). Rural Tourism: Need, Scope and Challenges in Indian Context. *Hospitality and Tourism: Challenges, Innovation, Practices and Product Development (ISBN: 978-81-8435-490-4)*, (January 2018). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1164011>
- Su, H., Wang, C., & Zhang, D. (2018). *Hainan's all-for-one Rural Tourism Development*

- Path Analysis under Public Policy View — Taking Three Villages in Qionghai, Hainan as an Example.* 266(Hssmee), 361–365. <https://doi.org/10.2991/hssmee-18.2018.61>
- Surchev, P. (2010). Rural Areas - Problems and Opportunities for Development. *Trakia Journal of Sciences*, 8(3), 234–239. Retrieved from <http://www.uni-sz.bg>
- Susyanti, D. W., & Latianingsih, N. (2013). Potensi Desa melalui Pariwisata Pedesaan. *Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 33–36.
- Thetsane, R. M. (2019). Local Community Participation in Tourism Development: The Case of Katse Villages in Lesotho. *Athens Journal of Tourism*, 6(2), 123–140. <https://doi.org/10.30958/ajt.6-2-4>
- Townsend, L., Wallace, C., Fairhurst, G., & Anderson, A. (2017). Broadband and the creative industries in rural Scotland. *Journal of Rural Studies*, 54, 451–458. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.09.001>
- Ying, T., & Zhou, Y. (2007). *Community, governments and external capitals in China's rural cultural tourism: A comparative study of two adjacent villages.* 28, 96–107. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.12.025>

Elsina Sarah Tamaela¹
Iramuar Ishak Kdise²
Vils Devega Huwae³

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Pattimura
elsatamaela1977@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

Assessment is an important part of the learning process because it helps teachers to design learning process according to students' condition. The assessment developed should take notice to the learning model and approach used. Thus, it will accurately assess the achievements of students. This study has developed a PjBL assessment model using the STEM approach. Whereas, this study conducted based on the unavailability of the PjBL assessment model using the STEM approach. In this study, the experimental research type was applied which using the PjBL-STEM model treatment to students to practice high order thinking skill. The instrument used is the PjBL-STEM assessment tool which was equipped with written feedback and descriptive questions from the analysis level to the creative level. The research subjects were 35 students of grade VII at a schools in Ambon. The data analysis used is quantitative Descriptive which is strengthened by Qualitative. Moreover, the result shows that the assessment can train the thinking in the higher order thinking skill, on the other hand the improvement is not significant.

Keywords : *Assessment Model, PjBL, STEM, High Order Thinking Skill*

Pendahuluan

Upaya untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki keterampilan abad 21 perlu didukung dengan proses yang benar. Guna memenuhi proses yang benar maka guru harus mampu untuk mendesain kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran abad 21. King et al., (2003) menjelaskan karakteristik pembelajaran abad 21 sebagai berikut; 1) pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik; 2) peserta dibelajarkan untuk mampu berkolaborasi; 3) materi pembelajaran dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran harus memungkinkan peserta didik terhubung dengan kehidupan sehari-hari mereka; dan 4) dalam upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi mereka untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Salah satu pendekatan yang dapat menjawab tuntutan keterampilan abad 21 adalah Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM).

STEM bukanlah model pembelajaran namun sebuah pendekatan yang merupakan integrasi dari 4 bidang yakni sains, teknologi, rekayasa dan matematika (Mpofu, 2019). STEM diterapkan dalam dunia Pendidikan dengan tujuan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat bersaing dan siap bekerja sesuai bidangnya. Pendekatan STEM memiliki prinsip utama yakni mengkaitkan antara komunikasi, materi kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*) integrasi teknologi dan pekerjaan. Pendekatan ini fokus pada proses pembelajaran pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Selanjutnya menurut Mulyana et al., (2018) bahwa pembelajaran STEM akan membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan meningkatkan *skill* yang multirepresentatif guna menjawab kebutuhan hidup dewasa ini.

STEM saat ini belum terlalu banyak dikembangkan dalam proses pembelajaran oleh guru fisika di kota Ambon (Hasil wawancara dengan guru fisika dalam forum seminar nasional guru fisika, April 2019). Salah satu alasan yang paling banyak dikemukakan oleh guru fisika adalah minimnya pengetahuan mereka tentang STEM (bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran; bahan ajar; penilaian dan rubrik; dan bagaimana implementasi di kelas). Belum tersedianya sebuah model penilaian formatif yang baku dan terintegrasi STEM serta dapat dipakai oleh guru dalam pembelajaran IPA Fisika merupakan kendala yang ditemui sehingga diperlukan satu langkah perbaikan. Dengan demikian maka dibutuhkan model asesmen formatif yang

terintegrasi STEM serta dapat mengukur/menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh di empat disiplin ilmu.

Temuan pada guru fisika di Kota Ambon ini sejalan dengan pendapat El-Deghaidy & Mansour (2015) yang menjelaskan bahwa STEM kurang diimplementasikan dalam pembelajaran karena minimnya diskusi tentang penerapan pendekatan tersebut di kelas. Kurangnya informasi tentang implementasi STEM sudah tentu menghambat guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dan penilaian. Oleh sebab itu diperlukan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut.

STEM menurut Redkar (2012); Laforce et al., (2017); Dewi et al., (2017) dapat diintegrasikan dalam pembelajaran dengan melibatkan model PjBL. Beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pendekatan STEM dengan model PjBL dapat mengasah kemampuan kognitif manipulatif, mendesain, memanfaatkan teknologi, dan pengaplikasian pengetahuan (Capraro et al., 2013), serta kemampuan dalam mengkombinasikan antara pengetahuan kognitif dan psikomotorik (Pfeiffer et al., 2013). Menurut Sumarni, W; Wijayati dan Supanti (2019) bahwa pendekatan STEM juga dapat memperbaiki kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan ini juga merupakan kemampuan level tinggi untuk kelompok kognitif.

Dengan memperhatikan teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan STEM dengan integrasi model PjBL dapat memperbaiki kemampuan kognitif peserta pada tataran yang tinggi. Pada penelitian ini penelitian ini akan menggunakan bentuk penilaian STEM dengan integrasi PjBL. Bentuk ini akan menghasilkan sebuah model penilaian yang akan menginformasikan "akar" kegagalan dan kekuatan peserta didik dalam belajar mereka. Model penilaian ini juga merupakan *reform* terhadap bentuk penilaian yang dilakukan selama ini yakni mengintegrasikan antara asesmen unjuk kinerja, proyek dan produk dalam satu model penilaian, selain itu model asesmen ini akan memberikan kemudahan dalam proses perekaman aktivitas peserta didik selama belajar. Permasalahan utama dalam penelitian adalah bagaimana kemampuan berpikir peserta didik pada level tinggi jika diberikan perlakuan dengan model asesmen PjBL terintegrasi pendekatan STEM.

Kerangka Teoritis

Literasi STEM

STEM bukanlah sebuah model pembelajaran, namun merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh guru untuk menghasilkan peserta didik untuk

menghadapi era industri 4.0 saat ini. STEM itu sendiri menurut Bybee (2013) terdiri atas empat bagian yakni (1) pengetahuan, sikap dan keterampilan seorang individu untuk mengidentifikasi suatu masalah dalam kehidupan nyata; (2) pemahaman seorang individu mengenai karakteristik disiplin ilmu STEM ; (3) kepekaan seorang individu tentang bagaimana membentuk intelektual dan budaya lingkungan kita; dan (4) keinginan individu terkait ide atau isu-isu terkait STEM. Pembelajaran dengan pendekatan STEM tidak hanya mengajarkan konten ilmu akan tetapi melalui pendekatan ini akan menumbuhkan *soft skill* seperti kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Chamberlin & Pereira (2017) dan Mann & Mann (2017) yang menyatakan bahwa konsep yang diperoleh melalui STEM akan membantu dalam proses pemecahan masalah di kehidupan nyata.

Penggunaan pendekatan *STEM* dalam bidang pendidikan menurut Stohlmann et al., (2012) bertujuan untuk meningkatkan jumlah inovator dalam bidang STEM, memperkuat sumber daya manusia yang professional terkait STEM, meningkatkan literasi STEM untuk semua orang. Pendekatan *STEM* memiliki prinsip utama yaitu terkait komunikasi, materi, kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*), integrasi, teknologi dan karir. Enam prinsip utama tersebut terangkum dalam sains sebagai materi, teknologi sebagai produk dari ilmu sains, *engineering* sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu sains, dan komponen matematika sebagai penghubung antar komponen. Empat komponen yang meliputi Sains, Teknologi, *Engineering*, dan Matematika diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik sehingga dapat berkarir dengan baik. Integrasi antara empat komponen ini akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk cakap dalam pengetahuan dan teknologi karena dipelajari secara bersamaan (Pfeiffer et al., 2013).

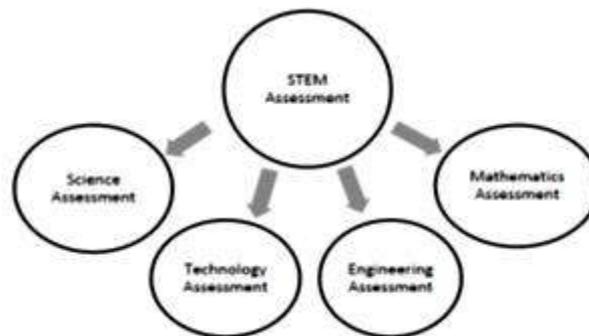
Asesmen Project Based Learning Terintegrasi STEM (PjB-STEM)

Tiga tahapan penting dalam pembelajaran adalah perancangan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian. Kegiatan penilaian pada dasarnya dapat mempengaruhi efektifitas pembelajaran karena dapat menjembatani antara belajar dan pembelajaran. Adnan et al., (2019) berpendapat bahwa penilaian yang baik akan menjadi motor penggerak untuk mengaktifkan peserta didik. Stiggins dan Chappuis (2017) mendefinisikan penilaian sebagai sebuah proses pengumpulan informasi guna memberikan keputusan dalam kegiatan pembelajaran. Guna mengambil keputusan terhadap kemajuan belajar peserta didik, maka guru tidak hanya terpaut pada satu

bentuk penilaian saja. Bentuk *paper and pencil test* tidak selamanya dapat memberikan informasi tentang kemajuan atau kendala peserta didik.

Guru dapat menggunakan lebih dari satu bentuk penilaian untuk menilai kemajuan peserta didik. Oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan gurudalam memilih dan menggunakan penilaian secara tepat sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dalam menganalisa proses belajar mengajar. Salah satu bentuk penilaian yang dapat melengkapi *paper and pencil test* adalah *alternative assessment*.

Asesmen *alternative* terdiri dari beberapa tipe diantaranya *performance assessment, project assessment dan product assessment*. Bentuk asesmen ini dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Sejalan dengan pendekatan yang digunakan saat ini yakni STEM maka asesmen yang dikembangkan juga disesuaikan dengan komponen pendekatan tersebut. Berikut Gambar 1 model asesmen dalam pembelajaran STEM menurut Capraro et al., (2013)



Gambar 1. Model Asesmen STEM

Strategi Mengembangkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi dalam Pembelajaran

Berpikir merupakan suatu aspek dari eksistensi manusia. Kemampuan untuk mewujudkan eksistensinya itu ialah dengan jalan proses berpikir. Proses berpikir itu dapat berwujud di dalam dua bentuk, yaitu proses berpikir tingkat rendah dan proses berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *higher order thinking skill* (HOTS) didefinisikan sebagai kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognisi dan kreatif (King et al., 2003). Sementara menurut Budsankom et al., (2015) menjelaskan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan sebuah proses berpikir dengan prosedur rumit yang memerlukan beberapa keterampilan seperti analisis, sintesis, perbandingan, inferensi, interpretasi, penilaian, penalaran induktif dan deduktif yang nantinya digunakan untuk memecahkan masalah.

Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan bagian dari ranah kognitif. Ranah yang berisi perilaku dengan penekanan pada aspek intelektual yakni pengetahuan dan keterampilan berpikir. Pada penelitian ini kemampuan berpikir tingkat tinggi merujuk kepada pendapat Anderson et al., (2001) yang merupakan revisi dari taksonomi Bloom. Adapun level kognitif hasil revisi yakni mengingat, memahami, aplikasi, analisis, evaluasi dan mencipta. Anderson et al., (2001) berpendapat bahwa menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta adalah bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi terdiri dari dua aspek yaitu kritis dan kreatif.

Dengan merujuk pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi maka Rofiah et al., (2013) mengklasifikasikan aspek berpikir kritis termasuk menganalisis dan mengevaluasi. Sementara ahli yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk dalam aspek berpikir kreatif yang sudah disebutkan yaitu: Conklin (2012) dan King et al., (2003) Dengan merujuk pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi maka Rofiah et al., (2013) mengklasifikasikan aspek berpikir kreatif yaitu mencipta.

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatihkan setiap saat oleh guru. Proses ini jika dibiasakan dalam pembelajaran maka akan membantu peserta didik untuk memecahkan masalah dengan kemampuan tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi menurut Insyasiska et al., (2015) dapat dilatihkan melalui pembelajaran yang berbasis proyek dan dilakukan secara berkelompok. Pendapat ini mendukung karakteristik PjBL yang dilaksanakan secara berkelompok. Menurut Chard dalam Curtis (2011) melalui pembelajaran proyek siswa dapat bebas melintasi disiplin ilmu untuk memecahkan masalah dengan memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeksplorasi dirinya.

Dengan demikian siswa termotivasi untuk bereksplorasi ketika berada dalam pembelajaran yang membebaskan mereka tanpa ada banyak aturan yang kaku seperti ketika pembelajaran yang ada di dalam kelas. Peranan pembimbingan guru pada saat pembelajaran berbasis proyek sangat penting, karena didalamnya guru akan membimbing pola pikir mereka sehingga muncul kreativitas dan cara berpikir siswa yang kritis dari lingkungan sekitarnya.

Tabel 1. Indikator Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi

Aspek	Indikator	Sub Indikator
Berpikir Kritis	Menganalisis	Memilih
		Membandingkan
	Mengevaluasi	Memeriksa
		Memulai
Berpikir Kreatif	Mencipta	Membuat
		Menyimpulkan

Berikut ini adalah beberapa strategi menurut King et al., (2003) yang dapat digunakan dalam kelas.

- a. Pembelajaran yang memberikan kesempatan pengulangan, elaborasi, organisasi, dan metakognisi
- b. Pembelajaran yang secara khusus berpusat kepada siswa
- c. Presentasi tidak lebih dari lima belas menit dan disesuaikan antara proses menggali pengetahuan dan praktek dalam pembelajaran
- d. Guru atau siswa menghasilkan pertanyaan, masalah baru, dan pendekatan baru serta memperoleh jawaban yang belum dipelajari sebelumnya
- e. Pemberian umpan balik secara langsung, spesifik, dan menginformasikan kemajuan siswa
- f. Pembelajaran menggunakan diskusi kelompok kecil, tutor teman sebaya, dan pembelajaran kooperatif
- g. Aktivitas dalam pembelajaran melibatkan tugas-tugas yang menantang keinginan siswa, guru memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas-tugas serta memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa

Bentuk pendekatan saintifik dan model problem based learning menurut Hidayati (2017) dapat menjadi model untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi juga. Sementara itu Tamaela dan Sopacua (2020) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi juga dapat dilatihkan dan dikembangkan melalui penerapan *self assessment* dalam pembelajaran. Hal ini terjadi akibat dari proses metakognisi yang berlangsung selama proses penilaian diri (*self assessment*) dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen dengan tipe kuasi eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu sekolah menengah pertama di

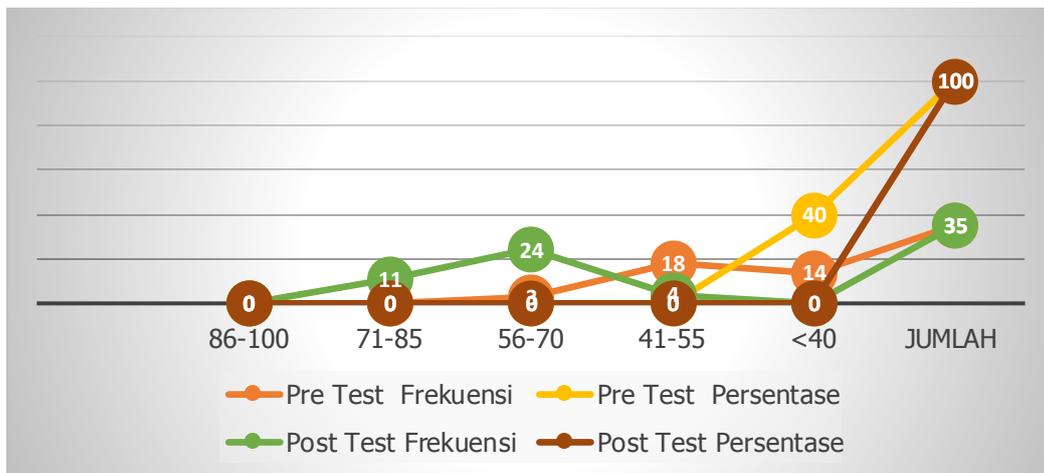
Kota Ambon. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas tujuh pada tahun ajaran 2019/2020. Sampel dalam penelitian ini diambil secara random sehingga terpilih 35 orang. Pada penelitian proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen tes dan non tes. Instrumen tes untuk mengukur kemampuan berpikir pada level tinggi dan non tes untuk mengukur proses pembelajaran. Soal tes yang diberikan dalam bentuk uraian dengan jumlah 15 butir soal yang berkisar pada C4 sampai dengan C6. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

Instrumen yang sudah divalidasi oleh ahli selanjutnya dipakai untuk menghimpun data. Data yang terhimpun meliputi data kemampuan berpikir tingkat tinggi pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran. Hasil analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi ditunjukkan pada Tabel 2. Data hasil analisis memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi setelah pembelajaran dilakukan dengan Model PjBL menggunakan pendekatan STEM. Selanjutnya hasil analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 2. Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Awal dan Akhir

Interval	Awal		Kategori	Akhir	
	Frekuensi	Persentase (100%)		Frekuensi	Persentase (100%)
86-100	-	0	Sangat tinggi	-	0
71-85	-	0	Tinggi	11	31,43
56-70	3	8,57	Sedang	24	68,57
41-55	18	51,43	Rendah	4	11,43
<40	14	40	Sangat rendah	-	0
Jumlah	35	100		35	100



Gambar 2. Grafik Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Awal & Akhir

Sementara itu hasil analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk tiap indikator memperlihatkan bahwa frekuensi peserta didik untuk level kognitif jauh lebih tinggi dibandingkan dua level lainnya. Data memperlihatkan bahwa level analisis adalah 17, level evaluasi ada 13 dan 5 untuk level kognitif yang paling akhir yakni mencipta. Hasil analisis memperlihatkan bahwa secara keseluruhan terjadi perbaikan kemampuan peserta didik akibat dari perlakuan yang dilakukan dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan PjBL.

Perbaikan terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi pada konsep fisika disebabkan oleh karakteristik PjBL yang berbasis proyek. Hal ini didukung dengan pendapat Curtis (2011) yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang berbasis proyek akan membantu siswa untuk memecahkan masalah dikarenakan kebebasan mereka untuk mengeksplorasi dirinya. Kebebasan dalam mencari informasi tentang konsep yang dipelajari melalui proyek yang dilakukan. Belajar dengan proyek dan berkelompok merupakan ciri belajar secara konstruktif. Bentuk pembelajaran yang demikian sesungguhnya relevan dengan pendekatan STEM. Sejalan dengan itu Bie (2012) berpendapat bahwa pembelajaran berbasis sains proyek mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan, menanggapi pertanyaan dari sebuah masalah yang kompleks atau tantangan yang diberikan serta dapat melatih keterampilan abad 21 (kolaborasi, komunikasi dan berpikir kritis). Secara keseluruhan sebuah model akan berdampak kuat terhadap kemampuan berpikir siswa juga didukung dengan komponen asesmen.

Bentuk asesmen PjBL yang didesain dengan memperhatikan sintak dan karakteristik model dalam penelitian ini membuktikan bahwa sangat mempengaruhi hasil

akhir. Melalui informasi penilaian PjBL yang terintegrasi pendekatan STEM memperlihatkan bahwa siswa mengetahui kendala maupun kekuatan mereka di setiap sintak. Temuan ini mendukung pendapat Tamaela & Sapulette (2019) bahwa dengan mengintegrasikan asesmen ke dalam proses pembelajaran secara benar akan memberikan dampak yang baik terhadap hasil belajar mereka.

Penutup

Asesmen PjBL dengan integrasi pendekatan STEM telah terbukti dapat memperbaiki kemampuan berpikir peserta didik. Hal ini terjadi akibat proses metakognisi yang berlangsung dalam diri siswa. Hasil analisis dari penelitian ini juga membuktikan bahwa integrasi asesmen secara tepat dalam kegiatan pembelajaran akan membantu peserta didik untuk memperbaiki kinerja dan hasilnya.

Daftar Pustaka

- Adnan, N. L., Sallem, N. R. M., Muda, R., & Wan Abdullah, W. K. (2019). Is current formative assessment still relevant in turning students into deep learners? *TEM Journal*, 8(1), 298–304. <https://doi.org/10.18421/TEM81-41>
- Anderson, L. W., Krathwohl Peter W Airasian, D. R., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., & Wittrock, M. C. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives*. Pearson Education. <https://www.uky.edu/~rsand1/china2018/texts/Anderson-Krathwohl - A taxonomy for learning teaching and assessing.pdf>
- Budsankom, P., Tatsirin Sawangboon, Damrongpanit, S., & Chuensirimongkol, J. (2015). Factors affecting higher order thinking skills of students: A meta-analytic structural equation modeling study. *Educational Research and Reviews*, 10(19), 2640–2652. <https://doi.org/10.5897/ERR2015>
- Capraro, R. M., Capraro, M. M., & Morgan, J. R. (2013). STEM project-based learning an integrated science, technology, engineering, and mathematics (STEM) approach. *STEM Project-Based Learning an Integrated Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Approach, January 2013*, 1–210. <https://doi.org/10.1007/978-94-6209-143-6>
- Chamberlin, S. A., & Pereira, N. (2017). *Differentiating engineering activities for use in a mathematics setting*. In D. Dailey & A. Cotabish (Eds.), *Engineering Instruction*

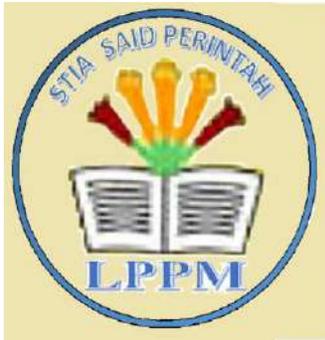
- for High-Ability Learners in K-8 Classrooms (pp. 45–55).
- Conklin, W. (2012). *Higher-order thinking skills to develop 21st century learners*. Shell Education Publishing, Inc.
- Curtis, S. M. (2011). Formative assessment in accounting education and some initial evidence on its use for instructional sequencing. *Journal of Accounting Education*, 29(4), 191–211. <https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2012.06.002>
- Dewi, H. R., Mayasari, T., & Jeffry, H. (2017). Peningkatan ketrampilan berfikir kreatif siswa melalui penerapan inkuiri terbimbing berbasis STEM. *Seminar Nasional Pendidikan Fisika 3, 20*, 47–53. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/snpf>
- El-Deghaidy, H., & Mansour, N. (2015). Science Teachers' Perceptions of STEM Education: Possibilities and Challenges. *International Journal of Learning and Teaching*, 1(1), 51–54. <https://doi.org/10.18178/ijlt.1.1.51-54>
- Hidayati, R. (2017). Keefektifan setting TPS dalam pendekatan discovery learning dan problem-based learning pada pembelajaran materi lingkaran SMP. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 4(1), 78. <https://doi.org/10.21831/jrpm.v4i1.9451>
- Insyasiska, D., Zubaidah, S., & Susilo, H. (2015). Pengaruh Project Based Learning Terhadap Motivasi Belajar, Kreativitas, Kemampuan Berpikir Kritis, Dan Kemampuan Kognitif Siswa Pada Pembelajaran Biologi. *Jurnal Pendidikan Biologi*, 7(1), 9–21. <https://doi.org/10.17977/um052v7i1p9-21>
- King, F., Goodson, L., & Faranak Rohani, M. (2003). Higher Order Thinking Skills • Definition • Teaching Strategies • Assessment A publication of the Educational Services Program, now known as the Center for Advancement of Learning and Assessment. *Voices from the Middle*, 88(18), 495–496. <http://lt.msu.edu/issues/june2016/lee.pdf> <http://lt.msu.edu/issues/june2016/lee.pdf> <http://www.cala.fsu.edu> <http://www.ascd.org/memberbooks> <http://www.21stcentury skills.org> <http://www>
- Laforce, M., Noble, E., & Blackwell, C. (2017). Problem-based learning (PBL) and student interest in STEM careers: The roles of motivation and ability beliefs. *Education Sciences*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/educsci7040092>
- Mann, E. L., & Mann, R. L. (2017). *Engineering design and gifted pedagogy*. In D. Dailey & A. Cotabish (Eds.), *Engineering Instruction for High-Ability Learners in K-8 Classrooms* (pp. 33–44).
- Mpofu, V. (2019). A Theoretical Framework for Implementing STEM Education. In

- Kehdinga George Fomunyan (Ed.), *Theorizing STEM Education in the 21st Century* (pp. 109–123).
- Mulyana, K. M., Abdurrahman, & Rosidin, U. (2018). Implementasi Pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Untuk Menumbuhkan Skill Multipresentasi Siswa Pada Materi Hukum Newton Tentang Gerak. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 7(2), 69–75.
- Pfeiffer, H. D., Ignatov, D. I., Poelmans, J., & Gadiraju, N. (2013). Conceptual Structures for STEM Research and Education. *20th International Conference on Conceptual Structures, ICCS 2013*.
- Redkar, S. (2012). Teaching Advanced Vehicle Dynamics Using a Project Based Learning (PBL) Approach. *Journal of STEM Education: Innovations and Research*, 13(November), 17–29.
[http://search.proquest.com/docview/1015211569?accountid=14717%5Cnhttp://p.utoriasfx.hosted.exlibrisgroup.com/pretoria?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ:engineeringjournals&atitle=Teaching+Advanced+Vehicle+Dynamics+Using+a+Project+Based+Learning+\(PBL\)+Approach&title=Journal+of+STEM+Education+:+Innovations+and+Research&issn=15575276&date=2012-05-01&volume=13&issue=3&page=17&au=Redkar,+Sangram&isbn=&jtitle=Journal+of+STEM+Education+:+](http://search.proquest.com/docview/1015211569?accountid=14717%5Cnhttp://p.utoriasfx.hosted.exlibrisgroup.com/pretoria?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ:engineeringjournals&atitle=Teaching+Advanced+Vehicle+Dynamics+Using+a+Project+Based+Learning+(PBL)+Approach&title=Journal+of+STEM+Education+:+Innovations+and+Research&issn=15575276&date=2012-05-01&volume=13&issue=3&page=17&au=Redkar,+Sangram&isbn=&jtitle=Journal+of+STEM+Education+:+)
- Rofiah, E., Nonoh, s. A., & Ekawati, E. Y. (2013). PENYUSUNAN INSTRUMEN TES KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI FISIKA PADA SISWA SMP Oleh: Emi Rofiah, Nonoh Siti Aminah, Elvin Yusliana Ekawati Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 1(2), 17–22.
- Stiggins, R. J., & Chappuis, J. (2017). *An Introduction To Student- Involved Assessment FOR Learning* (7th ed.). Pearson Education.
- Stohlmann, M., Moore, T., & Roehrig, G. (2012). Considerations for Teaching Integrated STEM Education. *Journal of Pre-College Engineering Education Research*, 2(1), 28–34. <https://doi.org/10.5703/1288284314653>
- Sumarni, W; Wijayati, N., & Supanti, S. (2019). Melalui Pembelajaran Berbasis Proyek. *Jurnal Pembelajaran Kimia*, 4(1), 18–30.
- Tamaela, E. S., & Sopacua, V. (2020). Self Assessment (Kunci Keberhasilan Mahasiswa

Calon Guru Dalam Menganalisis Konsep). *Biosel: Biology Science and Education*, 9(1), 60. <https://doi.org/10.33477/bs.v9i1.1318>

Maryam Salampessy¹
Matheus Rumaratu²
(Penulis Korespondensi)

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara STISIP Kebangsaan Masohi
matheusrumaratu@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah
Volume 2, No. 1, Maret 2021

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study aims to determine the quality of public services at the Ambon City's Population and Civil Registration Service Offices, and the dimensions of employee professionalism which are supporting and inhibiting factors for improving the quality of public services at the Ambon City's Population and Civil Registration Service Offices. The data was collected in this study were analyzed using descriptive qualitative analysis techniques through steps, or components of interactive model data analysis. Data collection techniques used through this research are interviews, observation and documentation. The results of this study indicate, the level of quality of public services by the administering apparatus of the field of population administration and civil registration at the Ambon City's Population and Civil Registration Service is in sufficient condition, this is a contribution of the employee's work professionalism factor.

Keywords : Professionalism, Quality of Public Services

Pendahuluan

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting yang memperoleh perhatian serius untuk terus dilakukan peningkatannya oleh aparat penyelenggara pemerintah daerah saat ini agar menjadi optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan warga masyarakat sesuai haknya berdasarkan ketentuan peraturan perUndang–Undangan yang berlaku. Tinggi atau rendahnya kualitas pelayanan publik yang terdapat pada suatu organisasi pemerintahan daerah menjadi ukuran bagi tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi pemerintahan daerah tersebut, termasuk Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada suatu daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD yang membidangi Administrasi Kependudukan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Undang–Undang mempunyai kewenangan melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa penting.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang diatas tentang Administrasi Kependudukan, pasal 32 ayat (2), menegaskan bahwa pelayanan pencatatan sipil, meliputi: a) kelahiran, b) kematian, c) lahir mati, d) perkawinan, e) pengakuan anak, f) pengesahan anak, g) pengangkatan anak, h) perubahan nama, j) perubahan status kewarganegaraan, k) pembatalan perkawinan, l) pembatalan perceraian, dan m) peristiwa penting lainnya. Selain itu dalam pasal 33, pejabat pencatatan sipil pada UPDT Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi: a) kelahiran, b) kematian, c) perkawinan, d) perceraian, dan e) pengakuan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara terintegrasi menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat melalui program *three in one/four in one*, sekali pengurusan dapat tiga/ empat dokumen KK, KTP, Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak (jika sudah memiliki anak sebelum pelaksanaan pencatatan perkawinan).

Sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Melaluinya diharapkan agar para pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, memiliki profesionalisme kerja yang tinggi sehingga dapat memungkinkan mereka dapat menampilkan dan mencapai kinerja yang optimal sebagaimana yang diharapkan.

Sesuai hasil pengamatan yang dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, ditemukan beberapa fenomena yang pada dasarnya menunjukkan belum optimal kualitas pelayanan pegawai, hal ini ditandai dengan; 1) banyaknya warga masyarakat dalam antrian panjang untuk mengurus dan mendapatkan layanan administrasi kependudukan, 2) kecenderungan pegawai yang begitu lama dalam pemberian layanan kepada warga dengan menunggu nama dipanggil hingga ke meja pelayanan terasa begitu rumit dan mumet. Bahkan tak sedikit yang memilih pulang, 3) masih tertundanya layanan yang harus diperoleh warga masyarakat, dengan alasan terdapat gangguan sistem peralatan, karena padamnya listrik/mesin pencetak berpotensi rusak dan bisa jadi lebih lama lagi perbaikannya. 4) Sementara disisi lain, ditemui pula bahwa tingkat pengetahuan, ketrampilan kerja, kesanggupan kerja, dan pengalaman kerja sebagian pegawai belum sepenuhnya memadai sebagaimana yang diharapkan, 5) mengenai keramahan beberapa pegawai di Kantor kepada pengguna layanan yang datang. Ketidakramahan tersebut terlihat ketika apabila pelayanan terlalu banyak/berjubel maka pegawai berniat untuk mengatur pun menegur masyarakat masyarakat agak keras meski masih menggunakan bahasa yang wajar.

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan gambaran mengenai kualitas pelayanan publik, serta dimensi–dimensi profesionalisme kerja pegawai yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, masalah yang dihadapi dalam penelitian ini dirumuskan adalah; Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan apa dimensi-dimensi profesionalisme pegawai yang menjadi faktor–factor pendukung dan penghambat peningkatan kualitas pelayanan publik pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Kerangka Teoritis

Bersumber pada tinjauan pustaka diatas, dapat dikemukakan kerangka teoritis sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dan strategis yang saat ini terus memperoleh perhatian serius oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Ambon.

Berkaitan dengan hal itu, harus diupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pimpinan dan aparat penyelenggaranya pada suatu organisasi publik atau organisasi pemerintahan daerah guna tercapainya keprofesionalan kinerja pegawai.

Professionalisme Kerja Pegawai

Menurut Sondang P. Siagian, (2014) profesionalisme kerja pegawai diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi; 1) Kreativitas (*Creativity*). Kemampuan aparat untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi, 2) Inovasi (*Innovation*) yang perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan, dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai, serta responsivitas (*responsible*) yang merupakan kemampuan aparat dalam sesuatu yang baru. Birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Disisi lain Mukarom, Zainal & Laksana, (2016) menyebutkan ukuran-ukuran untuk melihat profesionalisme kerja pegawai pada suatu organisasi, meliputi; 1) komitmen dan konsistensi, 2) wewenang dan tanggung jawab, 3) integritas dan profesional, 4) ketepatan/keakurasian dan kecepatan, 5) disiplin dan keteraturan kerja, serta 6) penggunaan iptek.

Berdasarkan pendapat diatas, maka profesionalisme kerja pegawai dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan yang dimiliki (*competency*) yang dimiliki setiap pegawai sesuai kebutuhan pekerjaan yang diembannya pada suatu organisasi, berupa; a) pengetahuan (*knowledge*), b) keterampilan (*skill*), c) kesanggupan melakukan (*ability*), dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya yang ditunjang dengan, d) pengalaman kerja (*experience*) yang dimiliki, e) disiplin kerja (*discipline*), f) kreativitas kerja (*creativity*), dan g) inovatif kerja pegawai (*innovative*).

Kualitas Pelayanan Publik

Ditegaskan oleh Supriyono, (2001) bahwa;
"Aparatur pemerintah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dimulai dari daya tanggap terhadap tuntutan publik, menerjemahkan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi yang memerlukan penerapan prinsip "3 Es" (Economy), Effectiveness, Effisiensi) dan "3 R'S" (Responsiveness, Representativeness, Responsibility)".

Pelayanan publik yang berkualitas mempunyai sejumlah aspek atau dimensi, yang dapat dijadikan ukuran guna melihat intensitasnya pada suatu organisasi. Kualitas pelayanan publik menurut Fitzimmons (Sedarmayanti., 2012), dapat dilihat pada lima dimensi, berikut: a) *Reliability*, kemampuan memberikan secara tepat dan benar, jenis pelayanan yang telah dijanjikan kepada masyarakat, b) *Responsiveness*, kesadaran atau keinginan untuk membantu dan memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat, c) *Assurance*, pengetahuan atau wawasan, kesopanan, kesantunan, kepercayaan diri dari pemerintah, serta respek terhadap masyarakat, d) *Empathy*, kemauan pemerintah untuk melakukan pendekatan, memberikan perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai proses pemberian layanan administratif oleh aparat penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan dan harapan warga masyarakat, dilihat dari langkah-langkah atau cara-cara melalui dimensi-dimensi yaitu; 1) *reliability* pelayanan, 2) *responsiveness* pelayanan, 3) asuransi pelayanan, 4) *empathy* pelayanan, dan 5) *tangibles* pelayanan, 6) efektivitas pelayanan, dan 7) efisiensi pelayanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk melakukan analisis dan menjelaskan mengenai kualitas pelayanan publik, serta dimensi-dimensi profesionalisme kerja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Penelitian ini dilaksanakan dengan struktur penelitian sebagai berikut;

1. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terdiri atas data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.
2. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.
3. Informan kunci (*key Informan*) dalam penelitian ini mencakup pihak – pihak yang dipandang dekat dan mengetahui secara langsung data dan informasi mengenai masalah. Berjumlah 11 orang, dimana kelompok internal berjumlah 5 orang dan kelompok eksternal berjumlah 6 orang.
4. Data primer ber sumber dari informan penelitian yang di jaring melalui wawancara mendalam (*depth interview*), observasi dan dokumentasi. Sementara data sekunder, dari penelusuran dan pengamatan terhadap dokumen–dokumen tertulis pada lokasi penelitian dan studi kepustakaan (*library research*).
5. Teknis analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif.

Pembahasan Hasil Penelitian

Data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian lapangan mengenai kualitas pelayanan publik setelah diolah, dilakukan analisis sebagai pembahasan hasil sebagai berikut.

Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu faktor penting yang harus diwujudkan oleh pimpinan dan aparat penyelenggaranya pada Dinas ini. Untuk melihat tinggi atau rendahnya tingkat kualitas pelayanan yang diberikan, digunakan tujuh dimensi yakni: *Reability, Responsiveness, Assurance, Empathy, Tangibles*, Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan. Berdasarkan pemaparan hasil analisis data diatas yang di himpun dari penelitian lapangan, diperoleh gambaran mengenai kualitas pelayanan publik secara administratif oleh aparat penyelenggara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

a. Dimensi *Responsiveness* (Ketanggapan)

Responsiveness (ketanggapan) merupakan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru. Menurut (Sondang P. Siagian, 2014) bahwa tidak tanggap

dapat berarti kekecewaan rakyat yang pada gilirannya mungkin berakibat pada timbulnya krisis kepercayaan kepada pemerintah.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan harapan warga masyarakat, berada dalam kondisi baik terutama dari dimensi *responsiveness* (ketanggapan), dalam hal pegawai selalu menampilkan sikap tanggap dalam memberikan layanan bagi warga yang membutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tampaknya dimensi *responsiveness* pelayanan publik bidang administratif pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berada pula dalam kondisi sangat baik dikarenakan adanya hasil wawancara yang menunjang antara Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) selaku pimpinan dengan staf penyelenggara Kasubag Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Ibu JL). Kemudian dengan hasil wawancara kelima informan warga masyarakat yang sependapat karena kinerja para pegawai sejauh ini telah dilihat mampu dan cepat tanggap sesuai tugas masing-masing dalam memberikan pelayanan di kantor.

b. Dimensi *Reliability* (Keandalan)

Kehandalan dalam berupa kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai denganyang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama, untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi'.

Pada dimensi *reliability* (keandalan), tampak dari pegawai selalu memperlihatkan sikap andal dalam memberikan layanan bagi warga yang membutuhkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tampaknya dimensi *reliability* pelayanan publik bidang administratif pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon berada dalam kondisi baik dikarenakan terdapatnya kesesuaian hasil wawancara dengan Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) selaku pimpinan dengan staf penyelenggara Kasubag perencanaan dan Keuangan (Bapak R.P), serta Kabid Umum dan Kepegawaian (Ibu L.M). Hal ini pun didukung dengan hasil wawancara keempat informan warga masyarakat yang sependapat karena puas dengan kecermatan pelayanan di kantor meskipun hanya satu informan yang tidak sependapat.

c. Dimensi Efisiensi (Cara - cara terbaik)

Menurut Sondang P. Siagian, (2014);

"Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dengan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang digunakan), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan".

Dimensi efisiensi (cara-cara terbaik), hal ini dapat disimak dari pegawai selalu menampilkan cara yang murah, mudah, dengan jarak yang pendek, dan cara yang ringan. Oleh karena itu hasil wawancara dengan Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) selaku pimpinan saling melengkapi dengan staf penyelenggara dalam hal ini Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (Ibu R.S), tentang dimensi efisiensi dalam pelayanan publik kepada warga masyarakat yang membutuhkan, kemudian disesuaikan dengan keempat informan warga masyarakat yang sependapat karena dirasakan sudah mampu menunjukkan penggunaan cara kerja dengan prosedur yang pendek, murah, ringan, dan mudah bagi warga masyarakat di kantor, meskipun hanya satu informan yang tidak sependapat. Sehingga dari data informan diatas menunjukkan bahwa tampaknya dimensi efisiensi pelayanan publik bidang administratif pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon berada dalam kondisi baik.

d. Dimensi Emphaty (Empati)

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra, (2005);

"Empati merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para konsumen. Setiap anggota perusahaan hendaknya dapat mengelola waktu agar mudah dihubungi, baik melalui telepon ataupun bertemu langsung. Dering telepon usahakan maksimal tiga kali, lalu segera dijawab. Ingat, waktu yang dimiliki pelanggan sangat terbatas sehingga tidak mungkin menunggu terlalu lama".

Bersumber dari data hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tampaknya dimensi *emphaty* pelayanan publik bidang administratif pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon berada dalam kondisi cukup, karena hasil petikan wawancara dengan dengan Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) selaku pimpinan dengan staf penyelenggara yaitu Kasubag Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil (Ibu R.S), tentang dimensi *empathy* dalam pelayanan publik kepada warga masyarakat yang membutuhkan didukung oleh keempat informan warga masyarakat lainnya dan hanya satu pendapat saja yang bertolak belakang dari informan Ibu Y.A. dapat dilihat sikap pegawai yang terkadang

berusaha untuk mengetahui masalah dan keluhan yang dihadapi warga yang datang berurusan.

e. Dimensi Assurance (Jaminan)

Definisi jaminan dalam Lupiyoadi, (2001) yaitu;
"Pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi (competence) dan sopan santun (courtesy)".

Berdasarkan hasil-hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tampaknya dimensi assurance pelayanan publik bidang administratif pada Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon berada dalam kondisi cukup. Dalam hal ini, hasil wawancara dengan Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) yang menyatakan telah memaksimalkan kualitas para pegawainya mulai dari pembinaan, pelatihan, sosialisasi bahkan adanya evaluasi, namun tentunya attitude itu kembali ke masing-masing pribadi para pelayan publik. Data pun dikobinasikan melalui wawancara dengan staf penyelenggara dalam hal ini kasubag Bidang Piak dan Pemanfaatan Data (Ibu H.T) sebagai informan pegawai yang melakukan kegiatan di kantor bahwa beliau sendiri telah maksimal dalam memberikan pelayanan. Informasi dari kelima informan warga masyarakat, hanya dua Informan (Ibu M.M) dan (Bapak M.R) yang setuju serta puas dengan pelayanan yang mereka dapatkan, akan tetapi tiga informan lainnya (Bapak Y.I), (Ibu Y.A) dan (Ibu S.L) yang berpendapat bahwasanya untuk hal kesopanan tersebut dirasakan kurang terlalu nampak karna juga tergantung pada sifat dan karakter masing-masing pribadi dari para pegawai yang berbeda satu dengan yang lain. Dimensi assurance (jaminan) berada dalam kondisi cukup. Disisi lain terhadap Dimensi assurance/jaminan dalam pemberian pelayanan, pegawai berusaha untuk memberikan jaminan atas janji yang harus dipenuhi sesuai standar yang tersedia.

f. Dimensi Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Pengertian efektivitas menurut Sondang P. Siagian, (2014) yakni;

"Suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan."

Mengenai Dimensi efektivitas pegawai dalam pemberian pelayanan berdasarkan dengan hasil–hasil wawancara menunjukkan bahwa tampaknya dimensi efektivitas pelayanan publik bidang administratif pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon berada dalam kondisi cukup. Dapat kita lihat pada dengan Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Ibu J.L) yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pegawai telah maksimal dalam meningkatkan efektivitas pelayanan agar lebih baik dari yang dahulu, namun kembali lagi kepada output penilaian oleh masyarakat, data ini pun mendukung adanya tanggapan positif dari tiga informan warga masyarakat diantaranya (Ibu S.L, Ibu Y.A dan Ibu M.M), yang setuju bahwa pelayanan yang diterima sudah efektif dan tak bertele-tele bahkan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hanya dua informan warga masyarakat yang pendapatnya terdengar berbeda yaitu (Bapak Y.I dan Bapak M.R) sebab mereka sendiri mengaku tidak tahu dan kurang memperhatikan perihal salah satunya tentang ketepatan waktu masuk kerja pegawai kantor. Melalui observasi sendiri tampak bahwa ketepatan waktu yang telah ditetapkan masih tidak selalu dapat dipenuhi, dalam arti waktu yang ditetapkan warga memperoleh hak layanan menjadi molor waktunya antara 1 – 3 hari, karena disebabkan kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi warga, namun juga akibat kerusakan peralatan yang dipicu dari tinggi volume kerja, bahkan listrik tiba padam. Oleh karena itu, Dimensi Efektivitas berada dalam kondisi cukup.

g. Dimensi *Tangibles* (Ketampakan)

Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, reorientasi fisik dari jasa. Definisi tangible menurut Wang & Wang dalam Felix, (2017) adalah peralatan yang baru, fasilitas yang menarik, penampilan profesional, dan materi yang berkaitan dengan pelayanan.

Dimensi *tangibles* (ketampakan) pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berada dalam kondisi masih kurang. Hal ini dapat dilihat melalui data observasi yang diamati dari ruang kantor secara umum sudah tidak representatif untuk menghandel volume kerja dalam proses pemberian layanan bagi warga masyarakat yang berurusan dengan jumlah banyak sehingga kantor menjadi

penuh dan menyesak, kapasitas *Air Condition* (AC) yang sangat kurang karena hanya tersedia satu buah di ruang tunggu.

Hasil data yang ditemukan melalui observasi kemudian digabungkan hasil wawancara informan telah menunjukkan bahwa tampaknya dimensi tangibles pelayanan publik bidang administratif pada Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Ambon berada dalam kondisi kurang baik. Berikut hasil wawancara dengan Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) yang memberikan tanggapan selalu mengupayakan evaluasi agar pegawai selalu terlihat prima dan maksimal memberikan pelayanan mulai dari *attitude* dan terkait ketampakkan kerapian dalam berseragam PNS, hanya saja adanya faktor kekurangan yang masih dirasakan salah satunya adalah keterbatasan ruangan dan fasilitas fisik. Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf penyelenggara dalam hal ini Kasubag Bidang Perencanaan (Bapak R.P) bahwa adanya standar-standar yang belum bisa dipenuhi, aturan-aturan untuk suatu ruangan yang layak sebab ruangan juga salah satu faktor mempengaruhi kinerja pegawai akan tetapi kita harus bisa menerima keadaan. Hal ini pun ditunjukkan dengan hasil wawancara dan obsevasi pada kelima informan warga masyarakat yang lintas semua diantaranya, mengemukakan pendapat yang sama bahwa fasilitas berupa sarana dan prasarana masih amat sangat kurang, kecilnya ruangan menunggu. Apalagi, persediaan kursi yang terbatas, AC tak lagi terasa dingin dan kebersihan toilet yang hanya satu sebab lainnya terkunci serta tidak higienis.

Profesionalisme Kerja Pegawai

Profesionalisme kerja pegawai suatu organisasi, diukur melalui keahlian yang dimiliki seseorang yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang dibebankan oleh organisasi kepada seseorang. Sehingga, tujuan organisasi dapat tercapai melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa atau masyarakat yang ada ketika melakukan pengurusan terhadap masalah yang dialami. Guna mengetahui hal ini dapat ditampilkan hasil penelitian secara berurutan. Optimalnya kualitas pelayanan publik tersebut, memperoleh dukungan dari faktor profesionalisme kerja pegawai, terutama aspek;

a. Faktor Tingkat Keterampilan Kerja

Terbentuknya aparatur profesional memerlukan keahlian dan keterampilan kerja khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrument

pemutakhiran. Jadi dengan keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparatur memungkinkan terpenuhinya kecocokan antara kemampuan aparatur dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang professional.

Faktor tingkat keterampilan kerja yang berada dalam kondisi sangat baik. Dikarenakan pada tingkat keterampilan kerja tercapainya kesesuaian hasil wawancara antara Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Ibu L.M), tentang tingkat keterampilan kerja bahwasanya pentingnya diadakan bimtek dan adanya keahlian khusus yang mesti dimiliki oleh aparatur sipil Negara demi menunjang kesuksesan dalam pelayanan publik kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Kemudian ditunjang dengan hasil observasi dan wawancara dari kelima informan yang semuanya setuju akan faktor keterampilan kerja pegawai telah sesuai dengan harapan, namun hanya perlu ditingkatkan saja untuk tidak telat dalam pemberian tanda tangan.

b. Faktor Tingkat Kreativitas Kerja

Menurut Sondang P. Siagian, (2014);

"Bahwa Kreatifitas (creativity) yaitu kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada public dengan melakukan inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja".

Terkait tingkat kreativitas kerja yang ditunjukkan oleh pegawai yang juga berada dalam kondisi yang sangat baik sebab kesesuaian hasil wawancara antara Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) dengan Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data (Ibu H.T), tentang dimensi tingkat kreatifitas dalam pelayanan publik kepada warga masyarakat yang membutuhkan bahwa pentingnya kreativitas dengan kesadaran dan tentu hal tersebut setiap pegawai ditempatkan karena dengan kreativitas yang memang dimiliki masing-masing. Hal ini juga dibenarkan oleh hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan kelima informan warga masyarakat bahwasanya memang pegawai pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dinilai telah memenuhi kriteria memiliki kreativitas dan bekerja sesuai ketentuan yang ditetapkan.

c. Faktor Tingkat Pengalaman Kerja

Menurut Wariati, (2015);

"Pengalaman kerja adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pegawai untuk mengemban tanggung jawab dari pekerjaan sebelumnya".

Faktor ini mendapatkan yang mendapatkan predikat baik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Dikarenakan pada tingkat pengalaman kerja ditemukan pula kesesuaian hasil wawancara antara Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) dengan staf penyelenggara dalam hal ini Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data (Ibu H.T), tentang faktor tingkat pengalaman dalam pelayanan publik kepada warga masyarakat yang membutuhkan bahwa memang prosedur dan aturan-aturan dasar pelayanan itu semua sudah diketahui tinggal bagaimana untuk untuk selalu saling mengingatkan satu sama lain karena para pegawai pada kantor pun telah rata-rata bekerja diatas lima tahun. Hal ini pun diperkuat dengan hasil observasi dan hasil wawancara terhadap keempat dari lima informan warga masyarakat yang menyatakan tingkat pengalaman dari pegawai di kantor dalam pemberian pelayanan sudah baik sebab mereka sering memberikan pelayanan secara kontinu terhadap masyarakat, meski hanya satu saja informan warga masyarakat yang hasil wawancaranya berbeda.

d. Faktor Tingkat Disiplin Kerja

Menurut Veithzal Rivai, (2004);

"Disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan".

Pada tingkat disiplin kerja, melalui hasil wawancara antara Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) dengan staf penyelenggara dalam hal ini Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Bapak R.P), mengungkapkan Perihal masuk tepat waktu, disini sudah ada aturannya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dimana masuk kantor jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore, istirahat yaitu hanya sampai jam 1 siang selain hari jumat yang sampai jam 2 siang kalau tak disiplin maka TPP dipotong sebagai konsekuensi. Hasil pengamatan lapangan melalui observasi pun mendukung bahwa tingkat kedisiplinan pegawai sudah sesuai dengan harapan pelayanan publik dan hal ini juga mendapat respon yang baik dengan hasil wawancara informan warga masyarakat. Keempat informan dari kelimanya setuju kedisiplinan pegawai sudah baik sebab pegawai selalu tepat waktu dan jam kantor.

e. Faktor Tingkat Inovasi Kerja

Inovasi bermaksud agar aparaturnya menciptakan suatu model kerja baru tetapi juga bertujuan untuk mencapai suatu kepuasan kerja bagi individu maupun organisasi dan kepuasan pelayanan bagi masyarakat.

Pada tingkat inovasi kerja, dimana melalui adanya kesesuaian hasil wawancara antara Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) dengan staf penyelenggara dalam hal ini Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Bapak R.P), mengenai inovasi tentu masing-masing bidang amatlah berbeda namun selalu ada inovasi terutama dalam pemberian pelayanan maupun program-program kerja mengedukasikan demi warga masyarakat. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan adanya kotak saran dan pendapat yang terdapat pada ruang pelayanan masyarakat di kantor. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon menghargai masukan masyarakat demi agar pelayanan kedepan semakin inovatif. Bersama ini, didukung dengan adanya hasil wawancara dari kelima informan warga masyarakat, dimana keempat diantara menyetujui bahwa pegawai di kantor sudah menunjukkan kinerja yang berinovasi dalam memberikan pelayanan administratif.

f. Faktor Tingkat Pengetahuan Kerja

Menurut Reber, (2010) bahwa komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses apapun, entah lahir dari bawaan atau dicapai lewat pengalaman, sehingga hal ini dapat diterapkan demi meningkatkan profesionalitas kerja.

Faktor penghambat terhadap kualitas pelayanan publik dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengetahuan Kerja, sebab meski terdapat kesesuaian hasil wawancara antara Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) dengan staf penyelenggara dalam hal ini Kepala Bidang Piak dan Pemanfaatan Data (Ibu H.T), tentang terkait tingkat pengetahuan pegawai dalam pelayanan publik kepada warga masyarakat yang membutuhkan mengemukakan bahwa mereka selalu berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, namun semua kembali kepada penilaian akhir masyarakat akan hasil kerja maupun kemampuan pegawai, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan hasil wawancara kepada informan warga masyarakat yang dilakukan, ketiga informan dari lima menyatakan pegawai sudah

mampu menunjukkan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mekanisme dan prosedur kerja, meski hanya dua informan yang tak sependapat.

g. Faktor Tingkat Kesanggupan Kerja

Kesanggupan kerja atau kecakapan kerja merupakan seseorang yang memiliki kecakapan atau kesanggupan untuk menjalankan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Kesanggupan berupa kemampuan (*ability*) merupakan suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

Terkait tingkat kesanggupan kerjanya, dari hasil wawancara antara Plt. Kepala Dinas sekaligus Sekretaris (Ibu M.H) dengan Kepala Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (Ibu R.S) diketahui bahwa kesanggupan tentunya berkaitan dengan aturan-aturan maupun prosedur-prosedur yang melalui pembinaan dan pendampingan karena meskipun pegawai telah paham peraturan namun apabila tak ada pendampingan atau pelatihan maka pegawai akan sulit memotivasi diri dalam memacu peningkatan dedikasi/loyalitas dalam kesanggupan kerja. Sesuai dengan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dari kelima informan warga masyarakat maka diketahui bahwa empat diantaranya setuju akan tingkat kesanggupan pegawai sudah sesuai melalui pelayanan yang diterima, namun satu informan diantara menyatakan kontra sebab Tingkat kesanggupan pegawai dalam bekerja masih dirasakan terbatas sebab terlihat dari batas nomor antrian yang ada. Sehingga kedua faktor dalam profesionalisme ini masih dalam posisi kurang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa tingkat kualitas pelayanan publik oleh aparat penyelenggara bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, merupakan kontribusi dari faktor profesionalisme kerja para pegawainya, terutama tingkat keterampilan kerja, tingkat kreativitas, tingkat pengalaman, tingkat disiplin, dan tingkat inovasi. Atau dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa profesionalisme kerja pegawai atau aparat pada suatu organisasi publik atau pemerintahan dapat mempengaruhi kondisi kualitas pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian optimal atau tingkat kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, sangat

ditentukan oleh sejumlah aspek pendukung dari faktor profesionalisme kerja pegawai sebagaimana yang dikemukakan diatas.

Penutup

Kesimpulan

Kualitas pelayanan publik secara administratif oleh aparatur penyelenggara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada dalam kondisi baik terutama, dari dimensi *responsiveness* (ketanggapan), dimensi *reliability* (keandalan) dan dimensi efisiensi (cara-cara terbaik). Sementara dimensi yang berada dalam kondisi cukup adalah dimensi *emphaty* (empati), dimensi *assurance* (jaminan) dan dimensi efektivitas. Disisi lain dimensi yang berada dalam kondisi masih kurang yakni, dimensi *tangibles* (ketampakan) berada dalam kondisi masih kurang.

Optimalnya kualitas pelayanan publik tersebut, memperoleh dukungan dari faktor profesionalisme kerja pegawai, terutama aspek: tingkat keterampilan kerja, tingkat kreativitas, tingkat pengalaman, tingkat disiplin, dan tingkat inovasi. Sementara faktor penghambat dari profesionalisme kerja terhadap kualitas pelayanan publik dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan tingkat kesanggupan yang berada dalam posisi kurang.

Secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan oleh aparat penyelenggara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon berada dalam kondisi cukup hal ini dapat dipengaruhi tingkat profesionalisme kerja para aparatnya.

Daftar Pustaka

- Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. (2005). *Manajemen Kualitas Jasa*. Yogyakarta: Andi.
- Felix, R. (2017). Service Quality and Customer Satisfaction in Selected Banks in Rwanda. *Journal of Business & Financial Affairs*, 06(01), 1–11. <https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000246>
- Lupiyoadi, R. (2001). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mukarom, Zainal & Laksana, M. W. (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007. (2007). *Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Retrieved from

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4759/pp-no-37-tahun-2007>
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016. (2016). *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121339/perwali-kota-ambon-no-38-tahun-2017>
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sondang P. Siagian. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyono. (2001). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. (2006). *Administrasi Kependudukan*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. (2013). *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. (2009). *Pelayanan Publik*.
- Veithzal Rivai. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wariati. (2015). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Barito Timur . *Jurnal Wawasan Manajemen*, 3(3), 217–228. Retrieved from <https://jwm.ulm.ac.id/id/index.php/jwm/article/view/3>